

LAPORAN AKHIR

SURVEY INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT (IPMas) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto Tahun 2025 dapat dilaksanakan dan disusun dalam bentuk laporan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyediakan instrumen pengukuran pembangunan masyarakat yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan salah satu indikator strategis untuk menggambarkan kondisi dan kualitas pembangunan masyarakat, khususnya dalam aspek kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil.

Pelaksanaan kegiatan IPMas Kota Mojokerto Tahun 2025 dilakukan melalui proses pengumpulan data secara sistematis dan partisipatif, dengan melibatkan responden yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan data yang objektif dan representatif sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan sosial yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada penguatan kualitas hidup masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, baik jajaran perangkat daerah, pemerintah kelurahan, petugas survei, maupun masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi. Kontribusi tersebut menjadi elemen penting dalam mewujudkan tersusunnya laporan IPMas Kota Mojokerto ini.

Akhir kata, kami berharap laporan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan masyarakat. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan kegiatan dan laporan IPMas di masa yang akan datang.

Mojokerto, Desember 2025





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN	I-2
1.2.1 Maksud.....	I-2
1.2.2 Tujuan	I-2
1.2.3 Sasaran	I-3
1.3 DASAR HUKUM	I-3
1.4 RUANG LINGKUP WILAYAH.....	I-3
1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	I-4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN

2.1 TINJAUAN PUSTAKA	II-1
2.1.1 Definisi Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	II-1
2.1.2 Dimensi Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	II-2
2.1.3 Perbedaan Metode Lama dan Metode Baru Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	II-2
2.1.4 Studi Literatur Penghitungan Indeks Pembangunan Masyarakat di Indonesia	II-5
2.2 TINJAUAN KEBIJAKAN	II-6
2.2.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	II-6
2.2.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	II-6
2.2.3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	II-11
2.2.4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	II-12
2.2.5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ...	II-12
2.2.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ...	II-15

2.2.7	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	II-20
2.2.8	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	II-20
2.2.9	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.....	II-22
2.2.10	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029	II-24
2.2.11	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto Tahun 2023-2043	II-27
2.2.12	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2025-2045.....	II-29
2.2.13	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2025–2029	II-35

BAB 3 GAMBARAN UMUM

3.1	KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF	III-1
3.2	KONDISI FISIK DASAR	III-2
3.2.1	Iklim	III-2
3.2.2	Topografi	III-2
3.2.3	Hidrologi.....	III-3
3.2.4	Geologi.....	III-4
3.3	KONDISI KEBENCANAAN	III-5
3.4	KONDISI PENGGUNAAN LAHAN	III-7
3.5	KONDISI DEMOGRAFIS.....	III-8
3.6	KONDISI SOSIAL KEMASYARAKATAN.....	III-12
3.6.1	Kesehatan	III-12
3.6.2	Agama	III-13
3.6.3	Politik	III-14

BAB 4 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

4.1	PENDEKATAN PENYUSUNAN	IV-1
4.1.1	Pendekatan Top-down Planning and Bottom-up Planning	IV-1
4.1.2	Pendekatan Perencanaan	IV-1
4.1.3	Pendekatan Pemanfaatan dan Pengendalian.....	IV-2
4.2	KERANGKA KONSEPTUAL	IV-2
4.3	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	IV-3
4.3.1	Pengumpulan Data Primer	IV-4
4.3.2	Pengumpulan Data Sekunder	IV-5
4.4	POPULASI DAN SAMPEL.....	IV-6
4.5	METODE ANALISIS	IV-8
4.5.1	Analisis Statistik Dekriptif Profil Responden.....	IV-8
4.5.2	Analisis Pengukuran Dimensi IPMas.....	IV-8
4.5.3	Analisis Rekomendasi IPMas.....	IV-12

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1	PROFIL RESPONDEN	V-1
5.1.1	Profil Responden berdasarkan Kecamatan.....	V-1
5.1.2	Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin	V-2



5.1.3	Profil Responden berdasarkan Usia	V-3
5.1.4	Profil Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir	V-4
5.1.5	Profil Responden berdasarkan Pekerjaan.....	V-5
5.1.6	Profil Responden berdasarkan Suku.....	V-6
5.1.7	Profil Responden berdasarkan Agama	V-6
5.1.8	Profil Responden berdasarkan Pengeluaran Rumah Tangga.....	V-7
5.1.9	Dokumentasi Responden	V-8
5.2	UJI VALIDITAS DAN REABILITAS	V-10
5.3	PENGUKURAN DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT	V-12
5.3.1	Dimensi Kohesi Sosial.....	V-12
5.3.2	Dimensi Inklusi Sosial	V-24
5.3.3	Dimensi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil	V-28
5.4	PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT	V-39
5.5	PROYEKSI INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KAITANNYA DENGAN RPJMD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025-2029.....	V-49
5.6	ANALISIS AKAR MASALAH	V-51
5.7	ANALISIS SWOT.....	V-53
 BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN		
6.1	KESIMPULAN.....	VI-1
6.2	SARAN.....	VI-2





DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Konsep Awal dan Konsep Pengembangan IPMas	II-3
Tabel 2. 2 Studi Literatur Penghitungan Indeks Pembangunan Masyarakat di Indonesia	II-5
Tabel 2. 3 Hak dan Kewajiban Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah...	II-7
Tabel 2. 4 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	II-16
Tabel 2. 5 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.....	II-17
Tabel 2. 6 Target IPMas dalam Dokumen RPJMD Kota Mojokerto 2025-2029	II-41
Tabel 3. 1 Luas Wilayah dan Nama Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Mojokerto, 2024	III-1
Tabel 3. 2 Panjang Sungai Kota Mojokerto.....	III-4
Tabel 3. 3 Potensi Kuantitas Air di Kota Mojokerto	III-4
Tabel 3. 4 Jenis Geologi menurut Kelurahan di Kota Mojokerto	III-5
Tabel 3. 5 Luas Kawasan Rawan Bencana	III-6
Tabel 3. 6 Guna Lahan Tidak Terbangun Kota Mojokerto	III-7
Tabel 3. 7 Jumlah Kelahiran dan Kematian menurut Kelurahan di Kota Mojokerto, 2024.....	III-9
Tabel 3. 8 Penduduk menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kota Mojokerto, 2024	III-10
Tabel 3. 9 Jumlah Pendonor Darah menurut Bulan di Kota Mojokerto, 2024	III-12
Tabel 3. 10 Jumlah POSYANDU menurut Kelurahan di Kota Mojokerto, 2024.....	III-12
Tabel 3. 11 Jumlah Pemeluk Agama menurut Kelurahan di Kota Mojokerto, 2024.....	III-13
Tabel 3. 12 Jumlah Tempat Peribadatan menurut Kelurahan di Kota Mojokerto, 2024	III-14
Tabel 3. 13 Jumlah Hak Pilih Pemilihan Umum menurut Kelurahan di Kota Mojokerto, 2024.....	III-15
Tabel 4. 1 Persebaran Sampel.....	IV-7
Tabel 4. 2 Unsur Penilaian dalam Pengukuran IPMas.....	IV-9
Tabel 5. 1 Profil Responden berdasarkan Kecamatan	V-2
Tabel 5. 2 Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin	V-3
Tabel 5. 3 Profil Responden berdasarkan Usia	V-4
Tabel 5. 4 Profil Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir	V-5

Tabel 5. 5 Profil Responden berdasarkan Pekerjaan	V-6
Tabel 5. 6 Profil Responden berdasarkan Agama	V-7
Tabel 5. 7 Profil Responden berdasarkan Pengeluaran Rumah Tangga	V-8
Tabel 5. 8 Uji Validitas	V-10
Tabel 5. 9 Uji Reabilitas Indeks Pembangunan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2025	V-11
Tabel 5. 10 Hasil Pengukuran Komponen Kerja Sama Sosial	V-12
Tabel 5. 11 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial	V-13
Tabel 5. 12 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Organisasi	V-15
Tabel 5. 13 Persentase Alasan Mengikuti Kegiatan Organisasi	V-15
Tabel 5. 14 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Organisasi	V-16
Tabel 5. 15 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Keagamaan.....	V-18
Tabel 5. 16 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Keagamaan	V-18
Tabel 5. 17 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.....	V-19
Tabel 5. 18 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan....	V-20
Tabel 5. 19 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Bersama untuk Kepentingan Warga	V-21
Tabel 5. 20 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Bersama untuk Kepentingan Warga.....	V-22
Tabel 5. 21 Hasil Pengukuran Komponen Kepercayaan Sosial	V-23
Tabel 5. 22 Persentase Interaksi Responden dengan Beda Suku dan Agama	V-24
Tabel 5. 23 Persentase Responden Membantu Penyelenggaraan Kegiatan Agama yang Berbeda di Wilayah Tempat Tinggal	V-25
Tabel 5. 24 Hasil Pengukuran Komponen Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial Budaya	V-26
Tabel 5. 25 Hasil Pengukuran Komponen Diskriminasi	V-27
Tabel 5. 26 Hasil Pengukuran Komponen Dukungan Sosial bagi Minoritas.....	V-28
Tabel 5. 27 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada PEMILU 2024	V-29
Tabel 5. 28 Alasan tidak Menggunakan Hak Pilih pada PEMILU 2024	V-30
Tabel 5. 29 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Organisasi Massa.....	V-31
Tabel 5. 30 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Organisasi Massa.....	V-32
Tabel 5. 31 Bencana Alam yang Pernah Dialami Masyarakat dalam Tiga Tahun Terakhir	V-33
Tabel 5. 32 Ketersediaan Fasilitas/ Upaya Antisipasi/ Mitigasi Bencana Alam.....	V-34
Tabel 5. 33 Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pelatihan/ Simulasi terhadap Penyelamatan Bencana Alam	V-35
Tabel 5. 34 Kesesuaian Pelatihan/ Simulasi dengan Bencana yang Terjadi	V-35
Tabel 5. 35 Kejadian yang Melibatkan Penegak Hukum	V-36
Tabel 5. 36 Bantuan Masalah Hukum.....	V-37
Tabel 5. 37 Penyelesaian Permasalahan	V-38
Tabel 5. 38 Peranan Aparat dan Tokoh dalam Penyelesaian Masalah	V-39
Tabel 5. 39 Skor Indeks IPMas	V-41
Tabel 5. 40 Proyeksi IPMas Tahun 2026-2030	V-50
Tabel 5. 41 Analisis SWOT	V-53





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Asas Penyelenggaraan Sosial.....	II-13
Gambar 2. 2 Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025–2029	II-23
Gambar 2. 3 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Mojokerto	II-28
Gambar 2. 4 Peta Struktur Ruang Kota Mojokerto.....	II-28
Gambar 2. 5 Peta Pola Ruang Kota Mojokerto	II-29
Gambar 2. 6 Isu Strategis RPJPD Kota Mojokerto	II-30
Gambar 2. 7 Visi RPJPD Kota Mojokerto.....	II-31
Gambar 2. 8 Sasaran Visi RPJPD Kota Mojokerto	II-31
Gambar 2. 9 Misi RPJPD Kota Mojokerto	II-32
Gambar 2. 10 Arah Kebijakan RPJPD Kota Mojokerto	II-32
Gambar 2. 11 Cascading Tujuan 1-Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat.....	II-38
Gambar 2. 12 Cascading Tujuan 2-Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.....	II-38
Gambar 2. 13 Cascading Tujuan 3-Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	II-39
Gambar 2. 14 Cascading Tujuan 4-Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan.....	II-40
Gambar 2. 15 Cascading Tujuan 5-Terciptanya Pondasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.....	II-41
Gambar 3. 1 Peta Batas Administrasi Kota Mojokerto	III-2
Gambar 3. 2 Jumlah Penduduk menurut Kelurahan di Kota Mojokerto, 2024	III-8
Gambar 3. 3 Rasio Jenis Kelamin Kota Mojokerto	III-9
Gambar 3. 4 Piramida Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2024	III-11
Gambar 4. 1 Kerangka Konseptual	IV-3
Gambar 4. 2 Matriks Analisis SWOT	IV-14
Gambar 5. 1 Profil Responden berdasarkan Kecamatan.....	V-2
Gambar 5. 2 Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin	V-3
Gambar 5. 3 Profil Responden berdasarkan Usia	V-4
Gambar 5. 4 Profil Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir	V-5
Gambar 5. 5 Profil Responden berdasarkan Pekerjaan	V-6
Gambar 5. 6 Profil Responden berdasarkan Agama	V-7
Gambar 5. 7 Profil Responden berdasarkan Pengeluaran Rumah Tangga	V-8
Gambar 5. 8 Dokumentasi Responden.....	V-9

Gambar 5. 9 Hasil Pengukuran Komponen Kerja Sama Sosial.....	V-12
Gambar 5. 10 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial.....	V-14
Gambar 5. 11 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Organisasi.....	V-15
Gambar 5. 12 Persentase Alasan Mengikuti Kegiatan Organisasi	V-16
Gambar 5. 13 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Organisasi.....	V-17
Gambar 5. 14 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Keagamaan	V-18
Gambar 5. 15 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Keagamaan.....	V-19
Gambar 5. 16 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.....	V-20
Gambar 5. 17 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	V-20
Gambar 5. 18 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Bersama untuk Kepentingan Warga	V-22
Gambar 5. 19 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Bersama untuk Kepentingan Warga	V-23
Gambar 5. 20 Hasil Pengukuran Komponen Kepercayaan Sosial	V-24
Gambar 5. 21 Persentase Interaksi Responden dengan Beda Suku dan Agama	V-25
Gambar 5. 22 Persentase Responden Membantu Penyelenggaraan Kegiatan Agama yang Berbeda di Wilayah Tempat Tinggal.....	V-25
Gambar 5. 23 Hasil Pengukuran Komponen Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial Budaya	V-26
Gambar 5. 24 Hasil Pengukuran Komponen Diskriminasi.....	V-27
Gambar 5. 25 Hasil Pengukuran Komponen Dukungan Sosial bagi Minoritas.....	V-28
Gambar 5. 26 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada PEMILU 2024	V-29
Gambar 5. 27 Alasan tidak Menggunakan Hak Pilih pada PEMILU 2024	V-30
Gambar 5. 28 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Organisasi Massa	V-31
Gambar 5. 29 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Organisasi Massa	V-32
Gambar 5. 30 Bencana Alam yang Pernah Dialami Masyarakat dalam Tiga Tahun Terakhir.....	V-33
Gambar 5. 31 Ketersediaan Fasilitas/ Upaya Antisipasi/ Mitigasi Bencana Alam	V-34
Gambar 5. 32 Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pelatihan/ Simulasi terhadap Penyelamatan Bencana Alam	V-35
Gambar 5. 33 Kesesuaian Pelatihan/ Simulasi dengan Bencana yang Terjadi.....	V-36
Gambar 5. 34 Kejadian yang Melibatkan Penegak Hukum.....	V-37
Gambar 5. 35 Bantuan Masalah Hukum	V-38
Gambar 5. 36 Penyelesaian Permasalahan	V-38
Gambar 5. 37 Peranan Aparat dan Tokoh dalam Penyelesaian Masalah	V-39
Gambar 5. 38 Radar Net Skor Dimensi (E) IPMas	V-46
Gambar 5. 39 Radar Net Skor Komponen (C) Penyusun Dimensi IPMas	V-49
Gambar 5. 40 Diagram Akar Masalah IPMas	V-52





PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Visi pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Kota Mojokerto yang Maju, Berdaya Saing, Berkarakter, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Dalam pencapaian visi pembangunan tersebut sesuai misi ke-2 yakni Ketahanan Sosial dan Budaya, melalui Upaya Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Mendorong Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya, Kesetaraan Gender, dan Memperkecil Ketimpangan Sosial, ditetapkan juga indikator sasaran yaitu Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas).

Indikator baru yang dapat mengukur kemajuan kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan guna menghasilkan informasi lain yang belum dapat disediakan oleh pengukuran pembangunan manusia yang telah ada saat ini. Pengukuran dari kemajuan pembangunan masyarakat tersebut akan dituangkan bersama dengan kemajuan individu sebagai bagian dari pengukuran pembangunan manusia secara utuh.

Saat ini telah ada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur derajat pembangunan manusia melalui aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dimensi pembangunan manusia tidak hanya mencakup gambaran capaian individu seperti penghasilan, tingkat pendidikan, dan status kesehatan, tetapi juga pencapaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Ukuran IPM perlu dilengkapi dengan indikator komposit lain yang mampu menggambarkan pembangunan manusia secara utuh khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, melalui Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas).



IPMas merupakan wujud keberhasilan dari program pengembangan sumber daya manusia dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat pada suatu daerah. Komposit dari IPMas dapat dilihat dari gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Gotong royong menggambarkan hubungan sosial dan wujud partisipasi Masyarakat terkait dengan kerjasama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif, dan kepercayaan sosial. Toleransi menggambarkan respon dan bentuk sikap masyarakat terhadap adanya perbedaan sosial budaya, inklusi terhadap minoritas, kesetaraan gender, dan dukungan sosial kepada minoritas. Rasa aman menggambarkan mengenai kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial, dan penyelesaian sengketa secara beradab dalam kegiatan organisasi massa sebagai bentuk pengembangan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat.

Merujuk pada konsepsi IPMas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), pengukuran IPMas didasarkan pada 3 dimensi diantaranya Dimensi Kohesi Sosial, Dimensi Inklusi Sosial, dan Dimensi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil. Praktisnya, proses pengukuran akan dilakukan melalui survei dengan menghimpun persepsi masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Kota Mojokerto. Dengan ditetapkan indikator sasaran Pembangunan IPMas, maka Pemerintah Kota Mojokerto melakukan pengukuran IPMas untuk mengidentifikasi tingkat ketercapaian salah satu indikator misi pembangunan, serta sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan masyarakat itu sendiri.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Maksud pekerjaan Survey Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto Tahun 2025 adalah mengukur dan mengetahui hasil hitung IPMas di Kota Mojokerto.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Survey Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengukur hasil hitung angka IPMas Kota Mojokerto, yang terdiri dari Dimensi Kohesi Sosial, Dimensi Inklusi Sosial, dan Dimensi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil



2. Memperoleh bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan Pembangunan Masyarakat di Kota Mojokerto.

1.2.3 Sasaran

Sasaran/ output yang diharapkan dari pekerjaan Survey Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto Tahun 2025 adalah tersusunnya dokumen Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto Tahun 2025 yang berisi angka IPMas Kota Mojokerto Tahun 2025 serta proyeksi angka IPMas Kota Mojokerto Tahun 2026-2030.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pekerjaan Survey Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto Tahun 2025, meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2025;
5. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2025.

1.4 RUANG LINGKUP WILAYAH

Lokasi pelaksanaan kegiatan Survey Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto Tahun 2025 meliputi seluruh wilayah Kota Mojokerto.



1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan Laporan Pendahuluan kegiatan Survey Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto Tahun 2025 terdiri dari:

1. Pendahuluan yang meliputi latar belakang; maksud, tujuan, dan sasaran; dasar hukum; dan ruang lingkup wilayah.
2. Tinjauan Pustaka dan Kebijakan yang meliputi segala teori yang mendukung dalam proses penyusunan laporan dan berisikan tinjauan kebijakan yang menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan terkait Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas).
3. Gambaran Umum yang meliputi gambaran umum Kota Mojokerto dan gambaran umum pembangunan bidang sosial masyarakat di Kota Mojokerto.
4. Pendekatan dan Metodologi yang meliputi kerangka konseptual, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik sampling, teknik analisis data, dan desain survey.
5. Hasil dan Pembahasan yang berisi analisis profil responden, pengukuran dan penghitungan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto Tahun 2025, analisis akar masalah, serta analisis SWOT.
6. Kesimpulan dan Saran memuat Kesimpulan dan saran terkait hasil analisis Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) yang telah dilakukan sebelumnya.





TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu topik tertentu, misalnya mengutip dari jurnal, buku dan lainnya.

2.1.1 Definisi Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) sebagai alat ukur pembangunan sosial masyarakat. IPMas menjadi indikator pembangunan non ekonomi yang dapat menjadi salah satu rujukan utama memotret kondisi masyarakat di Indonesia. Pembangunan yang esensial harus dikembangkan untuk menghargai keragaman dan perbedaan, membangun harmoni sosial, serta mengukuhkan solidaritas sosial dan daya rekat masyarakat. Pembangunan masyarakat masih menghadapi beragam persoalan, salah satunya terkait konflik horizontal antarkelompok masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia yang masih kerap terjadi. Hal ini menjadi tantangan yang perlu memperoleh perhatian semua pihak. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah .menyusun indikator yang dapat mengukur kondisi sosial masyarakat, Pemerintah melalui RPJPN 2025-2045 telah berupaya mengarahkan orientasi pembangunan tidak sekadar memperkuat sektor ekonomi tapi juga membangun manusia dan masyarakat yang beretika, bermoral, dan berbudaya. Mewujudkan visi tersebut



pemerintah memperkuat tiga dimensi utama: kohesi sosial, inklusi sosial, dan kapasitas masyarakat sipil.

2.1.2 Dimensi Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

IPMas merupakan indeks komposit yang terdiri 3 dimensi dan 12 aspek.

1. Dimensi Kohesi Sosial: menggambarkan kekuatan kolektif anggota atau kelompok di dalam masyarakat untuk saling menerima, berbagi, dan berkontribusi yang dilandasi solidaritas di dalam organisasi sosial sehingga meneguhkan daya rekat masyarakat. Aspek yang diukur dalam dimensi kohesi sosial adalah kerja sama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif, dan kepercayaan sosial.
2. Dimensi Inklusi Sosial: pilihan dan kesempatan yang terbuka bagi setiap orang (individu) dan kelompok untuk terlibat, mengambil peran, dan menjadi bagian yang menyatu dalam suatu proses sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk mendapatkan hak-hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Aspek yang diukur dalam dimensi inklusi sosial adalah penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya, inklusi terhadap minoritas, dukungan sosial bagi minoritas, dan kesetaraan gender.
3. Dimensi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil: Kemampuan masyarakat mengelola sumber daya publik, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, bernegosiasi, persuasi dan proses memengaruhi, mengelola perselisihan dan konflik, dan memperkuat institusi publik yang akuntabel, untuk menopang dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat yang demokratis. Aspek yang diukur dalam dimensi pengembangan kapasitas masyarakat sipil adalah kesadaran hukum dan politik, organisasi masyarakat sipil, mitigasi risiko sosial, dan penyelesaian sengketa.

2.1.3 Perbedaan Metode Lama dan Metode Baru Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Konsep pengembangan IPMas mengalami perkembangan. Pada konsep awal. Pengukuran IPMas dilakukan dengan tiga dimensi, yaitu dimensi gotong royong, toleransi, dan dimensi kesadaran hukum. Kemudian pada Tahun 2017, BAPPENAS melakukan pengembangan konsep pengukuran IPMas. Pengembangan tersebut



dimaksudkan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih komprehensif dalam mengukur IPMas. Sehingga pada konsep IPMas yang baru terdapat tiga dimensi yaitu dimensi kohesi sosial, inklusi sosial, dan dimensi pengembangan kapasitas masyarakat sipil

Berikut dijabarkan perbandingan konsep awal dan konsep pengembangan IPMas untuk mendapatkan sudut pandang yang mendalam dan komprehensif terhadap konsep pengukuran IPMas. Berdasarkan kajian, konsep pengembangan IPMas baru jauh lebih komprehensif dan mengakomodasi indikator-indikator lama.

Tabel 2. 1 Perbandingan Konsep Awal dan Konsep Pengembangan IPMas

Konsep Awal IPMas (RPJMN 2015-2019)			Konsep Pengembangan IPMas		
Dimensi	Sub-Dimensi	Variabel	Dimensi	Sub-Dimensi	Variabel
Gotong royong	Tingkat kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Percaya menitipkan rumah kepada tetangga ketika semua ART bepergian/ menginap di tempat lain ✓ Percaya menitipkan anak usia 0-12 tahun kepada tetangga jika tidak ada satupun ART dewasa ada di rumah 	Kohesi sosial	Kepercayaan sosial	Sikap percaya terhadap lingkungan
	Aksi kolektif	Kebiasaan mengikuti kegiatan bersama untuk membantu warga yang mengalami musibah (kematian, sakit, dll) di lingkungan tempat tinggal		Aksi kolektif	Partisipasi dalam kegiatan umum



Konsep Awal IPMas (RPJMN 2015-2019)			Konsep Pengembangan IPMas		
Dimensi	Sub-Dimensi	Variabel	Dimensi	Sub-Dimensi	Variabel
	Tolong menolong	Kemudahan mendapatkan pertolongan dari tetangga (selain kerabat) di lingkungan tempat tinggal ketika sedang mengalami masalah keuangan		Kerjasama sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial
				Jejaring sosial	Partisipasi dalam kegiatan kelompok
Toleransi	Toleransi antar umat beragama	Tanggapan terhadap kegiatan di lingkungan tempat tinggal oleh sekelompok orang dari agama lain	Inklusi sosial	Penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya	Tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan agama/ etnis lain
	Toleransi antar suku	Tanggapan terhadap kegiatan di lingkungan tempat tinggal oleh sekelompok orang dari suku lain		Inklusi terhadap minoritas	Tanggapan terhadap pimpinan daerah dari suku/ etnis lain
				Dukungan sosial bagi minoritas	Hambatan dalam mengakses fasilitas umum
				Kesetaraan gender	Kesetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan
Kesadaran hukum	Rasa aman	Perasaan aman di lingkungan tempat tinggal	Pengembangan kapasitas masyarakat sipil	Kesadaran hukum dan politik	✓ Kepemilikan identitas dasar ✓ Partisipasi dalam PEMILU Tahun 2024
				Organisasi masyarakat sipil	✓ Keberadaan LSM yang terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat ✓ Keanggotaan dalam Organisasi Massa (ORMAS) dan partai politik



Konsep Awal IPMas (RPJMN 2015-2019)			Konsep Pengembangan IPMas		
Dimensi	Sub-Dimensi	Variabel	Dimensi	Sub-Dimensi	Variabel
				Mitigasi risiko sosial	✓ Ketersediaan fasilitas/ upaya antisipasi/ mitigasi bencana alam ✓ Partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana alam
				Penyelesaian sengketa	Keterlibatan lembaga penegak hukum/ tokoh sebagai penengah dalam kekerasan massa

2.1.4 Studi Literatur Penghitungan Indeks Pembangunan Masyarakat di Indonesia

Berbagai daerah di Indonesia telah mengembangkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). Kabupaten Tulungagung, misalnya, menggunakan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) berbasis dimensi gotong royong, toleransi, dan rasa aman, yang dihitung melalui pendekatan indeks komposit berbasis survei rumah tangga. Pada tingkat nasional, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dikembangkan dalam kerangka RPJMN dengan dimensi kohesi sosial, inklusi sosial, dan kapasitas masyarakat sipil. Kota Malang juga menerapkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dengan metode rata-rata tertimbang indikator sosial. Kesamaan metodologi tersebut menunjukkan bahwa perhitungan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto telah sejalan dengan *best practice* nasional dan daerah di Indonesia.

Tabel 2. 2 Studi Literatur Penghitungan Indeks Pembangunan Masyarakat di Indonesia

No	Daerah / Tahun	Nama Indeks	Dimensi Utama	Metode Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1	Kabupaten Tulungagung (2020)	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	– Gotong royong – Toleransi – Rasa aman	Indeks komposit; normalisasi skor (0–1), pembobotan dimensi, agregasi tertimbang	Survei rumah tangga (sampling proporsional)	Dokumen penyusunan IPMas Tulungagung – ITS
2	Nasional (RPJMN 2015–2019)	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Nasional	– Kohesi sosial – Inklusi sosial – Kapasitas masyarakat sipil	Agregasi indikator sosial RPJMN → normalisasi	Survei nasional & data sektoral	Evaluasi Akhir RPJMN



No	Daerah / Tahun	Nama Indeks	Dimensi Utama	Metode Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
				skor (0–1)→ indeks komposit		
3	Kota Malang (2022)	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	<ul style="list-style-type: none"> – Modal sosial – Partisipasi – Kepercayaan 	Rata-rata tertimbang indikator sosial	Survei primer masyarakat	Jurnal Pangripta Kota Malang

2.2 TINJAUAN KEBIJAKAN

Tinjauan kebijakan adalah suatu proses sistematis dan menyeluruh untuk mengevaluasi suatu kebijakan dan menentukan apakah kebijakan tersebut berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mojokerto. Adapun kebijakan yang saling terkait, antara lain:

2.2.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan kuat bagi dimensi inklusi sosial, kesetaraan, dan nondiskriminasi yang diukur dalam IPMas. UU ini menjamin:

1. Kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum;
2. Kebebasan beragama dan beribadah; dan
3. Perlindungan terhadap kelompok rentan dan minoritas.

Dimensi inklusi sosial dan kesetaraan dalam IPMas secara langsung mencerminkan implementasi nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Tingginya skor pada dimensi ini menunjukkan tingkat penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat lokal.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, serta bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan pula prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah diantaranya yaitu:

Tabel 2. 3 Hak dan Kewajiban Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah

No	Hak dan Kewajiban
Hak dan Kewajiban Warga Negara	
1.	Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
2.	Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus
3.	Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus
4.	Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus
5.	Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat
6.	Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar
7.	Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan
Hak dan Kewajiban Orang Tua	



No	Hak dan Kewajiban
1.	Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya
2.	Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya
Hak dan Kewajiban Masyarakat	
1.	Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan
2.	Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah	
1.	Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi
3.	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan



berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dan undang-undang ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;



8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. Pelaksanaan wajib belajar;
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. Pemberdayaan peran masyarakat;
12. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. Pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.



2.2.3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan:



1. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.
2. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan peran serta masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Dimensi mitigasi risiko sosial dan bencana dalam IPMas secara langsung berkaitan dengan amanat undang-undang ini. Rendahnya capaian pada dimensi mitigasi dalam IPMas menunjukkan masih terbatasnya kapasitas masyarakat dalam memahami dan menghadapi risiko bencana, sehingga menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan peningkatan kesiapsiagaan berbasis komunitas.

2.2.5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksudkan dengan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.



Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan atas asas:



Gambar 2. 1 Asas Penyelenggaraan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
5. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;
7. Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;
8. Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;
9. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial;
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
11. Mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
12. Memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
13. Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
14. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
2. Pelayanan sosial;



3. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
4. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
5. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
6. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan
7. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

2.2.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah ditujukan salah satunya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota disampaikan dalam tabel berikut:



Tabel 2. 4 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan b. Pengelolaan pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan menengah b. Pengelolaan pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan pendidikan
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	-	-
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam kabupaten/kota

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



Tabel 2. 5 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Upaya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan nasional/lintas provinsi; b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) nasional dan rujukan nasional/lintas provinsi; c. Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standardisasi fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta; dan d. Penertiban izin rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan kesehatan Penanaman Modal Asing (PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota; b. Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat provinsi/lintas kabupaten/kota; c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan UKP kabupaten/kota dan rujukan tingkat kabupaten/kota; b. Pengelolaan UKM kabupaten/kota dan rujukan tingkat kabupaten/kota; dan c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten/kota.



No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan standardisasi dan registrasi tenaga kesehatan Indonesia, Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA), serta penerbitan rekomendasi pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA); b. Penetapan penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bagi daerah yang tidak mampu dan tidak diminati; c. Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; d. Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan; dan e. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional. 	Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; dan b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP kabupaten/kota.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan program nasional; b. Pengawasan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan; c. Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), bahan obat, 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); dan b. Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal; b. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; dan



No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
		bahan baku alam yang terkait dengan kesehatan; d. Pengawasan <i>pre-market</i> obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman; dan e. Pengawasan <i>post-market</i> obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman.		e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh nasional dan internasional, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat nasional dan internasional	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



2.2.7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjamin hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tercermin dalam dimensi kesadaran hukum dan politik IPMas menunjukkan keberhasilan implementasi prinsip demokrasi di tingkat lokal.

Kesadaran hukum dan politik dalam IPMas juga sejalan dengan upaya penguatan warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam sistem demokrasi Indonesia.

2.2.8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Penyelenggaraan kesehatan bertujuan:

1. Meningkatkan perilaku hidup sehat;
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien;
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
5. Meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi KLB atau wabah;
6. Menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien;
7. Mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan; dan



8. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan juga bahwa setiap orang berhak:

1. Hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;
2. Mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
4. Mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan kesehatan;
5. Mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan;
6. Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
7. Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
8. Menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap;
9. Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya;
10. Memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan; dan
11. Mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan.

Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan juga memuat bahwa setiap orang berkewajiban untuk:

1. Mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
2. Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat;
4. Menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak kesehatan orang lain;
5. Mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah; dan
6. Mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional.



2.2.9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, dirumuskan 8 prioritas pembangunan nasional yang merupakan kerangka strategis utama yang dirancang untuk mendorong transformasi struktural Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. **Prioritas pertama** menekankan pentingnya memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui penguatan literasi, media yang sehat, dan sistem hukum yang menjamin keadilan. **Prioritas kedua** fokus pada ketahanan dan kemandirian bangsa dengan membangun sistem pertahanan nasional yang kuat dan kemandirian sektor-sektor vital seperti pangan, energi, dan air. Transformasi ekonomi juga diupayakan melalui penguatan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru. **Prioritas ketiga dan keempat** berfokus pada infrastruktur dan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur tidak hanya diarahkan pada fisik dan konektivitas wilayah, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui pengembangan kewirausahaan, ekonomi kreatif, serta sektor agro maritim berbasis koperasi. Sejalan dengan itu, pembangunan SDM diarahkan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan peran strategis pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dengan ini, Indonesia diharapkan memiliki tenaga kerja unggul yang mampu bersaing secara global. **Prioritas kelima hingga kedelapan** menekankan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA), pengentasan kemiskinan dari desa, reformasi tata kelola pemerintahan, serta penguatan hubungan harmonis antara manusia, lingkungan, dan budaya. Pemerintah mendorong nilai tambah dalam negeri melalui pengembangan industri nikel, tembaga, dan sawit, serta mendorong pembangunan dari desa melalui program sosial yang inklusif. Dalam menghadapi tantangan tata kelola dan lingkungan, kebijakan diarahkan untuk memperkuat birokrasi yang akuntabel, memberantas korupsi dan kejahatan transnasional, serta meningkatkan ketahanan iklim, pelestarian budaya, dan toleransi antarumat beragama. Semua ini menjadi fondasi transformasi menuju pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif.





Gambar 2. 2 Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025–2029

Sumber: RPJMN Tahun 2025–2029

Kota Mojokerto masuk dalam koridor strategis pengembangan Kawasan industri nasional sebagai bagian dari jalur Gresik–Surabaya–Sidoarjo–Mojokerto–Pasuruan (GSSMP). Koridor ini tercantum dalam strategi pembangunan industri nasional yang mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada akhir periode RPJMN 2025–2029. Meskipun Kota Mojokerto bukan pusat industri utama, letaknya yang terintegrasi dalam jaringan logistik dan industri regional menjadikannya lokasi yang strategis untuk pengembangan kawasan penyangga industri, distribusi barang, serta jasa pendukung rantai pasok. Ini membuka peluang besar bagi kota ini untuk berperan sebagai simpul logistik, pusat perdagangan, serta kawasan hunian pekerja industri dari wilayah sekitarnya.

Pemerintah Kota Mojokerto dapat mengoptimalkan potensi ekonomi melalui penguatan sektor-sektor yang sesuai dengan karakteristik lokal, seperti UMKM berbasis kriya, batik, dan kerajinan tradisional, yang memiliki nilai budaya dan potensi ekspor. Selain itu, pengembangan ekonomi digital dan pariwisata budaya



juga menjadi sektor strategis yang relevan untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan infrastruktur pendukung seperti akses jalan nasional dan konektivitas antar wilayah yang telah berkembang, Kota Mojokerto memiliki peluang untuk menjadi pusat ekonomi kreatif serta sentra jasa dan perdagangan yang melengkapi aktivitas industri di kota-kota sekitarnya.

Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, strategi ini sejalan dengan pendekatan "membangun dari bawah" yang menekankan sinergi antara pusat dan daerah. Kota Mojokerto sebagai bagian dari metropolitan Gerbangkertosusila di Jawa Timur dapat memanfaatkan posisi ini untuk mendorong investasi, meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan vokasi, serta memperluas kerjasama antar daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif, mengurangi ketimpangan wilayah, dan memperkuat integrasi Mojokerto ke dalam ekosistem ekonomi nasional. Dengan perencanaan dan kolaborasi yang tepat, Kota Mojokerto dapat memainkan peran penting sebagai simpul penyangga dalam jaringan pertumbuhan ekonomi wilayah timur Pulau Jawa.

2.2.10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen strategis yang berfungsi sebagai panduan dalam upaya pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Telaah isu dalam RPJMD menjadi sangat penting sebagai langkah awal dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran dan efektif di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dalam sub bab ini, akan dibahas berbagai isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur, termasuk tantangan dan peluang yang mempengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah tersebut

Isu pertama adalah Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah. Meskipun Jawa Timur merupakan salah satu motor ekonomi nasional, pertumbuhan yang dicapai belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah dan antar sektor. Ketimpangan antara wilayah barat dan timur Jawa Timur masih mencolok, begitu pula antara sektor industri dan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan langkah



konkret untuk memperkuat struktur ekonomi lokal agar lebih inklusif dan mampu mendorong pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Isu kedua menyangkut Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja untuk Pekerjaan yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program yang Efektif untuk Mengatasi Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Jawa Timur masih tergolong tinggi, terutama di daerah pedesaan dan kantong-kantong urban informal. Tantangan ini diperparah oleh belum optimalnya akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak dan produktif. Oleh karena itu, strategi pembangunan perlu diarahkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas melalui pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, serta penguatan keterampilan kerja masyarakat.

Isu ketiga adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas. Masalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) karena layanan pendidikan yang tidak memadai adalah isu serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kurangnya layanan pendidikan yang baik dapat memperbesar kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial masyarakat. Rendahnya layanan pendidikan menyebabkan kurangnya SDM yang berkualitas sehingga dapat menghambat pembangunan ekonomi suatu daerah. SDM yang terdidik dan terlatih dengan baik sangat penting dalam upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Isu keempat berfokus pada Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik. Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu Provinsi Jawa Timur perlu akan adanya kepemimpinan lokal yang berwawasan global berlandaskan kearifan lokal yang



dapat menggerakkan masyarakatnya untuk berwawasan global namun tetap berpijak pada landasan nilai-nilai budayanya sebagai kearifan lokal.

Isu kelima berkaitan dengan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana Alam dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur yang perlu menjadi perhatian antara lain terkait dengan adanya ancaman krisis pangan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan maraknya alih fungsi lahan, penurunan ketersediaan air terutama di kawasan perkotaan, serta peningkatan resiko bencana-bencana hidrometeorologi terutama banjir. Peningkatan risiko bencana alam diidentifikasi memiliki keterkaitan akar masalah dengan beberapa hal penting yaitu: peningkatan kerentanan terkait dampak perubahan iklim, kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung penanggulangan bencana, serta alih fungsi lahan. Dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, ekonomi dan kesehatan masyarakat dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

Isu strategis terakhir adalah Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani. Kedaulatan Pangan Jawa Timur terkonfirmasi dari tingginya kontribusi komoditas agro (pertanian dalam arti luas) Jawa Timur terhadap nasional, sehingga menjadi lumbung pangan nasional. Kebutuhan pangan di Jawa Timur hampir seluruhnya dapat dipenuhi dari produksi domestik. Surplus komoditas pangan pertanian di Jawa Timur selain didukung potensi sumber daya alam yang sesuai, juga sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur pendukung yang cukup baik. Dengan dirilisnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah pusat, maka Jawa Timur sebagai daerah lumbung pangan nasional memiliki kesempatan untuk mendukung langsung dari produksi komoditas pangan dan pertanian yang menjadi bahan makanan dari program ini dan meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen pangan. Kesempatan ini perlu didukung dengan kestabilan produksi pangan dan pertanian agar mampu menopang program MBG, yang kelanjutannya guna membangun pondasi fisik dan psikis Sumber Daya Manusia kedepan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks Kota Mojokerto, keenam isu strategis Jawa Timur tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat, terutama dalam aspek pemerataan ekonomi dan



peningkatan kualitas SDM. Sebagai kota kecil dengan ruang wilayah yang terbatas namun berada di koridor industri strategis (Gresik–Surabaya–Sidoarjo–Mojokerto–Pasuruan), Mojokerto memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif yang menopang kawasan metropolitan. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan lapangan kerja berkualitas dan masih tingginya ketergantungan pada sektor informal perlu ditangani dengan intervensi program-program pelatihan vokasi, inkubasi UMKM, dan integrasi ekonomi digital untuk memperluas peluang kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Selain itu, infrastruktur dasar dan lingkungan hidup di Kota Mojokerto juga menjadi isu penting yang harus mendapatkan perhatian dalam kerangka RPJMD Provinsi Jawa Timur. Kota Mojokerto menghadapi tekanan dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, terutama terkait kebutuhan sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah. Selain itu, upaya ketahanan pangan perlu diarahkan melalui kerja sama antarwilayah dan inovasi distribusi logistik pangan. Di sisi lain, pelestarian budaya lokal Mojokerto—yang memiliki sejarah Kerajaan Majapahit—perlu dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya yang memperkuat identitas sosial dan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Dengan dukungan dari provinsi, Kota Mojokerto dapat menjadi model pembangunan kota kecil yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan.

2.2.11 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto Tahun 2023-2043

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2023-2043, menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Mojokerto adalah mewujudkan ruang kota berdaya saing, mandiri, makmur, sejahtera melalui pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui pengembangan industri, perdagangan jasa, dan pariwisata berkelanjutan yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Mojokerto yaitu:

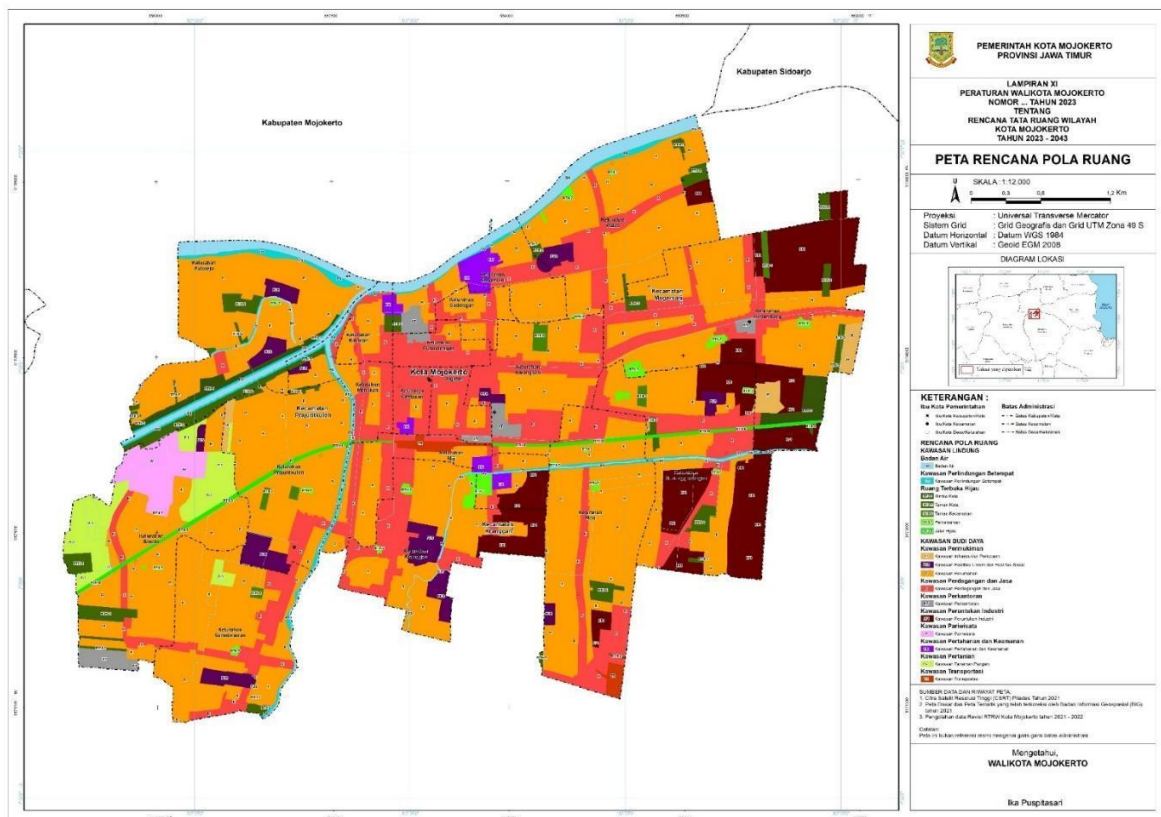




Gambar 2. 4 Peta Struktur Ruang Kota Mojokerto
Sumber: RTRW Kota Mojokerto Tahun 2023-2043



mencangkup berbagai fungsi seperti permukiman, perdagangan, industry, dan ruang terbuka hijau. Pola ini penting untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan serta untuk mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kawasan lindung di Kota Mojokerto terdiri dari badan air, kawasan perlindungan setempat dan RTH. Kawasan lindung di Kota Mojokerto direncanakan seluas 222 Ha atau sebesar 11% dari total luas wilayah Kota Mojokerto. Sementara itu, luas Kawasan budidaya di Kota Mojokerto adalah sebesar 1.825,87 Ha atau sebesar 89% dari total luas wilayah Kota Mojokerto.



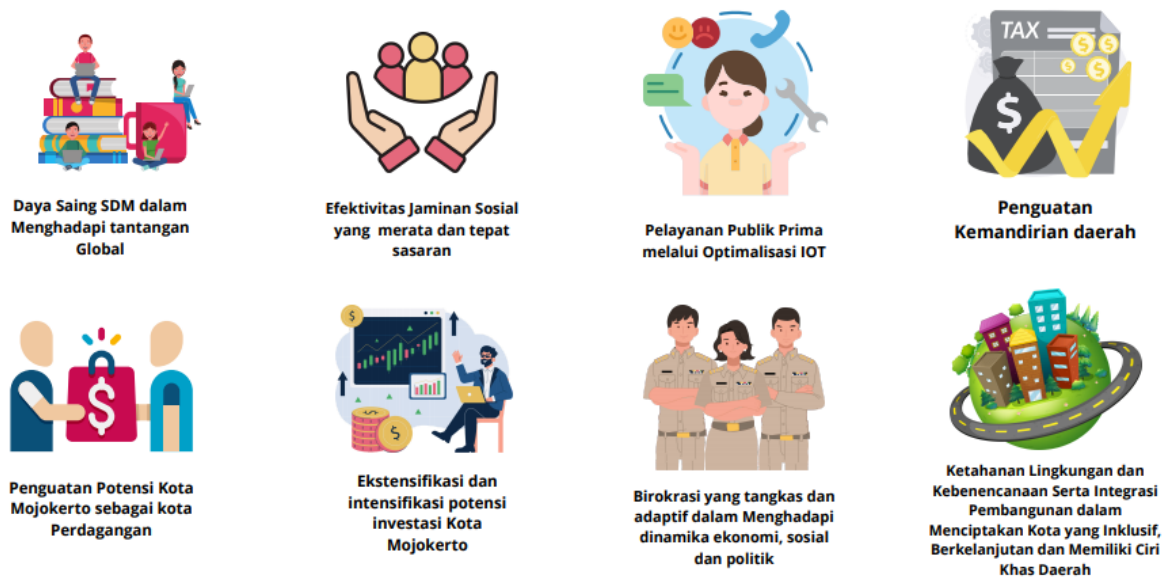
Gambar 2. 5 Peta Pola Ruang Kota Mojokerto
Sumber: RTRW Kota Mojokerto Tahun 2023-2043

2.2.12 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2025-2045

Telaah RPJPD berfokus pada isu strategis, visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok agar menjadi pedoman yang selaras dan terarah. Penentuan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.



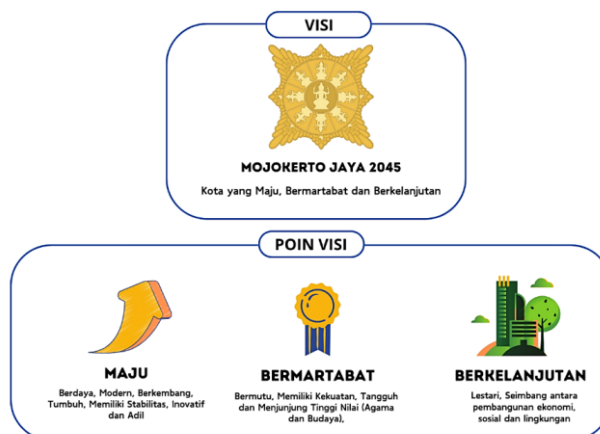
Berikut merupakan isu strategi Kota Mojokerto yang menjadi isu yang menjadi untuk diselesaikan secara bertahap.



Gambar 2. 6 Isu Strategis RPJPD Kota Mojokerto

Sumber: RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2025-2045

Visi Kota Mojokerto Tahun 2025-2045 merupakan gambaran cita-cita luhur bersama sekaligus menjadi identitas daerah Kota Mojokerto. Kata jaya adalah sebuah kata sifat yang berasal dari bahasa Klasik. Kata ini memiliki arti selalu berhasil, sukses, atau hebat. Kata jaya sering digunakan untuk menunjukkan keunggulan, kebesaran, atau kemenangan. Kota Mojokerto memiliki letak yang sangat strategis sehingga dengan potensi yang dimiliki diharapkan mampu berkembang menjadi Kota yang Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan. Visi juga mempertimbangkan linearitas perencanaan baik dalam lingkup provinsi maupun nasional dalam hal ini adalah RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan kekuatan daerah maka visi pembangunan Kota Mojokerto pada Tahun 2025-2045 adalah:



Gambar 2. 7 Visi RPJPD Kota Mojokerto

Penjabaran poin visi diatas perlu dipertegas melalui langkah teknis dan ukuran sehingga dapat diwujudkan secara jelas sehingga ditetapkan 6 sasaran visi sebagai tolok ukur dari keberhasilan pencapaian visi pembangunan yang diharapkan. Lima sasaran visi tersebut adalah perekonomian yang kuat dan progresif, kemiskinan terentaskan dengan ketimpangan yang rendah, Birokrasi yang handal dan terdepan, SDM emas dan bermartabat, solidaritas dan kerukunan masyarakat yang kuat, serta pembangunan berwawasan lingkungan. Berikut penjabaran sasaran visi bersama dengan indikator di dalamnya:



Gambar 2. 8 Sasaran Visi RPJPD Kota Mojokerto

Terdapat 5 misi pembangunan yang merupakan penjabaran arah capaian dan langkah terhadap terwujudnya visi.



Gambar 2. 9 Misi RPJPD Kota Mojokerto

Arah kebijakan menjadi alat ukur secara kualitatif untuk memberikan arahan pada tahapan tertentu sehingga apabila tahapan dilakukan secara komplit akan mencapai akhir periode sesuai dengan target utama yakni pencapaian cita-cita pembangunan, dalam Permendagri 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa arah kebijakan merupakan alat konkret untuk mengarahkan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Ini memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih efektif dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan juga menjadi panduan dalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara bertahap.



Gambar 2. 10 Arah Kebijakan RPJPD Kota Mojokerto

Adapun arah kebijakan RPJP Kota Mojokerto Tahun 2025-2045 terbagi menjadi 4 tahapan yakni periode pertama di Tahun 2025-2029, periode kedua yakni Tahun 2030-2034, periode ketiga Tahun 2035-2039 dan periode keempat yakni Tahun 2040-2045. Arah kebijakan tersebut disusun berdasarkan asas linearitas sehingga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Pada periode pertama Tahun 2025-2029 berfokus penguatan pondasi Pembangunan

Pada Periode pertama RPJPD Kota Mojokerto 2025-2045 berfokus terhadap penguatan pondasi pembangunan. Menciptakan kondisi lingkungan yang baru dalam langkah awal pencapaian visi pembangunan. Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dan peningkatan produk unggulan daerah dalam menciptakan pondasi ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dalam mencetak generasi emas dalam mewujudkan visi pembangunan selama 20 tahun kedepan. Penguatan modal sosial agar pembangunan dapat berjalan sinergis melalui peran aktif seluruh kelompok masyarakat, Penataan dan penyederhanaan regulasi agar mempermudah perizinan serta memperkuat aturan dan penindakan terhadap kegiatan yang menghambat ketercapaian pembangunan daerah. Penguatan integrasi dan pembangunan infrastruktur dasar sehingga dapat menjadi modal percepatan pembangunan.

Arah Kebijakan Misi 1 Transformasi SDM Berkarakter dan Berdaya Saing Global

Tahap pertama 2025-2029, dalam mencapai SDM berkarakter dan berdaya saing adalah dengan menyiapkan pondasi pembangunan yakni melalui pemenuhan layanan dasar. Upaya dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas diantaranya pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana sekolah, pembangunan jaringan dan sistem pendidikan dan perpustakaan yang terintegrasi dan berbasis IOT, Penyediaan sarana praktik dan pelatihan *skill* secara terbuka dan upaya lain yang mampu menciptakan habitasi bagi dunia pendidikan dan pengembangan kompetensi kerja.

Arah Kebijakan Misi 2 Transformasi Sosial Sejahtera dan Berketahanan Budaya

Tahap pertama 2025-2029, merupakan upaya dalam rangka memperkuat regulasi yang berpihak terhadap pembangunan sosial ekonomi yang inklusif serta pemberdayaan terhadap gender dan perlindungan anak. Regulasi menjadi pondasi dalam rangka memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka



mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata memiliki payung hukum yang kuat. Tanpa adanya regulasi maka kebijakan yang dilaksanakan belum memiliki dorongan atau keterikatan sehingga pembangunan yang berjalan tidak akan memperhatikan aspek yang ditekankan. Dalam rangka menuju Mojokerto Jaya dimana masyarakat sejahtera dan berbudaya maka di tahap awal ini pondasi yang ditekankan adalah melalui regulasi yang berpihak terhadap pembangunan sosial ekonomi inklusif dengan memperhatikan masyarakat miskin, golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dimulai dari Balita dan anak-anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, disabilitas, usia lanjut terlantar, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, korban bencana, keluarga rentan dan lain sebagainya. Selain dari aspek regulasi, pendataan secara terintegrasi antara lembaga-lembaga berkaitan juga perlu dilakukan sehingga sasaran kebijakan ini dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Misi 3 Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi

Tahap pertama 2025-2029, arah pembangunan Kota Mojokerto menuju Mojokerto Jaya 2045 melalui transformasi ekonomi berbasis inovasi dilakukan melalui penguatan regulasi terkait dengan kemudahan berusaha, daya tarik investasi serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian daerah. Disisi lain jaringan kerja serta pola kerjasama antar sektor didorong dalam menciptakan hilirisasi sehingga antar sektor usaha saling terhubung dan memberikan keuntungan antara kedua belah pihak. Jaringan kerja juga bertujuan untuk mempercepat proses produksi dimulai dari ketersediaan bahan pokok produk, proses produksi hingga pemasaran dan sampai pada konsumen, jaringan kerja dan pola kerjasama diprioritaskan pada potensi dan peluang usaha pada lingkup wilayah kota sehingga berpotensi menumbuhkan usaha-usaha baru yang dapat mendukung sektor usaha yang telah berdiri dan dapat berjalan dan berkembang secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan Misi 4 Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Pelayanan Publik Prima

Tahap pertama 2025-2029, tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan peran pemangku kepentingan, tata kelembagaan yang tepat dan proporsional, serta pelayanan berbasis digital dan inklusif. Kebijakan publik dalam implementasinya perlu diorientasikan pada tujuan kebijakan itu sendiri sehingga



peran pemangku kepentingan perlu diperkuat dalam memastikan tujuan tersebut tercapai berdasarkan target dan sasaran yang ditetapkan. Kelembagaan menjadi modal utama dalam roda pemerintahan, kelembagaan yang tepat dan proporsional diwujudkan dalam rangka memangkas birokrasi serta kewenangan yang tumpang tindih, serta menjamin efisiensi dan efektivitas. Disisi lain pelayanan pada saat ini telah berkembang melalui penggunaan teknologi dan digitalisasi akan tetapi belum cukup optimal pelayanan masih bersifat hybrid dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara digital baik pada sisi pelayanan itu sendiri maupun dalam tata kelola pemerintahan.

Arah Kebijakan Misi 5 Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan

Tahap pertama 2025-2029, berfokus pada pemenuhan infrastruktur dasar dan serta perencanaan tata ruang berbasis ekologis dimana seluruh komponen biologis (daya dukung dan daya tampung), fisik bangunan, sistem sosial dan ekonomi terhubung secara sinergis dan beriringan. mendorong pembangunan dalam rangka menurunkan kawasan kumuh serta pemenuhan sanitasi yang layak dan aman serta tersedianya jaringan air minum di seluruh wilayah.

2.2.13 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2025–2029

A. Visi

Visi pembangunan daerah Kota Mojokerto untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

”TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKARAKTER, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN.”

Adapun penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Maju

Maju berkaitan erat terhadap pengembangan ekonomi serta pemerataan ekonomi. Selain itu kemajuan bagi Kota Mojokerto maka sangat berkaitan erat terhadap kualitas birokrasi pemerintahannya yang mampu memberikan pelayanan prima dan berdampak bagi seluruh aspek pembangunan. Pemerintahan yang maju mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sehingga mampu memberikan pelayanan yang mudah dan cepat



melalui digitalisasi. Kemajuan Kota Mojokerto juga dapat dilihat pada kemampuan fiskalnya dimana kemandirian fiskal menjadi cita-cita utama bagi seluruh daerah.

2. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing

Kota Mojokerto mampu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdaya saing ini tercermin dalam SDM yang inovatif dan produktif, pelayanan publik, peraturan-peraturan yang dihasilkan serta daya saing pada produk-produk lokal Kota Mojokerto sehingga dapat menciptakan ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Kota Mojokerto akan menjadi kota yang mampu menghadapi tantangan global dan regional serta membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berkarakter

Terwujudnya Kota Mojokerto yang berkarakter menggambarkan kota yang tidak hanya maju secara fisik dan ekonomi, tetapi juga memiliki identitas, nilai-nilai budaya, dan moralitas yang kuat di tengah masyarakatnya. Hal ini dapat menunjukkan Kota Mojokerto memiliki ciri khas dibandingkan dengan daerah lain. Berkarakter tercermin dalam SDM yang berakhlak dan berbudi pekerti, pelestarian seni dan budaya lokal, serta pembangunan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan budaya. Hal ini dapat menjadi pondasi yang penting dalam membangun kota yang harmonis, aman, serta memiliki rasa saling menghormati dan peduli antar sesama.

4. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Sejahtera

Masyarakat Kota Mojokerto melalui proses pembangunan dapat menikmati kehidupan yang layak dan aman. Dalam hal ini dapat berarti kualitas hidup yang baik, terpenuhinya kebutuhan dasar serta adanya pemerataan pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Kehidupan yang layak dan aman yang dituju untuk masyarakat yakni:

- a. Terpenuhi hak untuk sehat dan berpendidikan yang layak;
- b. Memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha; dan



- c. Terpenuhi kebutuhan dasarnya serta mendapatkan rasa aman untuk menjadi bagian dari komunitas yang sehat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga Kota Mojokerto.

5. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berkelanjutan

Pada tujuan kelima yang ingin dicapai yakni terwujudnya Kota Mojokerto yang Berkelanjutan. Arti kata berkelanjutannya sendiri merupakan proses yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan mendatang. Hal ini juga berkaitan dengan pembangunan yang tidak berfokus pada Pembangunan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto tetapi juga seimbang dengan pembangunan sosial, kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup warga Kota Mojokerto ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata serta lingkungan yang asri dan lestari.

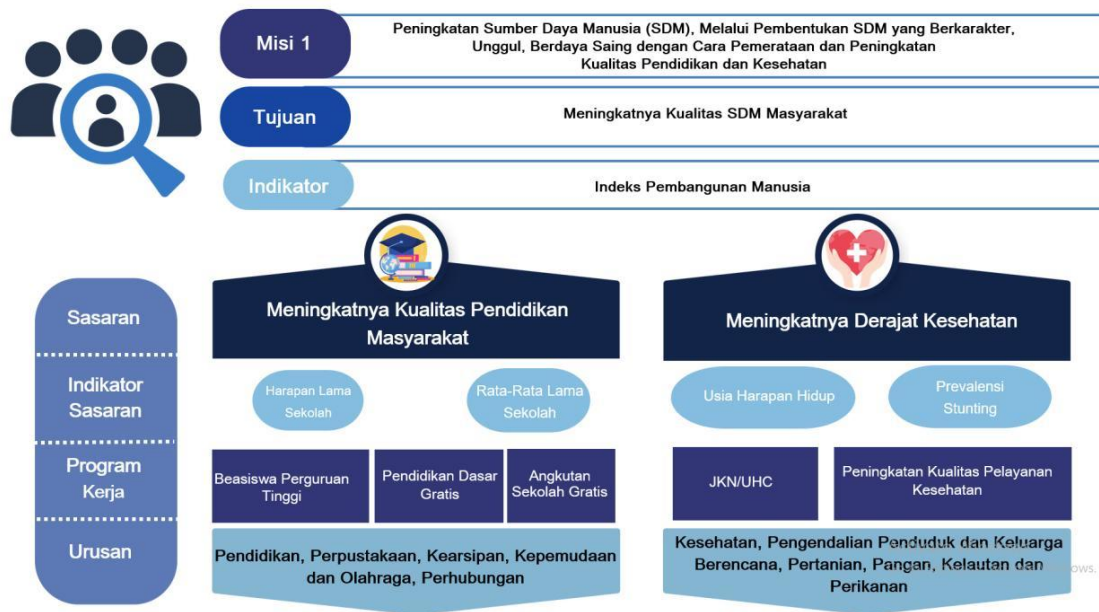
B. Misi

Visi pembangunan perlu diterjemahkan kedalam misi pembangunan selama lima tahun kedepan, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. MISI 1: Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui Pembentukan SDM yang Berkarakter, Unggul, Berdaya Saing dengan Cara Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

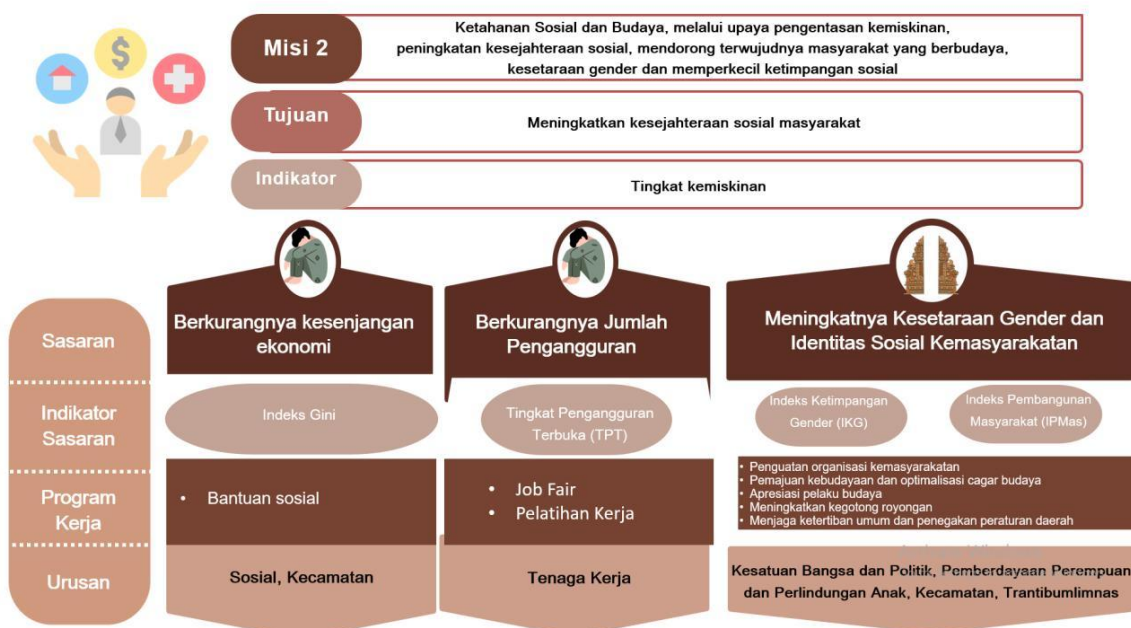
Pembangunan SDM yang berdaya saing global dan berkarakter diprioritaskan dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung dengan peningkatan akhlak dan budi pekerti serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.





Gambar 2. 11 Cascading Tujuan 1-Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat

2. MISI 2: Ketahanan Sosial dan Budaya, melalui Upaya Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Mendorong Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya, Kesenjangan Gender, dan Memperkecil Ketimpangan Sosial
- Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan lingkungan sosial yang berdaya sehingga mampu hidup sejahtera dan memenuhi kebutuhan dasar.



Gambar 2. 12 Cascading Tujuan 2-Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

3. MISI 3: Peningkatan ekonomi, yaitu Produktivitas Ekonomi yang Diarahkan pada Peningkatan Daya Saing, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dan Optimalisasi Sektor Unggulan

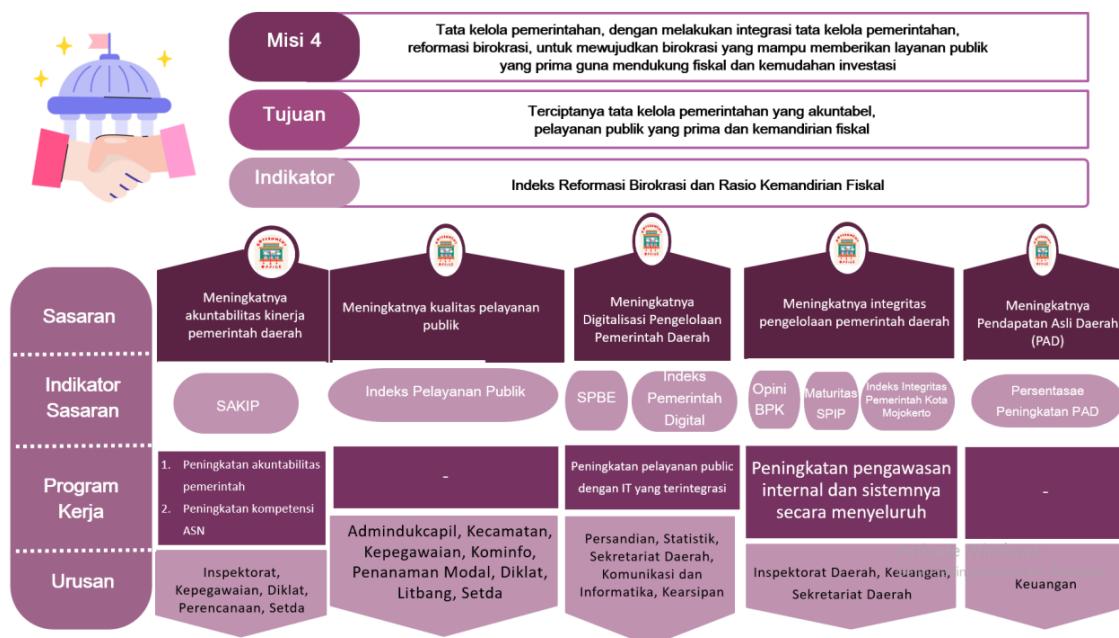
Pembangunan ekonomi di Kota Mojokerto diharapkan menjadi semakin maju dan dampaknya mampu dirasakan oleh masyarakat banyak. Lokomotif perekonomian Kota Mojokerto merupakan sektor potensial yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat namun mengedepankan potensi lokal sebagai motor dan pilar utama perekonomian guna kemandirian ekonomi lokal dan daya saing daerah. Pembangunan ekonomi Kota Mojokerto diprioritaskan pada penguatan sektor perdagangan dan jasa serta sektor pariwisata melalui dukungan pemerataan infrastruktur di segala lini ekonomi yang berpotensi mendorong usaha masyarakat khususnya kelas ekonomi menengah kebawah, penciptaan dorongan pada UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui pemberdayaan Masyarakat dan keterlibatan perempuan.



Gambar 2. 13 Cascading Tujuan 3-Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah

4. MISI 4: Tata Kelola Pemerintahan, dengan Melakukan Integrasi Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, untuk Mewujudkan Birokrasi yang Mampu Memberikan Layanan Publik yang Prima Guna Mendukung Fiskal dan Kemudahan Investasi.

Birokrasi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mereformasi dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat melalui akuntabilitas kinerja, inovasi daerah, profesionalitas ASN, transformasi digital pada layanan publik. Pemerintah Kota Mojokerto berkomitmen kedepan akan lebih efektif dalam menjalankan roda pemerintah dengan mempelajari iklim dimana perubahan amat cepat dan ketidakpastian tinggi, pemerintah yang efektif juga mensyaratkan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi, kemampuan yang membuat institusi pemerintah dapat tetap relevan ketika kondisi berubah.



Gambar 2. 14 Cascading Tujuan 4-Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan

5. MISI 5: Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan, menuju Terciptanya Infrastruktur yang Terintegrasi, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan yang Memiliki Ketahanan Bencana sebagai Pemenuhan Infrastruktur Publik

Pembangunan Kota Mojokerto berusaha untuk mewujudkan kota yang indah dan nyaman dengan terpenuhinya infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat yang berkelanjutan dengan melakukan upaya perencanaan, pengawasan, dan pengendalian tata ruang yang menjamin keberlanjutan sumber daya daerah serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



Gambar 2. 15 Cascading Tujuan 5-Terciptanya Pondasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Tabel 2. 6 Target IPMas dalam Dokumen RPJMD Kota Mojokerto 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Kota Mojokerto yang Maju, Berdaya Saing, Berkarakter, Sejahtera dan Berkelanjutan	Ketahanan Sosial dan Budaya, melalui Upaya Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Mendorong Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya, Kesenjangan Gender, dan Memperkecil Ketimpangan Sosial	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya kesetaraan gender dan identitas sosial kemasyarakatan	Indeks Pembangunan Masyarakat (Angka)	70	71	72	73	74	75



GAMBARAN UMUM

3.1 KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF

Secara astronomis, Kota Mojokerto terletak antara 7° 28' Lintang Selatan dan antara 112° 26' Bujur Timur. Secara administratif, Kota Mojokerto terdiri atas 3 kecamatan dan 18 kelurahan. Kota Mojokerto adalah salah satu kota administratif yang berada di Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 2.048 Ha yang menyandang predikat sebagai kota terkecil di Pulau Jawa. Berdasarkan batas administratif dan posisi geografisnya, Kota Mojokerto memiliki batas dengan Kabupaten Mojokerto.

Batas Utara : Sungai Brantas

Batas Selatan : Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto

Batas Barat : Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto

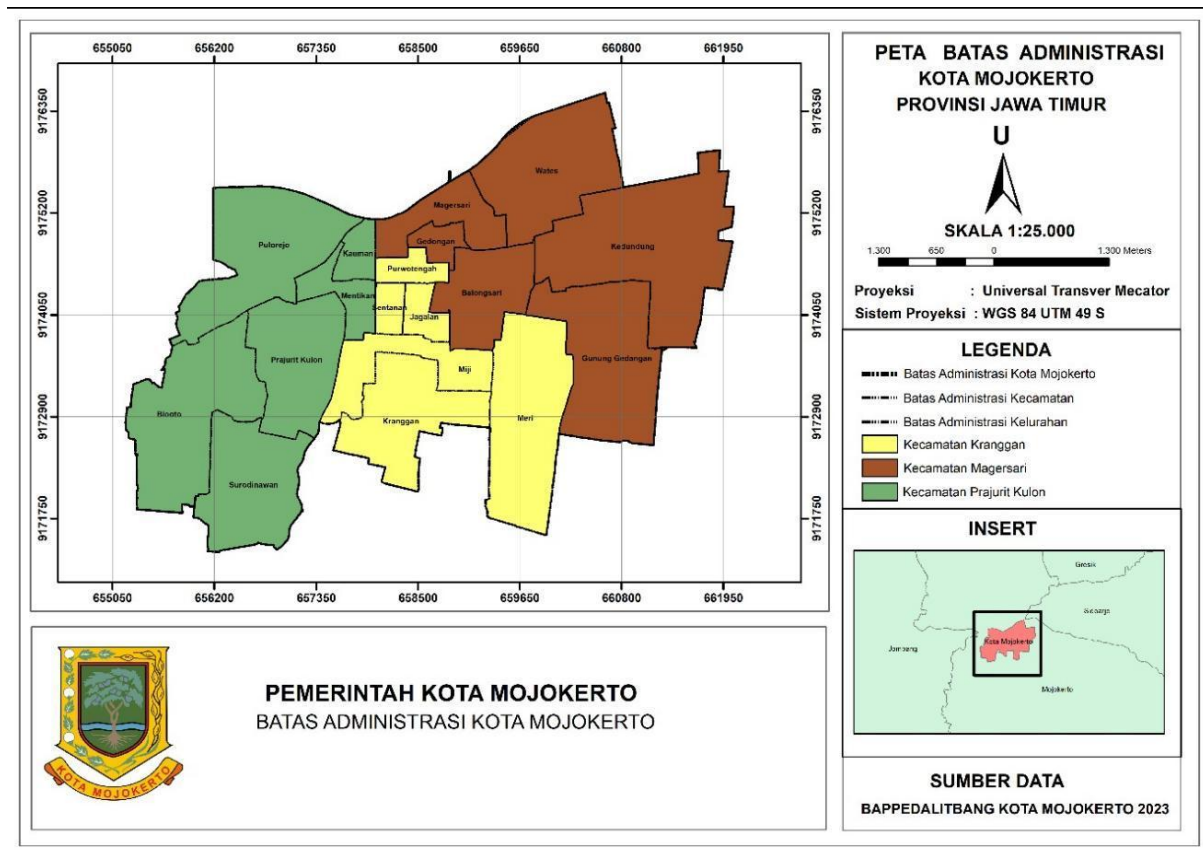
Batas Timur : Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto

Tabel 3. 1 Luas Wilayah dan Nama Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Mojokerto, 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Prajurit Kulon	7,28
	Surodinawan	1,44
	Prajurit Kulon	1,29
	Blooto	1,87
	Mentikan	0,31
	Kauman	0,29
	Pulorejo	1,93
2	Magersari	8,27
	Gunung Gedangan	1,93
	Kedundung	2,71
	Balongsari	1,07

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
	Gedongan	0,20
	Magersari	0,72
	Wates	1,58
3	Kranggan	4,65
	Kranggan	1,41
	Meri	1,78
	Jagalan	0,25
	Miji	0,72
	Sentanan	0,21
	Purwotengah	0,23

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2025



Gambar 3. 1 Peta Batas Administrasi Kota Mojokerto

3.2 KONDISI FISIK DASAR

3.2.1 Iklim

Kota Mojokerto beriklim tropis yang berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson tergolong pada iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Kondisi iklim Kota Mojokerto dipengaruhi oleh kondisi suhu udara, kelembaban, kecepatan angin, tekanan udara, jumlah curah hujan, jumlah hari hujan, dan penyinaran matahari. Kota Mojokerto memiliki 2 jenis perubahan iklim setiap tahunnya, yakni musim kemarau (Mei-September) dan musim hujan (Oktober-April).

3.2.2 Topografi

Secara topografi Kota Mojokerto terbagi ke dalam 3 daerah, yaitu dataran plistosen, alluvial fasies, dan dataran alluvial. Kota Mojokerto memiliki topografi yang relatif datar, menyebabkan aliran sungai atau saluran menjadi lambat, yang kemudian dapat mengakibatkan pendangkalan yang memicu banjir. Wilayah selatan dan utara Kota Mojokerto cenderung memiliki elevasi yang lebih tinggi. Wilayah selatan formasi tanah didominasi oleh bentuk lahan vulkanik yang dipengaruhi oleh keberadaan

Gunung Penanggungan. Wilayah Kota Mojokerto berada pada ketinggian antara 18,75-25 mdpl. Wilayah Kota Mojokerto merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 18,75 mdpl sedangkan sisanya di kisaran 25 mdpl. Kondisi permukaan tanah Kota Mojokerto agak miring ke timur dan utara antara 0-3%.

Kemiringan tanah (kelerengan) merupakan sudut yang dibentuk permukaan tanah dengan bidang horisontal dan dinyatakan dalam persen (%). Berdasarkan besarnya tingkat kemiringan tanah (kelerengan), sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto berada pada kelerengan antara 0-20%. Oleh karena itu, beberapa wilayah Kota Mojokerto dapat digambarkan seperti Lepek (tatakan gelas/cekung) sehingga berpotensi menjadi wilayah genangan ketika terjadi hujan deras dalam jangka waktu yang lama. Peluang untuk mengurangi genangan tersebut adalah dengan dipompa karena posisi ketinggian tanahnya cekung ke bawah sesuai dengan topografi Kota Mojokerto.

3.2.3 Hidrologi

Kota Mojokerto secara keseluruhan masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional. Wilayah Sungai Brantas terdiri dari 4 (empat) DAS yaitu DAS Brantas, DAS Tengah, DAS Ringin Bandulan, DAS Kondang Merak, dan memiliki 9 Sub DAS yaitu Sub DAS Brantas Hulu, Sub DAS Brantas Tengah, Sub DAS Ngrowo/ Ngasinan, Sub DAS Konto, Sub DAS Widas, Sub DAS Brantas Hilir, Sub DAS Kali Tengah, Sub DAS Ringin Bandulan dan Sub DAS Kondang Merak. Kota Mojokerto masuk dalam Sub DAS Brantas Hilir meliputi wilayah sebagian Kelurahan Gunung Gedangan, sebagian Kelurahan Meri, sebagian Kelurahan Miji, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, sebagian Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Wates dan Kelurahan Kedundung.

Kondisi hidrologi Kota Mojokerto sangat dipengaruhi oleh sungai-sungai yang melintasi Kota Mojokerto. Terdapat 7 Sungai yang melintasi Kota Mojokerto yaitu Sungai Brantas, Brangkal, Sadar, Cemporat, Ngrayung, Watu Dakon, dan Sungai Ngotok. Konsekuensi dari wilayah yang dilewati beberapa sungai ini adalah genangan di Kota Mojokerto yang tidak hanya disebabkan oleh frekuensi hujan lokal namun juga hujan yang terjadi di wilayah *upstream* DAS yang ada.



Tabel 3. 2 Panjang Sungai Kota Mojokerto

No	Nama Sungai	Panjang(m)	Karakter
1	Brantas	11088.66	Bertanggul
2	Brangkal	7616.542	Bertanggul
3	Sadar	7860.713	Bertanggul
4	Cemporat	1874.852	Bertanggul
5	Ngrayung	3818.769	Bertanggul
6	Watu Dakon	4211.452	Bertanggul
7	Ngotok / Pulo	4902.914	Bertanggul

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2025

Pola tata air sangat ditentukan oleh besarnya curah hujan, jumlah mata air atau sumber air, dan pola aliran sungai dan bendungan. Jumlah mata air mencapai 161 buah, yang berfungsi sebanyak 153 mata air. Debit air memiliki rata-rata maksimum 19.42 lt/detik dan debit rata-rata minimum 7,60 lt/detik. Dengan mayoritas mata air terletak di wilayah Selatan Kabupaten Mojokerto, hal ini berdampak pada jenis dan panjang saluran irigasi yang digunakan, serta penggunaannya untuk irigasi lahan pertanian. Potensi kuantitas air tanah di wilayah Kota Mojokerto telah dilakukan dalam Studi Potensi Air Bawah Tanah atau dalam Neraca Air Tanah, jumlah air tanah yang masuk meliputi presipitasi dan kembalian penggunaan air sebesar $\pm 359.865.971,892\text{m}^3/\text{tahun}$ sedangkan jumlah air tanah yang hilang meliputi evapotranspirasi, aliran sungai, penggunaan air tanah domestik dan non domestik sebesar $\pm 290.431.808.830\text{m}^3/\text{tahun}$ sehingga terdapat cadangan air tanah yang tersimpan sebesar $\pm 69.434.163.061\text{m}^3/\text{tahun}$

Tabel 3. 3 Potensi Kuantitas Air di Kota Mojokerto

No.	Uraian	Jumlah Kesetimbangan Air (m ³)
1.	Presipitasi	350.836.474.048
2.	Evapotranspirasi	279.868.260.047,166
3.	Limpasan Permukaan	227.975,23
3.	Imbuhan Air Bawah Tanah	70.967.986.025,223
5.	Penggunaan Air (Domestik dan Non Domestik)	10.563.320.808
6.	Cadangan Air yang Tersimpan	69.434.163.061

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2023-2043

3.2.4 Geologi

Jenis tanah di wilayah Kota Mojokerto sebagian besar terdiri dari jenis alluvial seluas $\pm 980,36\text{ Ha}$ ($\pm 59,54\%$) dan jenis gromosol seluas $\pm 666,18\text{ Ha}$ ($\pm 40,46\%$). Jenis tanah di Kota Mojokerto kaya akan mineral mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga cukup baik untuk usaha pertanian. Wilayah Kota Mojokerto memiliki kedalaman tanah efektif yang mencapai minimal 90 cm, memberikan kondisi yang baik bagi perakaran tanaman. Secara umum, tekstur tanah di wilayah ini tergolong sebagai



tekstur halus atau liat, ditandai dengan perbandingan yang seimbang antara pasir, debu, dan tanah liat. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan pertanian. Sehingga yang menjadi prioritas adalah meningkatkan intensifikasi pengolahan tanah dari pertanian umum seiring meningkatnya alih guna lahan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3. 4 Jenis Geologi menurut Kelurahan di Kota Mojokerto

No.	Kelurahan	Jenis Geologi			Jumlah
		Alluvium	Pleistosen, Fasies Sedimen	Alluvium	
1	Kecamatan Prajurit Kulon	294,85	-	328,51	623,36
	Surodinawan	-	-	145,88	145,88
	Prajurit Kulon	11,53	-	108,00	119,53
	Blooto	123,86	-	54,21	178,07
	Mentikan	5,67	-	13,23	18,90
	Kauman	11,44	-	7,19	18,63
	Pulorejo	142,35	-	-	142,35
2	Kecamatan Magersari	431,31	223,40	6,85	661,56
	Gunung Gedangan	104,62	65,83	-	170,45
	Kedundung	71,01	65,83	-	228,58
	Balongsari	82,86	-	-	82,86
	Gedongan	14,55	-	0,13	14,68
	Magersari	26,17	-	6,72	32,89
	Wates	132,10	-	-	132,10
3	Kecamatan Kranggan	254,20	-	107,42	361,62
	Kranggan	51,36	-	61,95	113,31
	Meri	17,74	-	21,86	39,60
	Jagalan	164,84	-	-	164,84
	Miji	13,44	-	3,11	16,55
	Sentanan	-	-	13,85	13,85
	Purwotengah	6,82	-	6,65	13,47
	Kota Mojokerto	980,36	223,40	442,78	1.646,54

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mojokerto, 2025

Kondisi geologi Kota Mojokerto dapat dikatakan tidak memiliki Sumber Daya Alam seperti sumber daya mineral, kecuali sumber daya pasir galian C. Namun, kondisi geografis Kota Mojokerto tidak memungkinkan eksploitasi pasir dari Sungai Brantas karena telah ditetapkan sebagai zona terlarang untuk penambangan akibat tingginya tingkat erosi. Meskipun demikian, Kota Mojokerto memiliki potensi untuk berkembang melalui sektor jasa dan perdagangan berkat daya tariknya sebagai pusat usaha di sekitarnya, mengingat keterbatasan Sumber Daya Alam dan kondisi lahan yang ada.

3.3 KONDISI KEBENCANAAN

Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/ penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin



topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun nonmateri. Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering atau memiliki potensi tinggi untuk mengalami bencana alam. Suatu kawasan dikategorikan rawan bencana jika dalam periode tertentu memiliki kondisi geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang memiliki kemampuan untuk mencegah, meredam, atau mencapai kesiapan menghadapi dampak buruk dari bencana. Penetapan kawasan rawan bencana merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana, yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Berdasarkan dokumen Kawasan Rawan Bencana (KRB) Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, potensi luasan kawasan rawan bencana kelas tinggi di Kota Mojokerto disebabkan oleh tiga bahaya bencana, yaitu bahaya banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrem. Wilayah Kota Mojokerto memiliki risiko bencana banjir yang bervariasi, dengan sebagian besar wilayah memiliki resiko rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang relatif datar, sehingga aliran sungai menjadi relatif lambat dan mempercepat proses pendangkalan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya genangan saat hujan.

Tabel 3. 5 Luas Kawasan Rawan Bencana

No.	Jenis Bencana	Luas Kawasan Rawan Bencana			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	44	759	844	1.647	Tinggi
2	Banjir bandang	47	96	129	272	Tinggi
3	Cuaca ekstrem	0	0	1.647	1.647	Tinggi
4	Gempa bumi	184	1.463	1.647	1.647	Sedang
5	Likuefaksi	0	1.627	1.627	1.647	Sedang
6	Kekeringan	0	1.647	1.627	1.647	Sedang

Sumber: KRB Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Kota Mojokerto menempati posisi pertama di Indonesia sebagai kota dengan indeks bencana cuaca ekstrem yang masuk dalam kelas tinggi, dengan nilai 20,40. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Mojokerto sangat rentan terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem, yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, infrastruktur, dan ekonomi lokal. Cuaca ekstrem dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur. Kota Mojokerto harus fokus pada mitigasi yang lebih kuat, termasuk perencanaan kota yang lebih baik, sistem peringatan dini yang efektif, dan kesiapsiagaan masyarakat.



3.4 KONDISI PENGGUNAAN LAHAN

Berdasarkan penggunaan dan kondisi lahan Kota Mojokerto mengembangkan wilayahnya menjadi: Barat, Timur, dan Tengah. Bagian Barat merupakan wilayah yang berkarakteristik pertanian serta masih bersifat relatif rural. Pengembangan daerah ini berpusat di Kelurahan Prajurit Kulon. Bagian Timur yang berkarakteristik urban, pengembangannya terpusat di Kelurahan Kedundung. Bagian Tengah yang merupakan jantung kota, pengembangannya dipusatkan di Kelurahan Mentikan.

Luas lahan terbangun Kota Mojokerto sebesar 39,36%. Penggunaan lahan terbangun didominasi untuk permukiman yaitu sebesar 704,50 Ha, kemudian perdagangan dan jasa sebesar 102,33 Ha, industri sebesar 69,47 Ha, perkantoran sebesar 31,78 Ha, pertanahan dan keamanan sebesar 15,51 Ha, pariwisata 0,49 Ha dan instalasi lainnya sebesar 0,51 Ha. Sedangkan penggunaan lahan tidak terbangun di Kota Mojokerto cukup mendominasi dengan persentase sebesar 60,67%. Penggunaan lahan tidak terbangun didominasi oleh lahan sawah sebesar 26,79%, kebun sebesar 11,70%, Semak belukar 6,19%, tanah kosong sebesar 3,74%, hutan kota sebesar 0,02%, taman sebesar 1,18%, Taman Pemakaman Umum (TPU) sebesar 1,24%, lapangan sebesar 0,33%, kolam 0,07%, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) sebesar 0,16%, rawa sebesar 0,11%, perikanan 0,07%, jalan seluas 6,4% dan sungai sebesar 2,67%.

Tabel 3. 6 Guna Lahan Tidak Terbangun Kota Mojokerto

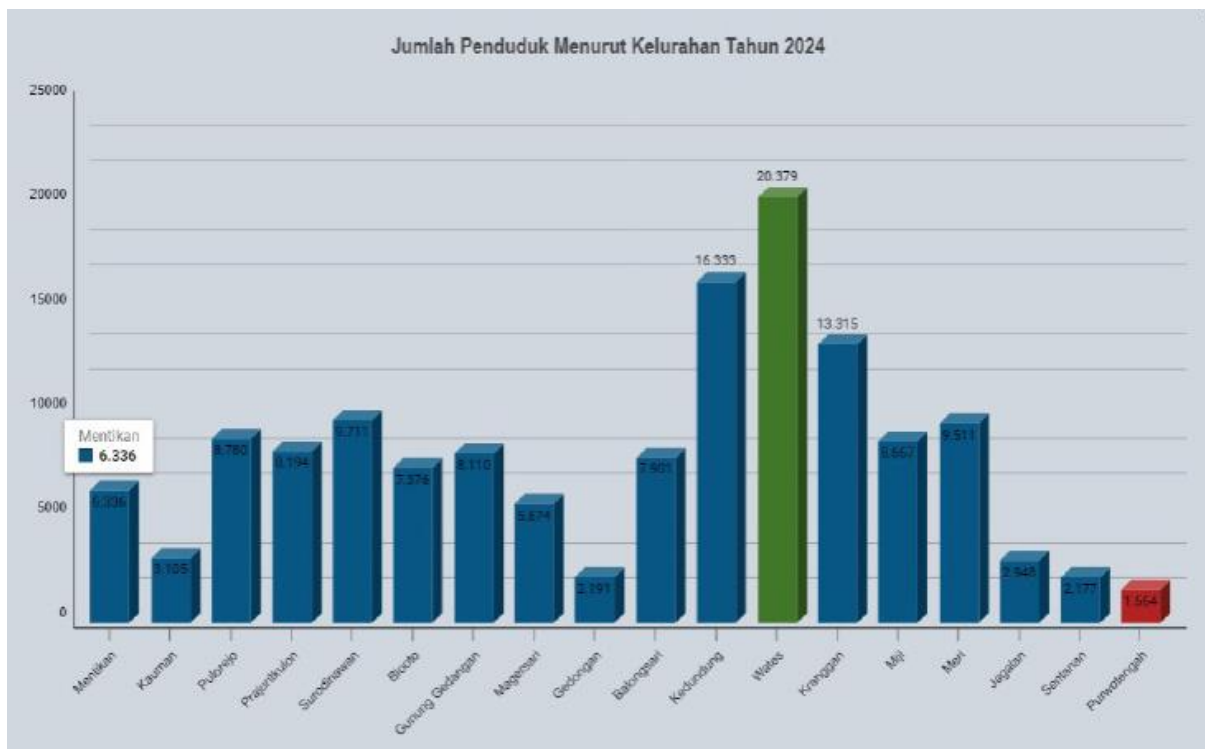
No	Penggunaan Lahan	Luas Total Area (Ha)
1	Industri	68,24
2	Instansi Lainnya	0,52
3	Kebun	32,37
4	Lahan Kosong	174,86
5	Pariwisata	0,49
6	Perikanan	1,77
7	Permukiman	726,72
8	Persampahan	0,20
9	Pertahanan dan Keamanan	15,89
10	Pertanian	680,53
11	Pertanian Lahan Kering	44,54
12	Peruntukan Khusus	4,76
13	Ruang Terbuka Hijau	26,82
14	Sarana Pelayanan Umum	88,26
15	Sarana Perdagangan dan Jasa	99,73
16	Sarana Perkantoran	30,00
17	Sungai	45,60
18	TPA	4,76
Jumlah/Total		2047,88

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2023-2043



3.5 KONDISI DEMOGRAFIS

Demografi mencerminkan kondisi kependudukan suatu wilayah berdasarkan jumlah, struktur atau komposisi berdasarkan gender, persebaran geografis, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti tingkat kelahiran (fertilitas) dan angka kematian (mortalitas). Jumlah Penduduk Kota Mojokerto pada Tahun 2024 mencapai 142.272 jiwa. Berdasarkan kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota Mojokerto tergolong kelas kota sedang. Kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 hingga 500.000 jiwa. Jumlah penduduk di setiap kecamatan dapat berbeda sesuai dengan potensi kegiatan di tempat tersebut. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Magersari, yaitu 60.588 jiwa, diikuti Kecamatan Prajurit Kulon 43.502 jiwa, dan Kecamatan Kranggan 38.182 jiwa.



Gambar 3. 2 Jumlah Penduduk menurut Kelurahan di Kota Mojokerto, 2024

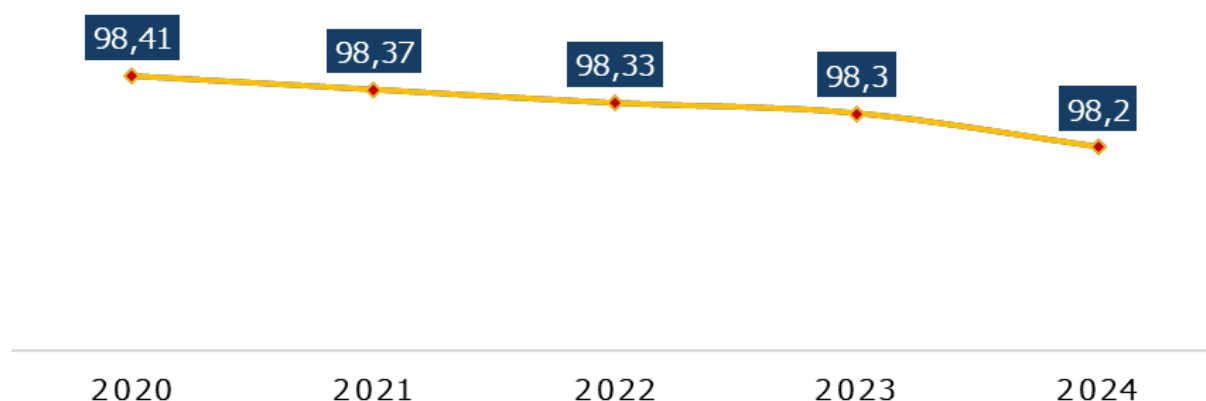
Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2025

Tabel 3. 7 Jumlah Kelahiran dan Kematian menurut Kelurahan di Kota Mojokerto, 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran (jiwa)	Jumlah Kematian (jiwa)
1	Prajurit Kulon	502	333
	Surodinawan	116	62
	Prajurit Kulon	118	77
	Blooto	93	41
	Mentikan	58	62
	Kauman	29	28
	Pulorejo	88	63
2	Magersari	664	547
	Gunung Gedangan	91	69
	Kedundung	197	130
	Balongsari	94	88
	Gedongan	17	27
	Magersari	52	52
	Wates	213	181
3	Kranggan	375	341
	Kranggan	129	119
	Meri	94	71
	Jagalan	26	25
	Miji	90	80
	Sentanan	21	24
	Purwotengah	15	22

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2025

Dari registrasi penduduk akhir tahun, jumlah penduduk Kota Mojokerto terdiri dari 70.490 jiwa laki laki dan 71.295 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin di Kota Mojokerto cenderung mengalami penurunan, namun relatif stabil yang berada di sekitar angka 98,2% hingga 98,41%. Kestabilan rasio jenis kelamin setelah Tahun 2020 menunjukkan keseimbangan yang lebih konsisten antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Mojokerto.



Gambar 3. 3 Rasio Jenis Kelamin Kota Mojokerto

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2025



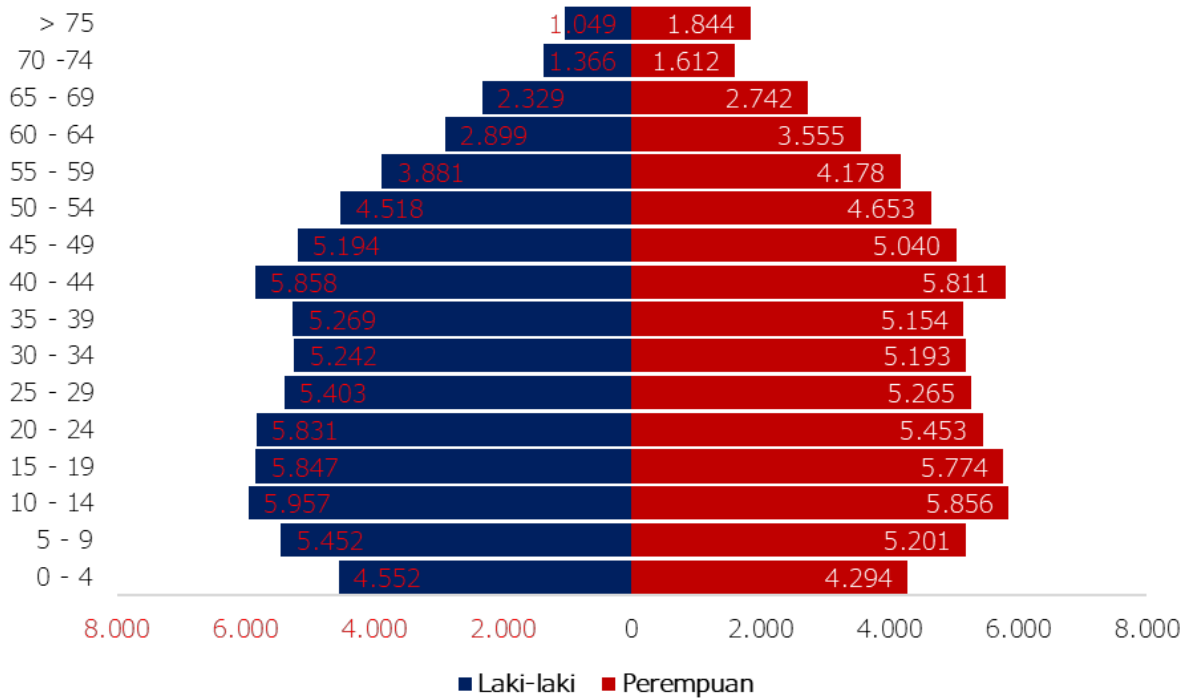
Tabel 3. 8 Penduduk menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kota Mojokerto, 2024

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Prajurit Kulon	21.687	21.815	43.502
	Surodinawan	4.802	4.909	9.711
	Prajurit Kulon	4.169	4.025	8.194
	Blooto	3.704	3.672	7.376
	Mentikan	3.149	3.187	6.336
	Kauman	1.521	1.584	3.105
	Pulorejo	4.342	4.438	8.780
2	Magersari	30.110	30.478	60.588
	Gunung Gedangan	4.123	3.987	8.110
	Kedundung	8.266	8.067	16.333
	Balongsari	3.922	3.979	7.901
	Gedongan	1.086	1.105	2.191
	Magersari	2.779	2.895	5.674
	Wates	9.934	10.445	20.379
3	Kranggan	18.850	19.332	38.182
	Kranggan	6.571	6.744	13.315
	Meri	4.756	4.755	9.511
	Jagalan	1.483	1.465	2.948
	Miji	4.240	4.427	8.667
	Sentanan	1.049	1.128	2.177
	Purwotengah	751	813	1.564

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2025

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat digunakan untuk mengetahui angka ketergantungan di suatu wilayah. Angka ini memiliki peran penting dalam memperkirakan beban yang harus ditanggung oleh penduduk non produktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelompok usia dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Mojokerto Tahun 2024 adalah usia 10-14 tahun, dengan total 11.813 jiwa, sedangkan kelompok usia dengan jumlah penduduk terendah adalah >75 tahun, dengan 2.893 jiwa. Pada akhir Tahun 2024, komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 73.884 jiwa sedangkan penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 42.933 jiwa dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) mencapai 25.455 jiwa.





Gambar 3. 4 Piramida Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2024
Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2025

Berdasarkan piramida penduduk, kelompok usia muda (0-19 tahun) memiliki jumlah yang cukup besar dengan proporsi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan didominasi oleh penduduk laki-laki. Kelompok usia produktif (20-54 tahun) juga menunjukkan jumlah yang besar dan merata, dengan dominasi perempuan pada kelompok usia 50-54 tahun. Pada kelompok usia lanjut (55 tahun ke atas), terjadi penurunan tajam dalam jumlah penduduk, dengan kecenderungan jumlah perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki, terutama pada kelompok usia 70 tahun ke atas.

Struktur piramida penduduk ini mencerminkan bahwa Kota Mojokerto memiliki populasi muda yang besar, yang menunjukkan potensi pertumbuhan populasi di masa depan serta meningkatnya kebutuhan akan fasilitas pendidikan dan kesehatan anak. Kelompok usia produktif yang kuat mengindikasikan potensi produktivitas ekonomi yang tinggi serta kebutuhan akan lapangan kerja dan program pelatihan kejuruan. Sementara itu, dominasi perempuan pada kelompok usia lanjut mencerminkan angka harapan hidup yang lebih tinggi bagi perempuan dan menekankan pentingnya penyediaan layanan kesehatan dan dukungan sosial bagi kelompok usia lanjut. Meskipun jumlah penduduk kelompok usia lanjut lebih kecil dibandingkan kelompok usia lainnya, tren ini menunjukkan adanya proses penuaan populasi yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan fasilitas dan layanan lansia di masa mendatang.



3.6 KONDISI SOSIAL KEMASYARAKATAN

3.6.1 Kesehatan

Donor darah adalah tindakan sukarela menyumbangkan darah untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan atau disimpan sebagai stok darah di bank darah.

Tabel 3. 9 Jumlah Pendoror Darah menurut Bulan di Kota Mojokerto, 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Pendoror Darah
1	Januari	1.374
2	Februari	1.998
3	Maret	1.374
4	April	1.513
5	Mei	1.680
6	Juni	1.539
7	Juli	1.292
8	Agustus	1.410
9	September	1.326
10	Oktober	1.588
11	November	1.451
12	Desember	1.140

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2025

Imunisasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan dalam mulut) dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Imunisasi merupakan salah satu program kegiatan yang dilakukan di POSYANDU. Berikut jumlah POSYANDU menurut kelurahan di Kota Mojokerto Tahun 2024.

Tabel 3. 10 Jumlah POSYANDU menurut Kelurahan di Kota Mojokerto, 2024

No.	Kecamatan	Jumlah POSYANDU
1	Prajurit Kulon	45
	Surodinawan	11
	Prajurit Kulon	9
	Blooto	6
	Mentikan	8
	Kauman	3
	Pulorejo	8
2	Magersari	80
	Gunung Gedangan	10
	Kedundung	16
	Balongsari	14
	Gedongan	4
	Magersari	10
	Wates	26
3	Kranggan	46
	Kranggan	15
	Meri	8
	Jagalan	6
	Miji	10
	Sentanan	4
	Purwotengah	3

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2025



3.6.2 Agama

Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Mojokerto, penduduk Kota Mojokerto mayoritas beragama Islam yaitu berjumlah 131.287 orang, diikuti Kristen Protestan 7.197, Hindu 102, Kristen Katolik 1.814, dan Budha 938. Banyaknya pemeluk suatu agama berbanding lurus dengan banyaknya jumlah tempat peribadatan masing-masing agama di Kota Mojokerto. Berikut merupakan jumlah pemeluk agama dan jumlah tempat peribadatan menurut kelurahan di Kota Mojokerto Tahun 2024.

Tabel 3. 11 Jumlah Pemeluk Agama menurut Kelurahan di Kota Mojokerto, 2024

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Prajurit Kulon	41.427	1.197	223	20	91
	Surodinawan	9.082	312	50	14	9
	Prajurit Kulon	7.882	287	12	3	11
	Blooto	7.168	42	22	-	-
	Mentikan	6.118	309	83	-	-
	Kauman	2.883	102	40	2	70
	Pulorejo	8.294	145	16	1	1
2	Magersari	55.500	3.485	1.040	47	306
	Gunung Gedangan	7.745	306	22	5	3
	Kedundung	4.960	419	200	7	59
	Balongsari	1.731	288	104	1	66
	Gedongan	7.456	294	100	-	58
	Magersari	15.635	479	68	1	6
	Wates	17.973	1.699	546	33	114
3	Kranggan	34.360	2.515	551	35	541
	Kranggan	12.243	788	148	5	73
	Meri	8.165	375	81	12	21
	Jagalan	8.777	499	110	8	18
	Miji	2.585	247	51	8	42
	Sentanan	1.424	413	87	2	259
	Purwotengah	1.166	193	74	-	128

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2025



Tabel 3. 12 Jumlah Tempat Peribadatan menurut Kelurahan di Kota Mojokerto, 2024

No.	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Vihara
1	Prajurit Kulon	28	101	3	-	-
	Surodinawan	12	21	-	-	-
	Prajurit Kulon	4	19	1	-	-
	Blooto	3	26	-	-	-
	Mentikan	3	15	1	-	-
	Kauman	1	5	1	-	-
	Pulorejo	5	15	-	-	-
2	Magersari	45	109	6	-	-
	Gunung Gedangan	6	19	2	-	-
	Kedundung	10	35	1	-	-
	Balongsari	8	16	-	-	-
	Gedongan	1	4	1	-	-
	Magersari	4	10	-	-	-
	Wates	16	25	2	-	-
3	Kranggan	36	68	7	1	1
	Kranggan	15	23	-	-	-
	Meri	9	17	-	-	-
	Jagalan	4	4	1	1	-
	Miji	5	18	-	-	-
	Sentanan	2	4	4	-	-
	Purwotengah	1	2	2	-	1

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2025

3.6.3 Politik

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut **PEMILU** adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Tanggal 14 Februari 2024 diselenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan, pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan pada Tanggal 27 November 2024. Penduduk yang memiliki hak pilih yaitu:

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
4. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;



5. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut merupakan jumlah hak pilih PEMILU presiden dan kepala daerah menurut kelurahan di Kota Mojokerto Tahun 2024.

Tabel 3. 13 Jumlah Hak Pilih Pemilihan Umum menurut Kelurahan di Kota Mojokerto, 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Hak Pilih Presiden	Jumlah Hak Pilih Kepala Daerah
1	Prajurit Kulon	27.803	24.180
	Surodinawan	3.961	3.366
	Prajurit Kulon	2.028	1.653
	Blooto	5.612	5.181
	Mentikan	5.325	4.425
	Kauman	6.063	5.287
	Pulorejo	4.814	4.268
2	Magersari	39.400	33.781
	Gunung Gedangan	5.313	4.568
	Kedundung	3.533	3.012
	Balongsari	1.473	1.204
	Gedongan	5.118	4.527
	Magersari	10.612	9.266
	Wates	13.351	11.204
3	Kranggan	25.809	21.887
	Kranggan	8.761	7.762
	Meri	5.609	4.984
	Jagalan	6.109	5.304
	Miji	1.979	1.674
	Sentanan	1.421	1.127
	Purwotengah	1.930	1.036

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2025





PENDEKATAN DAN METODOLOGI

4.1 PENDEKATAN PENYUSUNAN

Pendekatan penyusunan adalah acuan dalam pertimbangan melakukan proses kajian membuat dokumen Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto. Terdapat tiga pendekatan dalam menyusun dokumen diantaranya adalah pendekatan *top-down planning and bottom-up planning*, pendekatan perencanaan, serta pendekatan pemanfaatan dan pengendalian. Berikut merupakan pemaparan penjelasan dari masing-masing pendekatan penyusunan.

4.1.1 Pendekatan *Top-down Planning and Bottom-up Planning*

Penyusunan dokumen menggunakan pendekatan keterpaduan perencanaan dari bawah dan atas yaitu dari atas ke bawah (*top-down planning*) dan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*). *Bottom-up planning* bersumber dari kebijakan pemerintah atau instansi yang lebih tinggi yaitu Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Mojokerto serta *top-down planning* bersumber dari penyerapan aspirasi masyarakat di lapangan melalui wawancara atau kuesioner.

4.1.2 Pendekatan Perencanaan

Pendekatan pelaksanaan pekerjaan merupakan acuan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan proses kajian dalam studi. Selain itu, pendekatan perencanaan merupakan sudut pandang organisasi dalam menyusun rencana. Tujuan dari pendekatan adalah untuk penyerapan data dan informasi yang diperlukan saat



menyusun rencana. Perencanaan tidak dapat disusun apabila tidak ada data dan informasi yang berkaitan dengan hal yang akan disusun.

4.1.3 Pendekatan Pemanfaatan dan Pengendalian

Pendekatan pemanfaatan dan pengendalian adalah acuan yang digunakan dalam menyusun dokumen. Pemanfaatan berupa kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu. Pengendalian adalah proses pengaturan di berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana yang sudah dibuat. Dapat disimpulkan perlunya pendekatan pemanfaatan dan pengendalian agar kegiatan dan proses yang akan dilakukan menjadi bermanfaat serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan rencana.

4.2 KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual disusun dengan dasar penilaian bahwa pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto sangat berkaitan erat dengan OPD yang ada di Kota Mojokerto. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengukuran berjalan dengan kompleks, sehingga harus terstruktur, sistematis, dan valid. Kerangka konseptual merupakan gambaran terkait alur pemikiran dalam menjawab tujuan pelaksanaan survey IPMas Kota Mojokerto.

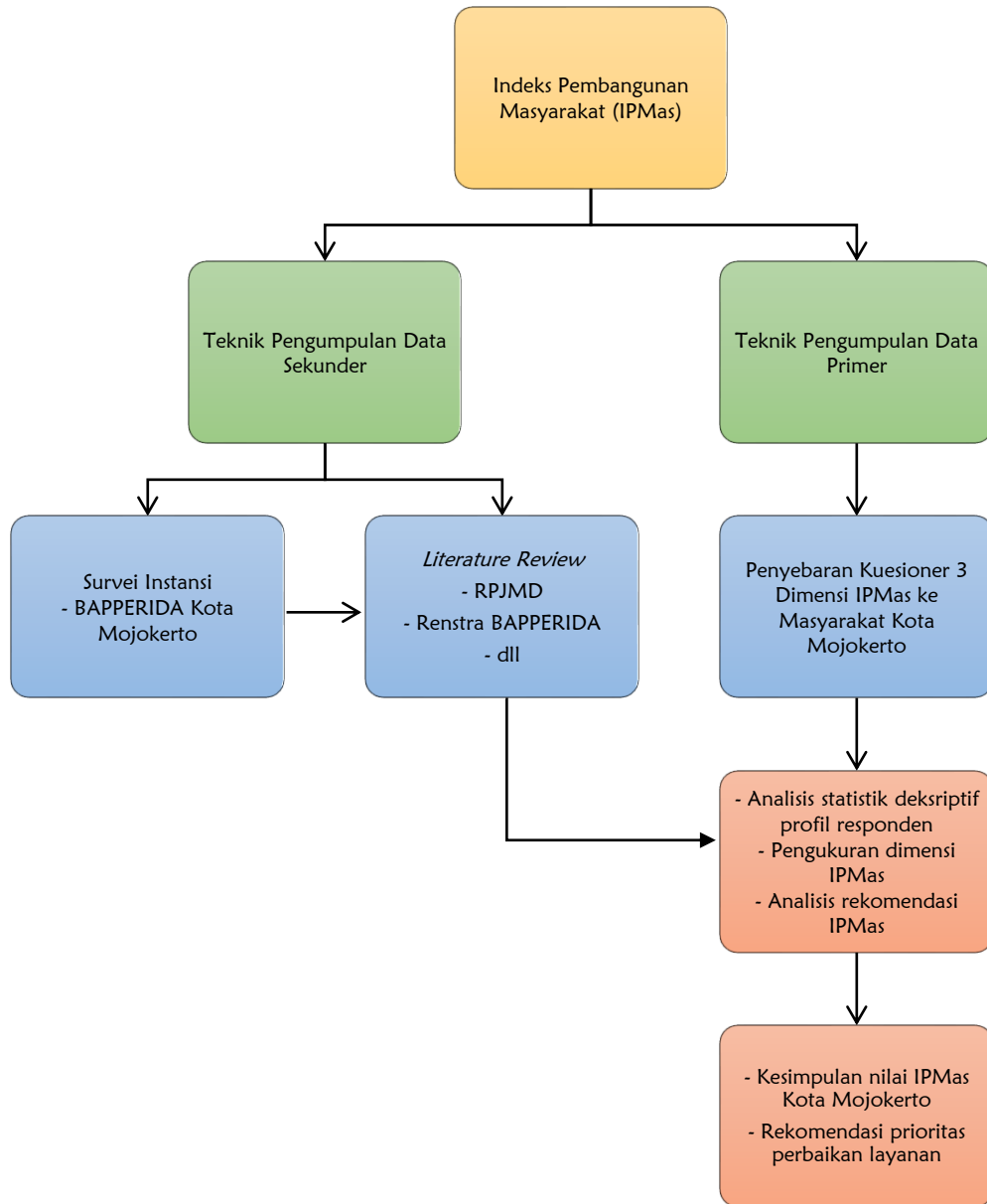
Merujuk pada kerangka konseptual, dalam melaksanakan pengukuran IPMas, digunakan baik data primer maupun data sekunder. Kedua jenis data digunakan karena dapat mengurai secara komprehensif.

Setelah data sekunder dari survei ke instansi didapatkan, dilakukan *literature review* dengan harapan dapat dihasilkan gambaran dimensi IPMas yang representatif. *Literature review* dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi dan layanan/ program oleh setiap OPD Pemerintah Kota Mojokerto. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya yaitu RPJMD Kota Mojokerto, Renstra BAPPERIDA Kota Mojokerto, dan dokumen lain terkait pengembangan masyarakat.

Setelah hasil rekapitulasi kuesioner didapatkan, dilakukan perhitungan nilai IPMas merujuk pada konsep dari BAPPENAS dan BPS. Pada kondisi pelaksanaan penelitian yang kompleks, hal yang sangat *urgent* untuk diperhatikan adalah penentuan



responden yang representatif dan instrumen survei yang cermat, sehingga skor IPMas yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.



Gambar 4. 1 Kerangka Konseptual

4.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data adalah sekumpulan informasi atau angka hasil pencatatan atas suatu kejadian atau sekumpulan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian (Martono, 2016). Pengumpulan data dalam suatu penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi terkait kondisi eksisting yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Tanujaya, 2017). Teknik atau cara



pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

4.3.1 Pengumpulan Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama atau narasumber (Sarwono, 2012). Bentuk dari data primer berupa verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku informan (Arikunto, 2013). Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap kondisi yang terjadi di lapangan, dengan mencari informasi faktual serta mengidentifikasi masalah. Berdasarkan caranya, maka teknik pengumpulan data primer dalam penelitian dilakukan dengan metode observasi/ pengamatan, kuesioner, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data primer maka dilakukan survei primer untuk mengetahui kondisi eksisting wilayah studi. Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data primer adalah sebagai berikut:

A. Observasi

Observasi lapangan adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati objek secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu atau suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah, 2015). Pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Metode observasi dilakukan dengan mengamati langsung obyek studi untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat mengenai kondisi eksisting obyek studi. Metode observasi juga digunakan untuk menyelaraskan antara informasi yang diperoleh dari survei sekunder dengan kondisi di lapangan. Metode observasi dilakukan untuk mengamati potensi dan permasalahan di wilayah studi penelitian.

B. Dokumentasi

Sugiono (2015) menyatakan dokumentasi adalah cara pengumpulan data guna mendukung atau memperkuat informasi yang diperoleh dalam bentuk buku, arsip, dokumen, atau angka dan gambar berupa laporan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memperjelas gambaran faktual kondisi eksisting di wilayah studi, sehingga mengoptimalkan hasil penelitian. Dokumentasi wilayah studi ditampilkan dalam bentuk *photo mapping* yang dapat memberikan gambaran mengenai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas).



C. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara 2 orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali & mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu (Herdiansyah, 2015). Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam jawaban kuesioner dari responden.

D. Kuesioner

Kuesioner adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan/ pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna (Widoyoko, 2016). Responden dalam penelitian merupakan masyarakat. Berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam kuesioner, maka teknik yang dipergunakan dalam penelitian adalah kuesioner semi terbuka dimana pertanyaan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapat menurut pilihan jawaban yang telah disediakan (Hasan, 2002). Penyebaran kuesioner dilakukan dengan teknik pendampingan dimana surveyor mendampingi dan menunggu responden untuk mengisi kuesioner tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya salah persepsi dari responden, dan apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimengerti, maka responden dapat langsung menanyakannya kepada surveyor.

4.3.2 Pengumpulan Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, dokumen juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga tersedia saat diperlukan (Sarwono, 2012). Metode pengumpulan data sekunder merupakan proses pengumpulan informasi atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan berhubungan dengan penelitian (Widianingsih & Hakim, 2020). Metode pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui studi literatur yang berhubungan dengan pembahasan dan survei ke instansi-instansi terkait.

A. *Literatur Review*

Literature review adalah pengumpulan data sekunder dengan menelaah terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan dan sebagai acuan dalam membandingkan teori dan praktiknya di lapangan. Adapun fungsi *literature review* antara lain sebagai berikut (Hasan, 2002):



1. Untuk mempertajam permasalahan, artinya dengan adanya studi kepustakaan, maka permasalahan yang dikemukakan akan semakin jelas arah dan bentuknya;
2. Untuk mencari dukungan fakta, informasi, atau teori-teori dalam menentukan landasan teori atau kerangka teori dalam penelitian; dan
3. Untuk memperlancar penyelesaian penelitian.

B. Survei Instansi

Survei instansi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui instansi pemerintah terkait dengan studi penelitian. Data-data tersebut dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan dengan kondisi eksisting di wilayah studi.

4.4 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian peneliti (Walpole, 1992). Populasi yang digunakan adalah seluruh penduduk Kota Mojokerto Tahun 2025 yang berjumlah 142.272 jiwa (BPS Kota Mojokerto, 2025) yang tersebar di tiga kecamatan. Populasi tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan kriteria responden, sampel, dan sebaran responden. Penelitian yang dilakukan tidak memungkinkan untuk mengambil data seluruh populasi, sehingga penelitian menggunakan sampel untuk dapat mewakili populasi yang ada. Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang dapat diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci (Sujarweni, 2015).

Error yang timbul dalam suatu survei secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu *sampling error* dan *non sampling error*. *Sampling error* adalah error yang timbul karena kita tidak mengambil seluruh anggota populasi, melainkan hanya sampel saja. Sedangkan, *non sampling error* adalah error yang bersumber bukan karena faktor sampel, misalnya karena kesalahan alat ukur, kesalahan wawancara, non respons, kesalahan entri data, dll. Agar data yang diperoleh dalam survei akurat dalam melakukan inferensi terhadap populasi, maka error yang dihasilkan diharapkan sekecil mungkin. Metode sampling yang tepat dan sampel yang besar digunakan untuk meminimalisir *sampling error*.

Formula yang digunakan dalam menentukan banyaknya sampel yaitu rumus *Maximum Margin of Error (MoE)*.

$$MoE = Z \cdot Se = Z \cdot \frac{\sqrt{P(1-P)}}{n} = Z \cdot \frac{\sqrt{P(1-P)}}{\sqrt{n}}$$



Untuk z dengan tingkat kepercayaan 95% dan $p = 0,5$, maka

$$MoE = \frac{\sqrt{0,98}}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{n}}$$

$$N = \left(\frac{1}{MoE}\right)^2$$

Sehingga, untuk memperoleh $MoE = 4,7\%$ jumlah sampel yang akan diteliti sebesar 200 responden. Unit analisis penelitian adalah kelurahan sehingga responden akan didistribusikan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk pada tiap kelurahan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling* dengan *purposive sampling*. Teknik *non probability sampling* yaitu teknik sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Martono, 2016). Teknik *purposive sampling* yaitu teknik sampling didasarkan atas tujuan tertentu dengan kriteria telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2012). Kriteria dalam menentukan responden yaitu responden dengan usia diatas 17 tahun dan memiliki kedudukan penting dalam masyarakat seperti Ketua RW, Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk kader.

Tabel 4. 1 Persebaran Sampel

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Responden
1	Prajurit Kulon	Surodinawan	9.711	14
		Prajurit Kulon	8.194	12
		Blooto	7.376	10
		Mentikan	6.336	9
		Kauman	3.105	4
		Pulorejo	8.780	12
2	Magersari	Gunung Gedangan	8.110	11
		Kedundung	16.333	23
		Balongsari	7.901	11
		Gedongan	2.191	3
		Magersari	5.674	8
		Wates	20.379	29
3	Kranggan	Kranggan	13.315	19
		Meri	9.511	13
		Jagalan	2.948	4
		Miji	8.667	12
		Sentanan	2.177	3
		Purwotengah	1.564	2
Total			142.272	200



4.5 METODE ANALISIS

4.5.1 Analisis Statistik Deskriptif Profil Responden

Analisis statistik deskriptif merupakan proses analisis statistik yang fokus pada manajemen, penyajian, dan klasifikasi data. Dengan analisis statistik deskriptif, data yang disajikan akan menjadi lebih menarik, dan lebih mudah dipahami, serta mampu memberikan makna lebih bagi pembaca. Analisis terdiri dari meringkas data dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Ringkasan data terdiri dari ukuran pemusatan data seperti rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, serta ukuran penyebaran data seperti jarak dan ragam. Penyajian data dapat berupa grafik batang, grafik garis, atau *pie chart* disesuaikan dengan kebutuhan output analisis dan jenis data. Data yang dimaksud adalah data profil responden survey pengukuran IPMas Kota Mojokerto. Profil responden yang akan disajikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, suku, agama, dan pengeluaran rumah tangga.

4.5.2 Analisis Pengukuran Dimensi IPMas

Pengukuran dimensi IPMas dimulai dengan proses penentuan bobot pada setiap indikator, sub-dimensi, dan dimensi penyusun IPMas. Penentuan bobot menggunakan konsep dan pendekatan yang bersifat objektif. Bobot ditentukan berdasarkan metode statistik analisis faktor. Bobot yang diperoleh menggunakan analisis faktor menjadi faktor pengali untuk setiap skor jawaban pertanyaan indikator. Selanjutnya analisis faktor kembali digunakan untuk menghitung bobot setiap sub dimensi dan dimensi untuk kemudian diagregasikan menjadi nilai IPMas.

Adapun formulasi yang digunakan untuk menghitung skor pada setiap dimensi, sub-dimensi, dan kumulatif IPMas adalah sebagai berikut.

1. Formula skor variabel

Skor variabel diperoleh dari rata-rata seluruh pertanyaan yang menyusun seluruh indikator di dalam variabel tersebut.

$$X_x = \bar{I}_x \text{ dimana } x = 1,2,3,4$$

$$Y_y = \bar{I}_y \text{ dimana } y = 1,2,3,4$$

$$Z_z = \bar{I}_z \text{ dimana } z = 1,2,3,4$$

2. Formula skor dimensi

Skor dimensi diperoleh dari rata-rata terboboti sub-dimensi penyusunnya. Bobot setiap sub-dimensi diperoleh dari analisis faktor.



$$\text{Skor Dimensi X} = R1 = \frac{\sum_{x=1}^4 (WxXx)}{\sum_{x=1}^4 (Wx)}$$

$$\text{Skor Dimensi Y} = R2 = \frac{\sum_{y=1}^4 (WyYy)}{\sum_{y=1}^4 (Wy)}$$

$$\text{Skor Dimensi Z} = R3 = \frac{\sum_{z=1}^4 (WzXz)}{\sum_{z=1}^4 (Wz)}$$

3. Formula skor IPMas

Skor IPMas merupakan rata-rata geometri dari ketiga skor dimensi penyusunnya. Nilai IPMas berkisar antara 0-100. IPMas menunjukkan capaian indikator kuantitatif yang mengukur sosial kemasyarakatan yang memotret dimensi kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil. Semakin tinggi skor IPMas, maka semakin baik pembangunan sosial kemasyarakatan ditinjau dari dimensi kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil.

$$\text{IPMas} = \sqrt[3]{R1 \times R2 \times R3}$$

Tabel 4. 2 Unsur Penilaian dalam Pengukuran IPMas

Dimensi	Sub-dimensi	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Kohesi Sosial	Kerjasama Sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial	Persentase rumah tangga menurut keikutsertaan dalam kegiatan sosial untuk membantu warga yang mengalami musibah	<ul style="list-style-type: none"> – Memandikan jenazah – Mengubur jenazah – Melayat jenazah – Menggalang donasi – Menjenguk tetangga sakit – Membantu tetangga yang membutuhkan – Donor darah – Membantu tetangga yang kebakaran
				<ul style="list-style-type: none"> – Organisasi keagamaan – Organisasi politik – Organisasi pendidikan – Organisasi lingkungan hidup – Organisasi ekonomi – Organisasi sosial – Organisasi olahraga
	Jejaring Sosial	Partisipasi dalam kegiatan kelompok	Persentase rumah tangga menurut banyaknya organisasi yang diikuti (yang mempunyai pengurus)	<ul style="list-style-type: none"> – Pengajian – Perayaan keagamaan – Haul – Halal bihalal – Tahlilan pekanan
			Persentase rumah tangga menurut keikutsertaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> – Olahraga – Kesenian – Arisan – Rapat warga – Kegiatan keterampilan – Posyandu



Dimensi	Sub-dimensi	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
				– Vaksinasi
	Aksi kolektif	Partisipasi dalam kegiatan umum	Persentase rumah tangga menurut keikutsertaan dalam kegiatan bersama untuk kepentingan warga	– Kerjabakti – Siskamling – Penyuluhan – Peringatan hari kemerdekaan – Khitan massal
	Kepercayaan sosial	Sikap percaya terhadap lingkungan	Persentase rumah tangga menurut kepercayaan menitipkan kepada tetangga	– Menitipkan rumah kepada tetangga – Menitipkan anak (usia 0-12 tahun) kepada tetangga
			Persentase rumah tangga menurut kepercayaan terhadap tokoh masyarakat dalam membantu mengatasi masalah warga	– Aparatur pemerintah kelurahan menjalankan tugas dengan baik – Tokoh masyarakat membantu mengatasi masalah warga – Tokoh agama berperan sebagai panutan/ penuntun moral
			Persentase rumah tangga menurut kepercayaan terhadap polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat	
			Persentase rumah tangga menurut kesamaan suku dalam memilih kepala daerah	
Inklusi sosial	Penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya	Tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan agama/ etnis lain	Persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan keagamaan dan suku lain di sekitar lingkungan tempat tinggal	– Kegiatan suku lain di lingkungan – Kegiatan agama lain di lingkungan – Berteman dengan suku lain – Berteman dengan agama lain – Ketersediaan dan kelayakan tempat ibadah – Pembangunan tempat ibadah agama lain – Perlindungan dan pembebasan kegiatan ibadah
	Inklusi terhadap minoritas	Tanggapan terhadap pimpinan daerah dari suku/ etnis lain		– Pemimpin dari suku berbeda – Pemimpin dari agama berbeda
	Dukungan sosial bagi minoritas	Hambatan dalam mengakses fasilitas umum		– Ketersediaan dan kelayakan tempat ibadah – Pembangunan tempat ibadah agama lain – Perlindungan dan pembebasan kegiatan ibadah – Pembatasan, ancaman dan penggunaan kekerasan ketika menjalankan ibadah yang mengatasnamakan agama lain



Dimensi	Sub-dimensi	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
			<ul style="list-style-type: none"> – Pelarangan kegiatan agama – Kegiatan kemanusiaan tingkat nasional dalam 3 bulan terakhir – Diskriminasi berdasarkan ras – Diskriminasi kelompok rentan – Perundungan 	
	Kesetaraan gender	Kesetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan	Kesetaraan gender, ras, suku, dan kelompok rentan	
Pengembangan kapasitas masyarakat sipil	Kesadaran hukum dan politik	Kepemilikan identitas dasar	Persentase anak usia 0-17 tahun yang mempunyai akta kelahiran	
		Partisipasi dalam Pemilu Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> – PEMILU legislatif DPRD Kota – PEMILU legislatif DPRD Provinsi – PEMILU legislatif DPD – PEMILU legislatif DPR RI – PEMILU Walikota dan Wakil Walikota – PEMILU Gubernur – PEMILU Presiden dan Wakil Presiden 	
	Organisasi masyarakat sipil	Keberadaan LSM yang terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat		
		Keanggotaan dalam Organisasi Massa (ORMAS) dan partai politik	<ul style="list-style-type: none"> – Persentase penduduk yang menjadi anggota ORMAS yang mempunyai AD/ ART 	<ul style="list-style-type: none"> – HIPMI – NU – Muhammadiyah – Aisiyah – Serikat Buruh/ Serikat Kerja/ Tani – HMI – Banser – Ansor – Fatayat/ Muslimat – Pemuda Pancasila
				Partai Politik
	Mitigasi risiko sosial	Ketersediaan fasilitas/ upaya antisipasi/ mitigasi bencana alam	<ul style="list-style-type: none"> – Trauma akibat bencana alam – Sistem peringatan dini bencana alam – Perlengkapan keselamatan bencana – Jalur evakuasi/ mitigasi bencana alam 	
		Partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana alam	Persentase penduduk yang pernah mengikuti pelatihan terhadap penyelamatan bencana alam dalam tiga tahun terakhir	
	Penyelesaian sengketa	Keterlibatan lembaga penegak hukum/ tokoh sebagai penengah dalam kekerasan massa	<ul style="list-style-type: none"> – Pelanggaran lalu lintas – Sengketa tanah/ rumah – Sengketa hutang/ piutang – Perceraian – Sengketa ganti rugi – Sengketa waris – Kekerasan Dalam Rumah Tangga – Sengketa buruh/ kepegawaian – Pencurian – Perkelahian – Penipuan – Pelecehan – Narkoba 	



4.5.3 Analisis Rekomendasi IPMas

A. Analisis Akar Masalah

Analisis akar masalah bertujuan untuk mengetahui permasalahan kondisi eksisting yang terdapat di wilayah perencanaan. Adapun manfaat analisis akar masalah antara lain:

1. Untuk mengetahui secara jelas potensi dan masalah terkait dikaitkan dengan lokasi secara spasial Kota, Kecamatan maupun Kelurahan;
2. Untuk memudahkan para perencana melihat dimana potensi dan masalah tersebut berada sebagai bahan masukan dalam merencanakan pengembangan wilayah tersebut; dan
3. Untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan perencanaan di suatu wilayah.

Langkah pembuatan analisis akar masalah adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi terlebih dahulu masalah utama yang akan dipecahkan;
2. Mengidentifikasi penyebab timbulnya permasalahan;
3. Mengelompokkan sebab-sebab permasalahan;
4. Menentukan tujuan dan jalan keluar permasalahan;
5. Membuat skala prioritas terhadap permasalahan yang paling mendesak;
6. Membuat prioritas terhadap jalan keluar yang paling efektif, mudah, dan realistis; serta
7. Menyusun rencana kegiatan dengan memperhatikan 5W-1H.

Untuk menganalisis akar masalah terdapat beberapa model analisis yang biasanya sering digunakan, namun pada penyusunan dokumen Penyusunan IPMas Kota Mojokerto menggunakan model *Fish Bone*. Analisa tulang ikan adalah metode yang dipakai untuk mendapatkan penyebab pokok terhadap masalah-masalah. Teknik ini memberikan kesempatan untuk mengategorikan berbagai sebab dasar dari satu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang mudah dimengerti dan rapi.

B. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi dimensi IPMas Kota Mojokerto, yaitu untuk melihat *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (kesempatan) dan *Threaten* (ancaman), dan menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam strategi IPMas yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan



dalam pengembangan selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Potensi (*Strength*)

Kekuatan apa yang dapat dikembangkan agar lebih tangguh, sehingga dapat bertahan di pasaran, yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri.

2. Masalah (*Weakness*)

Segala faktor yang merupakan masalah atau kendala yang datang dari dalam wilayah atau obyek itu sendiri.

3. Peluang (*Opportunities*)

Kesempatan yang berasal dari luar wilayah studi. Kesempatan tersebut diberikan sebagai akibat dari pemerintah, peraturan atau kondisi ekonomi secara global.

4. Ancaman (*Threaten*)

Merupakan hal yang dapat mendatangkan kerugian yang berasal dari luar wilayah atau obyek.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui strategi dasar pemecahan masalah yang dapat diterapkan secara kualitatif. Adapun cara pemberian strategi yang dilakukan yaitu:

1. SO

Strategi atau alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk meraih peluang (O).

2. ST

Strategi atau alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk mengantisipasi ancaman (T) dan berusaha menjadikan maksimal menjadi peluang (O).

3. WO

Strategi atau alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk meraih peluang (O).

4. WT

Strategi atau alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari secara lebih baik dari ancaman (T).





Gambar 4. 2 Matriks Analisis SWOT



HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 PROFIL RESPONDEN

Profil responden adalah deskripsi tentang ciri-ciri atau atribut individu yang menjadi subjek penelitian. Profil responden berdasarkan hasil survei kuesioner yang telah dilakukan mulai 20 November 2025. Berikut penjelasan masing-masing profil berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, suku, agama, dan pengeluaran.

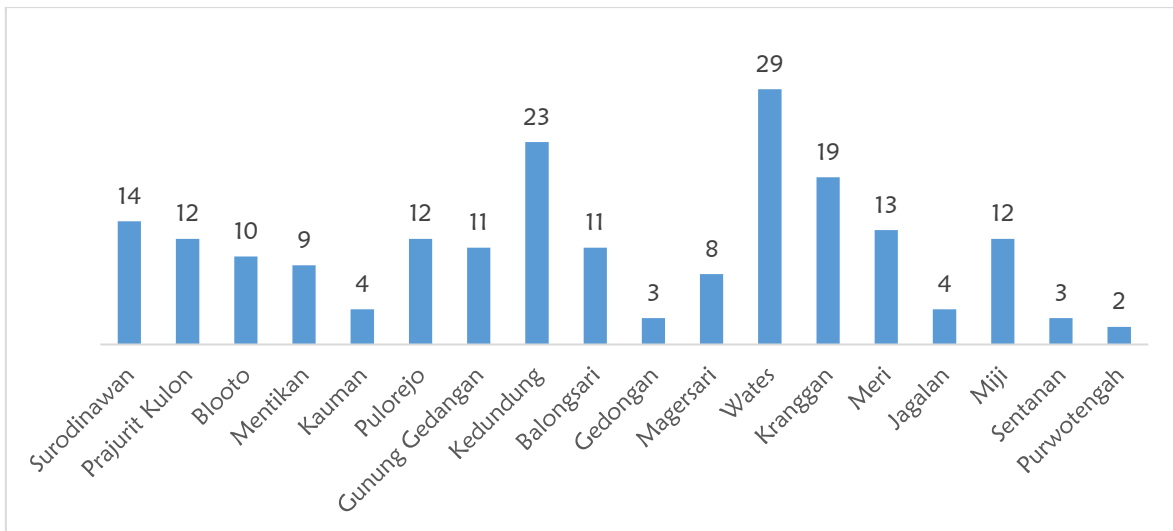
5.1.1 Profil Responden berdasarkan Kecamatan

Sebaran responden pada Survei Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto Tahun 2025 mencakup seluruh 18 kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa Kelurahan Wates memiliki proporsi responden terbesar dibandingkan kelurahan lainnya. Sebaliknya, Kelurahan Purwotengah menunjukkan proporsi responden yang relatif lebih kecil. Perbedaan jumlah responden antar kelurahan mencerminkan penerapan metode pengambilan sampel proporsional terhadap jumlah penduduk, sehingga wilayah dengan jumlah penduduk lebih besar memperoleh alokasi responden yang lebih tinggi. Dengan demikian, distribusi responden telah mencerminkan representasi kondisi demografis masing-masing kelurahan di Kota Mojokerto. Responden juga disebar baik di perkampungan maupun perumahan agar hasil survei dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat.



Tabel 5. 1 Profil Responden berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Responden
1	Prajurit Kulon	Surodinawan	9.711	14
		Prajurit Kulon	8.194	12
		Blooto	7.376	10
		Mentikan	6.336	9
		Kauman	3.105	4
		Pulorejo	8.780	12
2	Magersari	Gunung Gedangan	8.110	11
		Kedundung	16.333	23
		Balongsari	7.901	11
		Gedongan	2.191	3
		Magersari	5.674	8
		Wates	20.379	29
3	Kranggan	Kranggan	13.315	19
		Meri	9.511	13
		Jagalan	2.948	4
		Miji	8.667	12
		Sentanan	2.177	3
		Purwotengah	1.564	2
Total			142.272	200



Gambar 5. 1 Profil Responden berdasarkan Kecamatan

5.1.2 Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin

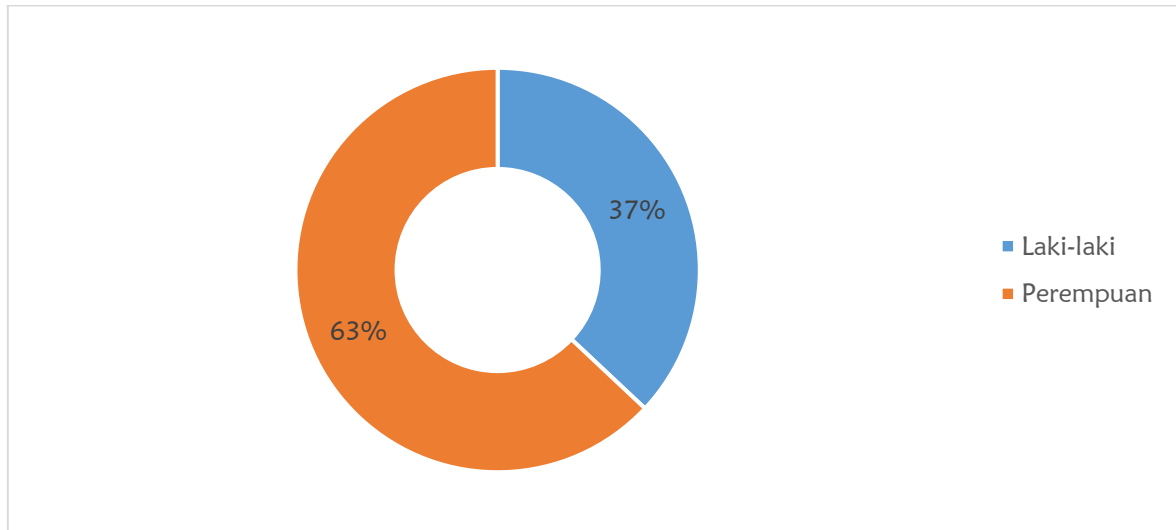
Berdasarkan jenis kelamin, responden survei IPMas Kota Mojokerto Tahun 2025 didominasi oleh perempuan, dengan proporsi sebesar 63%, sedangkan responden laki-laki sebesar 37%. Dominasi responden perempuan ini menunjukkan tingkat keterlibatan perempuan yang relatif lebih tinggi dalam kegiatan survei sosial kemasyarakatan. Kondisi ini dapat mencerminkan peran perempuan yang cukup aktif dalam kehidupan sosial di tingkat rumah tangga dan lingkungan, serta ketersediaan waktu yang lebih fleksibel untuk berpartisipasi dalam survei dibandingkan laki-laki. Waktu survei dimulai pada Pukul 08.00-16.00, sehingga responden yang dapat



ditemui oleh surveyor didominasi perempuan yang berada di rumah, sedangkan laki-laki atau suami sedang bekerja.

Tabel 5. 2 Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	74
Perempuan	126
Total	200



Gambar 5. 2 Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin

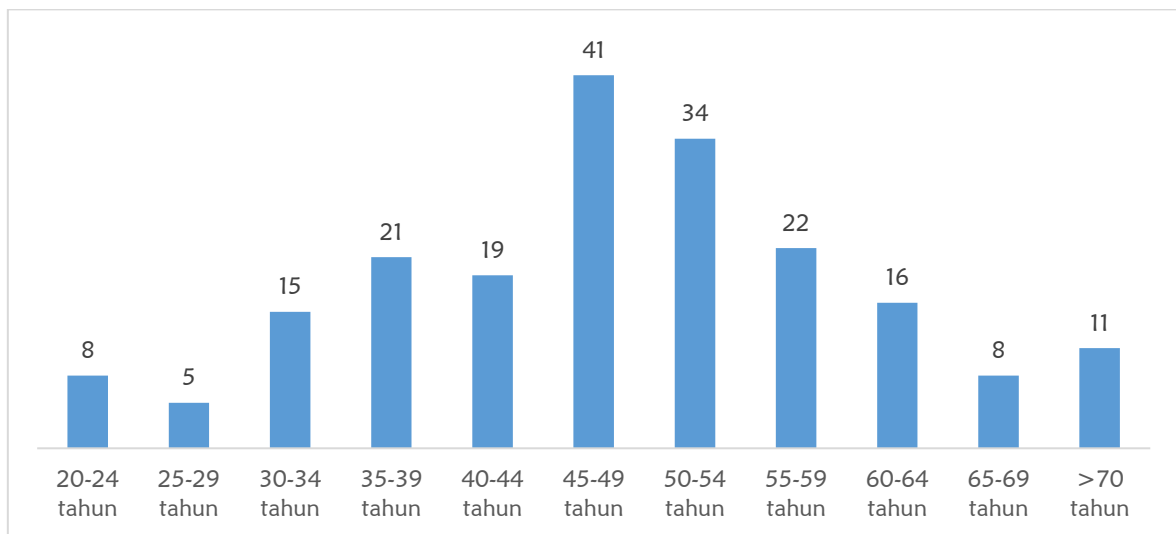
5.1.3 Profil Responden berdasarkan Usia

Sebaran responden berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa responden tersebar dari usia 20 tahun hingga di atas 70 tahun. Kelompok usia dengan proporsi terbesar berada pada rentang 45–49 tahun, diikuti oleh kelompok usia 50–54 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori usia dewasa produktif hingga menjelang lansia. Sementara itu, proporsi responden pada kelompok usia 20–29 tahun dan 65 tahun ke atas relatif lebih kecil. Pola ini menunjukkan bahwa kelompok usia menengah lebih dominan dalam partisipasi survei, yang dapat dikaitkan dengan pengalaman sosial dan keterlibatan aktif dalam aktivitas kemasyarakatan. Merujuk pada ketentuan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009, mayoritas usia responden berada pada kategori dewasa (18–59 tahun) sebesar 88% dan lansia (>60 tahun) sebesar 12%. Sebaran usia responden sesuai dengan metode pengambilan sampel yang telah ditentukan pada proses pengambilan data yaitu berumur >17 tahun.



Tabel 5. 3 Profil Responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
20-24 tahun	8
25-29 tahun	5
30-34 tahun	15
35-39 tahun	21
40-44 tahun	19
45-49 tahun	41
50-54 tahun	34
55-59 tahun	22
60-64 tahun	16
65-69 tahun	8
>70 tahun	11
Total	200



Gambar 5. 3 Profil Responden berdasarkan Usia

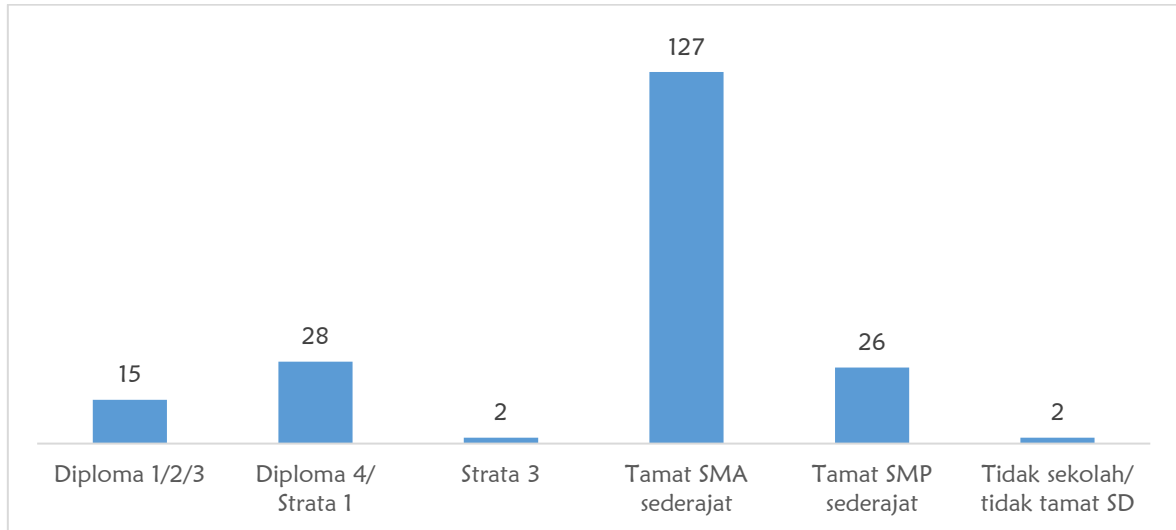
5.1.4 Profil Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Profil responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir tersebar dari jenjang tidak sekolah/ tidak tamat SD hingga S-3. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, mayoritas responden memiliki pendidikan tamat SMA/ sederajat, dengan proporsi sebesar 63%. Kelompok pendidikan berikutnya adalah Diploma IV/ Strata 1 sebesar 14%, serta tamat SMP/ sederajat sebesar 13%. Responden dengan pendidikan Diploma I/II/III, Strata 2, dan Strata 3 memiliki proporsi yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pendidikan responden didominasi oleh lulusan pendidikan menengah, yang mencerminkan struktur pendidikan masyarakat Kota Mojokerto secara umum.



Tabel 5. 4 Profil Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah
Diploma 1/2/3	15
Diploma 4/ Strata 1	28
Strata 3	2
Tamat SMA sederajat	127
Tamat SMP sederajat	26
Tidak sekolah/ tidak tamat SD	2
Total	200



Gambar 5. 4 Profil Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

5.1.5 Profil Responden berdasarkan Pekerjaan

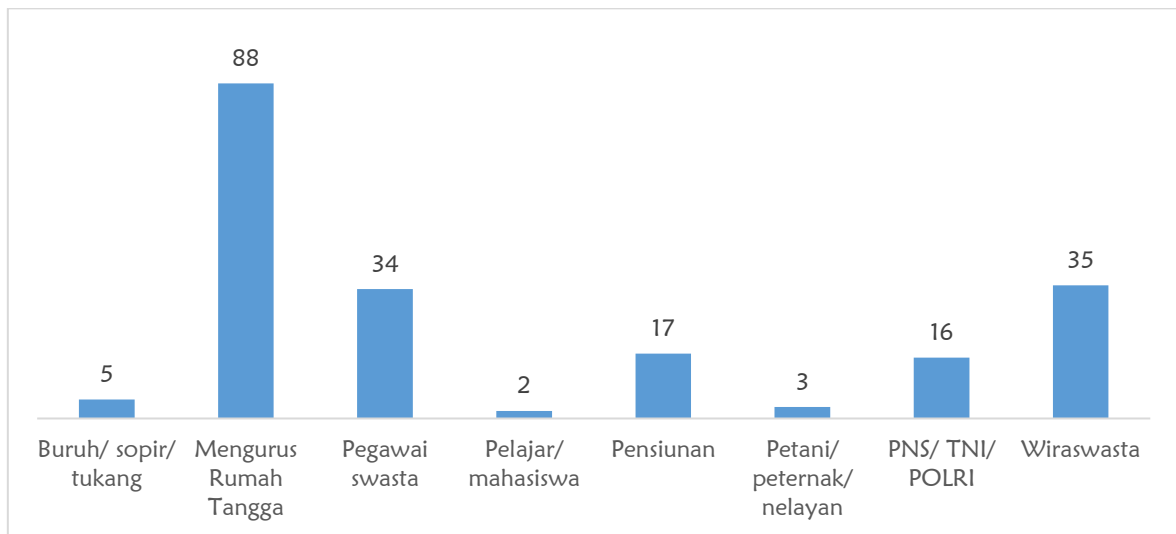
Sebaran responden berdasarkan pekerjaan terdiri dari jenis pekerjaan beragam. Sebaran responden berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bahwa kelompok mengurus rumah tangga merupakan proporsi terbesar, yaitu sekitar 46% dari total responden. Kondisi ini sejalan dengan dominasi responden perempuan dalam survei. Hal ini dipengaruhi oleh waktu survei yang dimulai pada Pukul 08.00-16.00, sehingga responden yang dapat ditemui oleh surveyor didominasi ibu rumah tangga yang berada di rumah, sedangkan laki-laki atau suami sedang bekerja.

Kelompok pekerjaan lain yang cukup dominan adalah pegawai swasta dan wiraswasta, yang masing-masing memiliki proporsi cukup signifikan. Sementara itu, responden dengan pekerjaan sebagai PNS/TNI/POLRI, pensiunan, pelajar/mahasiswa, serta buruh/sopir/tukang memiliki proporsi yang lebih kecil. Kelompok petani/peternak/nelayan memiliki proporsi rendah mencerminkan karakteristik Kota Mojokerto sebagai wilayah perkotaan dengan dominasi aktivitas non-pertanian.



Tabel 5. 5 Profil Responden berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah
Buruh/ sopir/ tukang	5
Mengurus Rumah Tangga	88
Pegawai swasta	34
Pelajar/ mahasiswa	2
Pensiunan	17
Petani/ peternak/ nelayan	3
PNS/ TNI/ POLRI	16
Wiraswasta	35
Total	200



Gambar 5. 5 Profil Responden berdasarkan Pekerjaan

5.1.6 Profil Responden berdasarkan Suku

Data etnisitas menunjukkan tingkat monokulturalisme yang sempurna dalam sampel. Responden didominasi secara masif oleh Suku Jawa, dengan proporsi mencapai 100%. Dominasi Suku Jawa yang absolut menunjukkan bahwa konteks sosial dan budaya penelitian berakar kuat pada tradisi dan nilai-nilai kultural Jawa. Dalam studi sosial, homogenitas etnis yang ekstrem ini dapat menyederhanakan analisis keragaman, tetapi pada saat yang sama, mungkin membatasi kemampuan untuk menggeneralisasi temuan pada populasi yang lebih majemuk.

5.1.7 Profil Responden berdasarkan Agama

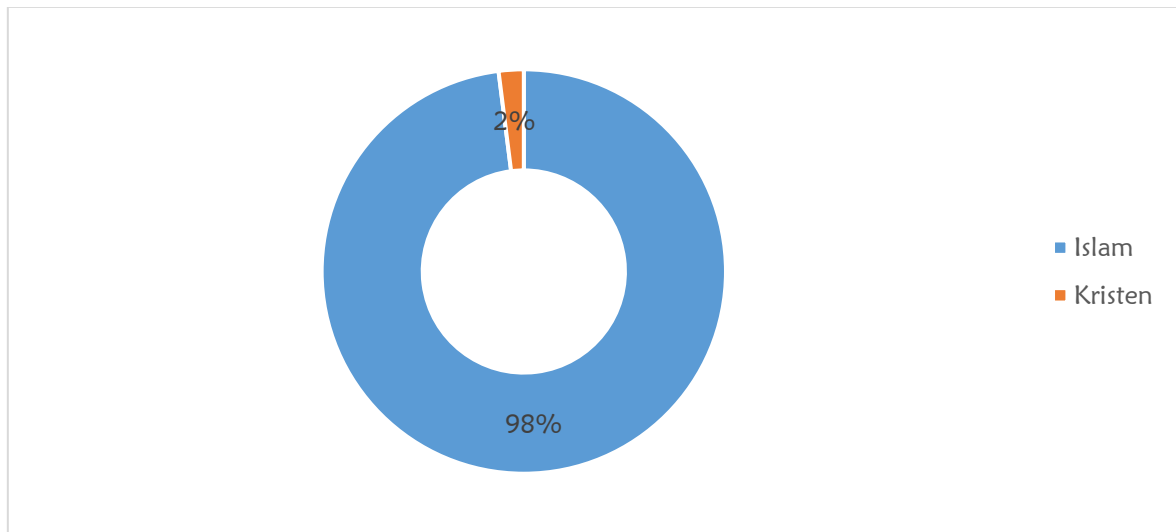
Distribusi keyakinan responden menunjukkan tingkat homogenitas keagamaan yang sangat tinggi. Mayoritas mutlak responden memeluk agama Islam, mencapai 98% dari total populasi sampel. Kelompok agama Kristen menempati proporsi yang sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Data ini mengindikasikan bahwa penelitian berlokasi di area atau berfokus pada kelompok



masyarakat yang karakteristik sosialnya kemungkinan besar didominasi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari ajaran Islam. Homogenitas yang ekstrem ini memiliki implikasi penting terhadap pola interaksi sosial, gotong royong, dan partisipasi organisasi, di mana institusi keagamaan dapat bertindak sebagai perekat sosial utama.

Tabel 5. 6 Profil Responden berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	196
Kristen	4
Total	200



Gambar 5. 6 Profil Responden berdasarkan Agama

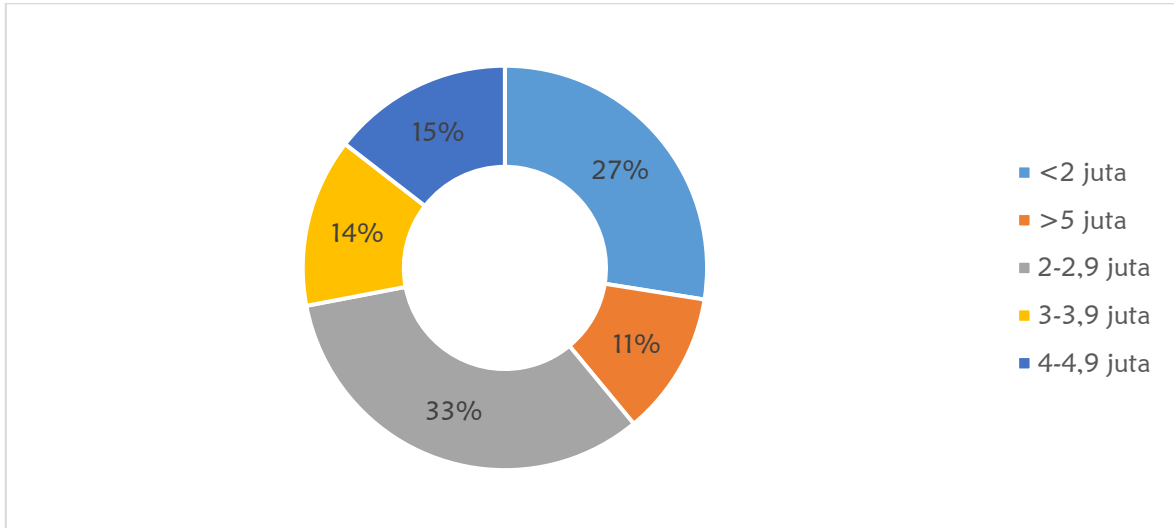
5.1.8 Profil Responden berdasarkan Pengeluaran Rumah Tangga

Distribusi pendapatan rumah tangga mencerminkan konsentrasi signifikan pada kategori kelas menengah ke bawah. Secara kumulatif, 27% responden memiliki pendapatan bulanan di bawah 2 juta rupiah, dan 33% berada di rentang 2–2,9 juta rupiah. Dengan demikian, 60% dari responden memiliki pendapatan di bawah 3 juta rupiah. Kelompok dengan pendapatan menengah atas (3–4,9 juta rupiah) mencakup 29% (akumulasi dari 3–3,9 juta sebesar 14% dan 4–4,9 juta sebesar 15%). Hanya sebagian kecil, 11%, yang melaporkan pendapatan bulanan di atas 5 juta rupiah. Pola distribusi pendapatan menunjukkan bahwa sebagian besar populasi sampel menghadapi potensi kendala ekonomi. Tingkat pendapatan yang terpusat di batas bawah dan menengah memiliki implikasi kritis terhadap ketersediaan waktu luang, sumber daya untuk partisipasi sosial, dan prioritas hidup sehari-hari, yang seringkali berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar.



Tabel 5. 7 Profil Responden berdasarkan Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran Rumah Tangga	Jumlah
<2 juta	55
>5 juta	23
2-2,9 juta	66
3-3,9 juta	27
4-4,9 juta	29
Total	200



Gambar 5. 7 Profil Responden berdasarkan Pengeluaran Rumah Tangga

5.1.9 Dokumentasi Responden

Dokumentasi responden adalah proses pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari responden dalam suatu penelitian, survei, atau kuesioner. Berikut merupakan dokumentasi responden penelitian.



Kelurahan Balongsari



Kelurahan Blooto



Kelurahan Blooto





Kelurahan Gunung Gedangan



Kelurahan Prajurit Kulon



Kelurahan Surodinawan



Kelurahan Surodinawan



Kelurahan Surodinawan



Kelurahan Wates



Kelurahan Wates



Kelurahan Wates



Kelurahan Wates

Gambar 5. 8 Dokumentasi Responden



5.2 UJI VALIDITAS DAN REABILITAS

Uji validitas digunakan untuk melihat sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen dalam melakukan fungsinya. Selain itu validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel. Valid tidaknya suatu alat ukur tergantung pada mampu tidaknya alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Butir pertanyaan dapat dikatakan valid dan diterima apabila r hitung $>$ r tabel. Adapun hasil uji validitas terhadap jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 8 Uji Validitas

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
B1	0,549	0,080	valid	B40	0,563	0,080	valid
B2	0,565	0,080	valid	B41	0,374	0,080	valid
B3	0,471	0,080	valid	B42	0,514	0,080	valid
B4	0,528	0,080	valid	B43	0,520	0,080	valid
B5	0,529	0,080	valid	B44	0,509	0,080	valid
B6	0,511	0,080	valid	B45	0,510	0,080	valid
B7	0,588	0,080	valid	B46	0,561	0,080	valid
B8	0,582	0,080	valid	B47	0,534	0,080	valid
B9	0,545	0,080	valid	B48	0,438	0,080	valid
B10	0,569	0,080	valid	B49	0,597	0,080	valid
B11	0,410	0,080	valid	B50	0,515	0,080	valid
B12	0,515	0,080	valid	B51	0,538	0,080	valid
B13	0,545	0,080	valid	B52	0,567	0,080	valid
B14	0,122	0,080	valid	B53	0,448	0,080	valid
B15	0,542	0,080	valid	B54	0,544	0,080	valid
B16	0,543	0,080	valid	B55	0,517	0,080	valid
B17	0,524	0,080	valid	C1	0,263	0,080	valid
B18	0,415	0,080	valid	C2	0,234	0,080	valid
B19	0,280	0,080	valid	C3	0,598	0,080	valid
B20	0,242	0,080	valid	C4	0,574	0,080	valid
B21	0,578	0,080	valid	C5	0,266	0,080	valid
B22	0,527	0,080	valid	C6	0,561	0,080	valid
B23	0,527	0,080	valid	C7	0,169	0,080	valid
B24	0,471	0,080	valid	C8	0,570	0,080	valid
B25	0,592	0,080	valid	C9	0,580	0,080	valid
B26	0,289	0,080	valid	C10	0,107	0,080	valid
B27	0,387	0,080	valid	C11	0,582	0,080	valid
B28	0,338	0,080	valid	C12	0,549	0,080	valid
B29	0,250	0,080	valid	C13	0,291	0,080	valid
B30	0,113	0,080	valid	C14	0,512	0,080	valid
B31	0,504	0,080	valid	C15	0,542	0,080	valid
B32	0,533	0,080	valid	C16	0,551	0,080	valid
B33	0,457	0,080	valid	C17	0,531	0,080	valid
B34	0,579	0,080	valid	D1	0,330	0,080	valid
B35	0,450	0,080	valid	D2	0,588	0,080	valid
B36	0,537	0,080	valid	D3	0,337	0,080	valid
B37	0,556	0,080	valid	D4	0,535	0,080	valid
B38	0,542	0,080	valid	D5	0,579	0,080	valid
B39	0,205	0,080	valid	D6	0,534	0,080	valid



Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
D7	0,570	0,080	valid
D8	0,225	0,080	valid
D9	0,553	0,080	valid
D10	0,579	0,080	valid
D11	0,543	0,080	valid
D12	0,516	0,080	valid
D13	0,477	0,080	valid
D14	0,558	0,080	valid
D15	0,538	0,080	valid
D16	0,560	0,080	valid
D17	0,123	0,080	valid
D18	0,500	0,080	valid
D19	0,509	0,080	valid
D20	0,391	0,080	valid
D21	0,296	0,080	valid
D22	0,557	0,080	valid
D23	0,498	0,080	valid
D24	0,385	0,080	valid
D25	0,512	0,080	valid
D26	0,019	0,080	valid
D27	0,028	0,080	valid
D28	0,529	0,080	valid
D29	0,540	0,080	valid
D30	0,594	0,080	valid
D31	0,366	0,080	valid
D32	0,590	0,080	valid
D33	0,561	0,080	valid

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
D34	0,430	0,080	valid
D35	0,146	0,080	valid
D36	0,538	0,080	valid
D37	0,529	0,080	valid
D38	0,077	0,080	valid
D39	0,389	0,080	valid
D40	0,575	0,080	valid
D41	0,590	0,080	valid
D42	0,334	0,080	valid
D43	0,578	0,080	valid
D44	0,249	0,080	valid
D45	0,530	0,080	valid
D46	0,549	0,080	valid
D47	0,506	0,080	valid
D48	0,590	0,080	valid
D49	0,543	0,080	valid
D50	0,482	0,080	valid
D51	0,268	0,080	valid
D52	0,525	0,080	valid
D53	0,595	0,080	valid
D54	0,585	0,080	valid
D55	0,578	0,080	valid
D56	0,521	0,080	valid
D57	0,579	0,080	valid
D58	0,251	0,080	valid

Sumber : Analisis, 2025

Selain melakukan uji validitas, jawaban responden juga dilakukan uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan alat ukur yang berfungsi untuk menunjukkan derajat keajegan atau konsisten alat ukur yang digunakan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Untuk menguji reliabilitas alat ukur dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Chronbach's Alpha, dimana besarnya koefisien batas minimum reliabilitas adalah 0,600. Berikut merupakan hasil uji realibilitas terhadap jawaban responden pada kegiatan Pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2025.

Tabel 5. 9 Uji Reabilitas Indeks Pembangunan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2025

Keterangan	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cut of Value</i>	Keterangan
Indeks Pembangunan Masyarakat	0,891	0,600	Reliabel

Sumber : Analisis, 2025

Maka, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS memperlihatkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk instrumen Indeks Pembangunan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2025 valid dan reliabel.



5.3 PENGUKURAN DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT

5.3.1 Dimensi Kohesi Sosial

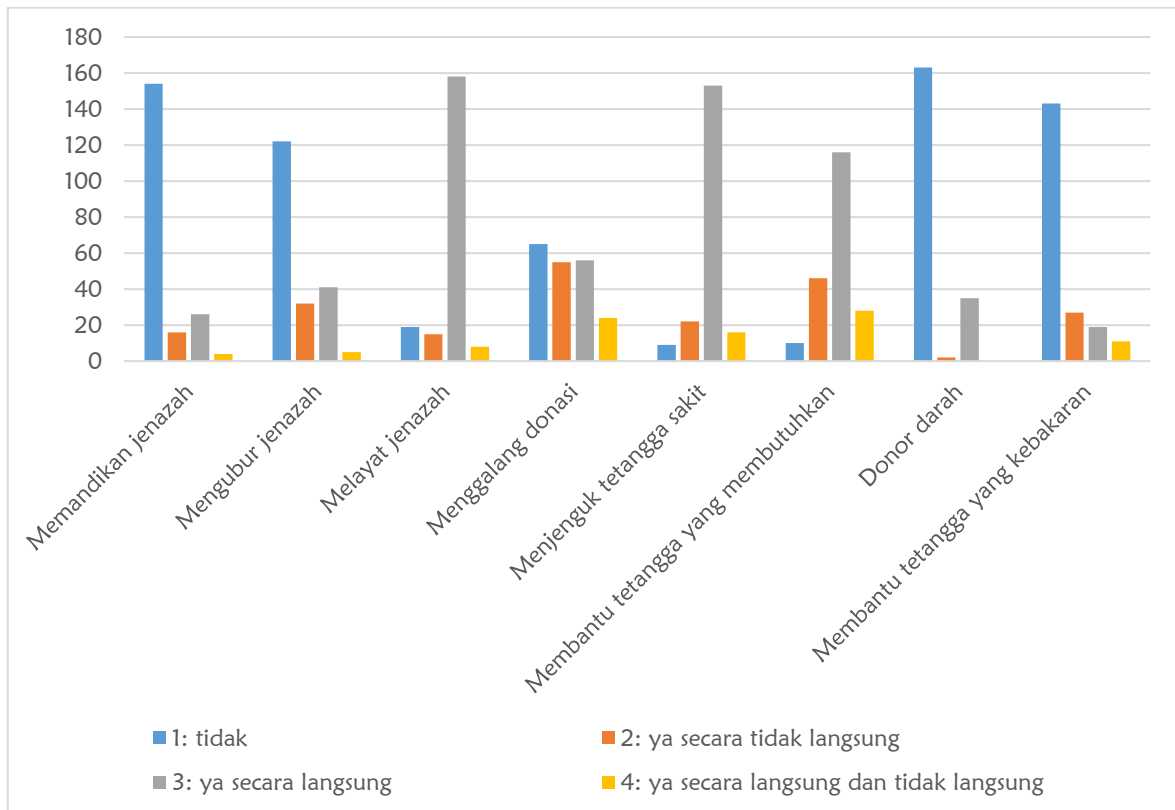
A. Kerja Sama Sosial

Komponen kerja sama sosial diukur berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial berupa membantu warga yang terkena musibah. Hasil dari pengukuran terhadap komponen kerja sama sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Hasil Pengukuran Komponen Kerja Sama Sosial

Komponen Kerja Sama Sosial	1: tidak	2: ya secara tidak langsung	3: ya secara langsung	4: ya secara langsung dan tidak langsung	Total
Memandikan jenazah	154	16	26	4	200
Mengubur jenazah	122	32	41	5	200
Melayat jenazah	19	15	158	8	200
Menggalang donasi	65	55	56	24	200
Menjenguk tetangga sakit	9	22	153	16	200
Membantu tetangga yang membutuhkan	10	46	116	28	200
Donor darah	163	2	35	0	200
Membantu tetangga yang kebakaran	143	27	19	11	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 9 Hasil Pengukuran Komponen Kerja Sama Sosial

Sumber : Analisis, 2025



Pada kegiatan menggalang donasi, distribusi partisipasi terlihat lebih merata antara yang tidak ikut, ikut secara tidak langsung (misalnya menyumbang uang tanpa menjadi panitia), dan ikut langsung. Tingkat partisipasi secara langsung tertinggi ditemukan pada aktivitas melayat jenazah dan menjenguk tetangga sakit. Hal ini mengindikasikan bahwa norma sosial untuk menunjukkan empati dan kehadiran fisik saat sesama warga tertimpa musibah masih sangat kuat dalam komunitas ini. Kehadiran dianggap sebagai kewajiban sosial utama.

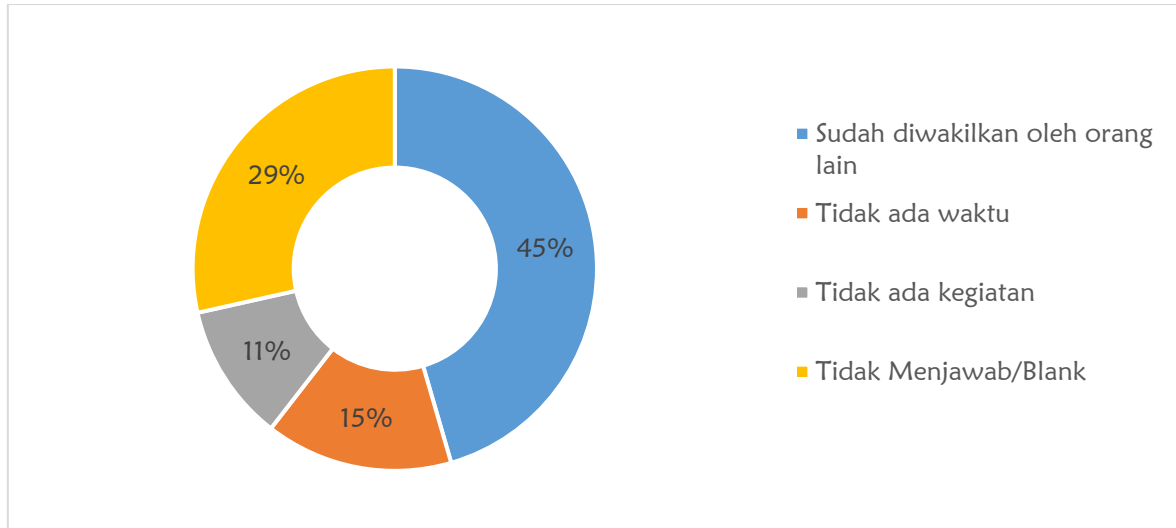
Sebaliknya, kegiatan yang memerlukan keahlian khusus, keberanian mental, atau kondisi fisik tertentu memiliki tingkat ketidakikutsertaan yang sangat tinggi. Hal ini terlihat jelas pada aktivitas donor darah, memandikan jenazah, dan membantu tetangga yang kebakaran. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa responden cenderung pasif pada komponen kerja sama sosial mayoritas bukan beralasan karena tidak mau atau memandang aktifitas tersebut negatif, melainkan karena pada kegiatan-kegiatan tersebut sudah diwakilkan orang lain atau responden menyerahkannya kepada pihak yang lebih ahli atau petugas khusus. Hal tersebut wajar, mengingat beberapa kegiatan pada komponen kerja sama sosial tidak membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam jumlah banyak (seperti memandikan dan mengubur jenazah) dan jenis kegiatan (seperti donasi dan membantu tetangga yang kebakaran) tidak selalu ada pada setiap waktu. Sedangkan untuk donor darah bernilai kecil karena masyarakat merasa agak takut dengan jarum suntik.

Responden menyatakan "Tidak ada waktu" sebagai alasan utama ketidakikutsertaan. Hal ini kemungkinan besar berkorelasi dengan profil ekonomi menengah ke bawah (seperti dianalisis sebelumnya), di mana prioritas waktu dialokasikan untuk pekerjaan atau pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kategori seperti "Malas" atau "Tidak suka/tidak bermanfaat" memiliki persentase 0%. Ini mengonfirmasi bahwa ketidakaktifan bukan disebabkan oleh apatisme atau penolakan terhadap nilai organisasi, melainkan karena pembagian peran dalam keluarga atau keterbatasan sumber daya waktu.

Tabel 5. 11 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial

Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial	Jumlah
Sudah diwakilkan oleh orang lain	91
Tidak ada waktu	30
Tidak ada kegiatan	22
Tidak Menjawab/Blank	57
Total	200





Gambar 5. 10 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial
Sumber : Analisis, 2025

B. Jejaring Sosial

1. Keikutsertaan Masyarakat pada Organisasi

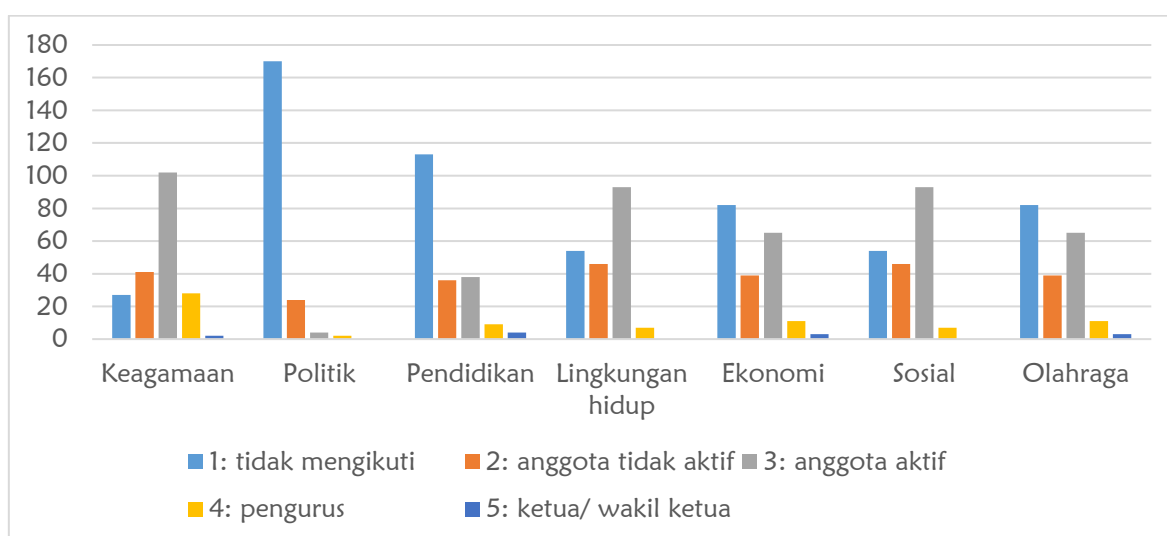
Organisasi Keagamaan dan Sosial menunjukkan tingkat keaktifan tertinggi, di mana kategori "anggota aktif" menjadi mode utama partisipasi. Hal ini konsisten dengan profil demografi yang homogen (mayoritas Muslim Jawa) di mana institusi agama dan sosial adalah pilar utama dalam membangun modal sosial dan kohesi masyarakat. Organisasi Politik menunjukkan tingkat ketidakikutsertaan (tidak mengikuti) yang sangat dominan, mencapai sekitar 80%. Hal ini mengindikasikan adanya jarak atau rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap struktur politik formal. Pada organisasi lain seperti Pendidikan, Lingkungan Hidup, Ekonomi, dan Olahraga, meskipun tingkat ketidakikutsertaan (1) cukup tinggi, terdapat porsi yang signifikan untuk "anggota aktif" (3), meskipun selalu melebihi kategori "pengurus" (4) dan "ketua/wakil ketua" (5). Ini menyiratkan bahwa responden lebih memilih peran sebagai partisipan daripada sebagai pemegang kekuasaan atau inisiator kebijakan dalam organisasi tersebut. Secara keseluruhan, pola ini mencerminkan masyarakat yang selektif dalam partisipasinya, memprioritaskan kegiatan yang berhubungan langsung dengan nilai komunal (agama dan sosial) sambil menjaga jarak dari struktur politik formal.



Tabel 5. 12 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Organisasi

Keikutsertaan Masyarakat pada Organisasi	1: tidak mengikuti	2: anggota tidak aktif	3: anggota aktif	4: pengurus	5: ketua/ wakil ketua	Total
Keagamaan	27	41	102	28	2	200
Politik	170	24	4	2	0	200
Pendidikan	113	36	38	9	4	200
Lingkungan hidup	54	46	93	7	0	200
Ekonomi	82	39	65	11	3	200
Sosial	54	46	93	7	0	200
Olahraga	82	39	65	11	3	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 11 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Organisasi

Sumber : Analisis, 2025

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa alasan tertinggi responden mengikuti kegiatan organisasi adalah untuk menambah pengetahuan (42%). Hal ini menunjukkan bahwa organisasi dipandang sebagai sarana utama untuk peningkatan diri dan pembelajaran berkelanjutan. Alasan terpenting kedua adalah "Melayani Masyarakat" (30%). Kombinasi kedua faktor ini menyoroti orientasi anggota aktif yang mencari aktualisasi diri melalui kontribusi kepada publik. Motif "Mengisi waktu luang" berada di urutan ketiga (18%), menunjukkan bahwa organisasi bukan hanya sekadar sarana hiburan, melainkan memiliki fungsi yang lebih serius dan substansial. Motif kepemimpinan dan pencarian teman hanya berkontribusi kecil.

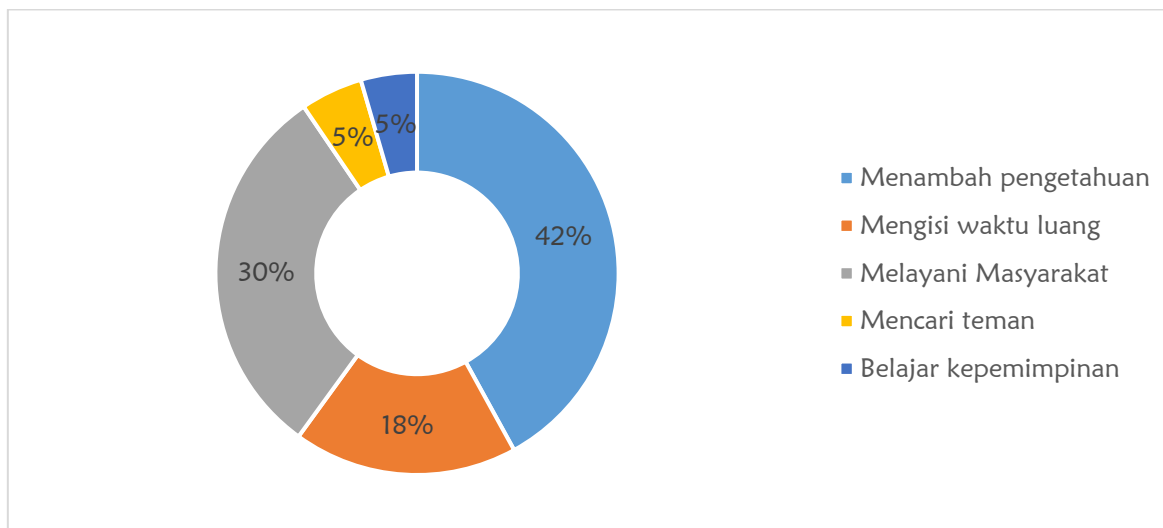
Tabel 5. 13 Persentase Alasan Mengikuti Kegiatan Organisasi

Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Organisasi	Jumlah
Menambah pengetahuan	84
Mengisi waktu luang	36



Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Organisasi	Jumlah
Melayani Masyarakat	61
Mencari teman	10
Belajar kepemimpinan	9
Total	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 12 Persentase Alasan Mengikuti Kegiatan Organisasi

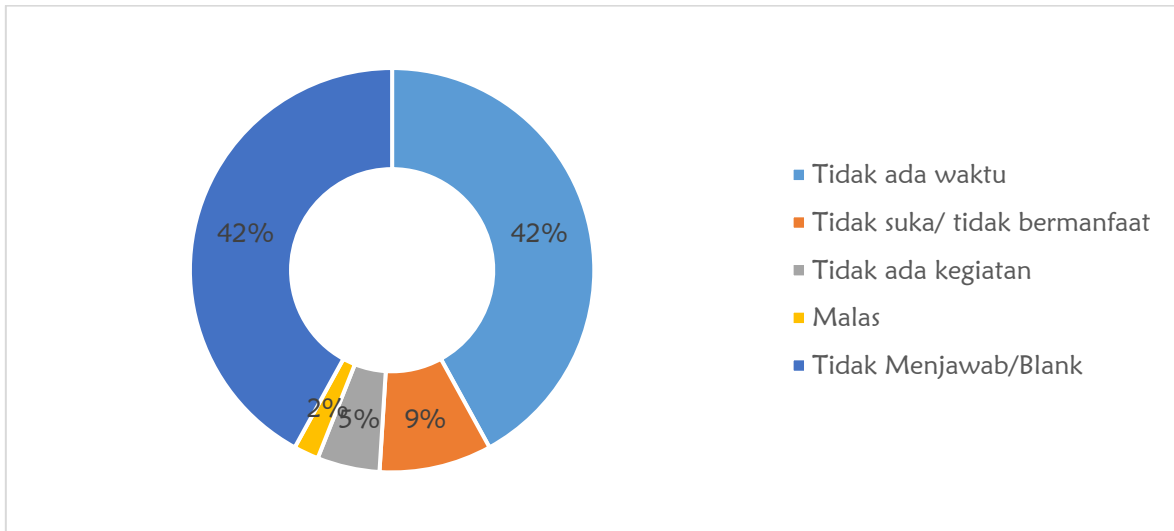
Sumber : Analisis, 2025

Hambatan yang paling signifikan adalah "Tidak ada waktu". Persentase yang sangat tinggi menggarisbawahi tekanan waktu yang dihadapi responden, kemungkinan besar akibat alokasi waktu yang intensif untuk mencari nafkah atau mengurus rumah tangga, sejalan dengan profil ekonomi kelas menengah ke bawah. Alasan signifikan kedua adalah "Tidak suka/tidak bermanfaat". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil responden memiliki evaluasi instrumental terhadap organisasi; mereka tidak berpartisipasi karena tidak melihat nilai tambah yang jelas dari keikutsertaan tersebut. Faktor psikologis seperti "Malu/rendah diri" dan faktor kesehatan "Sakit" hanya menyumbang persentase yang sangat kecil, menunjukkan bahwa hambatan utama bersifat eksternal (waktu) dan evaluatif (manfaat), bukan internal atau fisik.

Tabel 5. 14 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Organisasi

Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Organisasi	Jumlah
Tidak ada waktu	84
Tidak suka/ tidak bermanfaat	18
Tidak ada kegiatan	10
Malas	4
Tidak Menjawab/Blank	84
Total	200





Gambar 5. 13 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Organisasi

Sumber : Analisis, 2025

2. Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Keagamaan

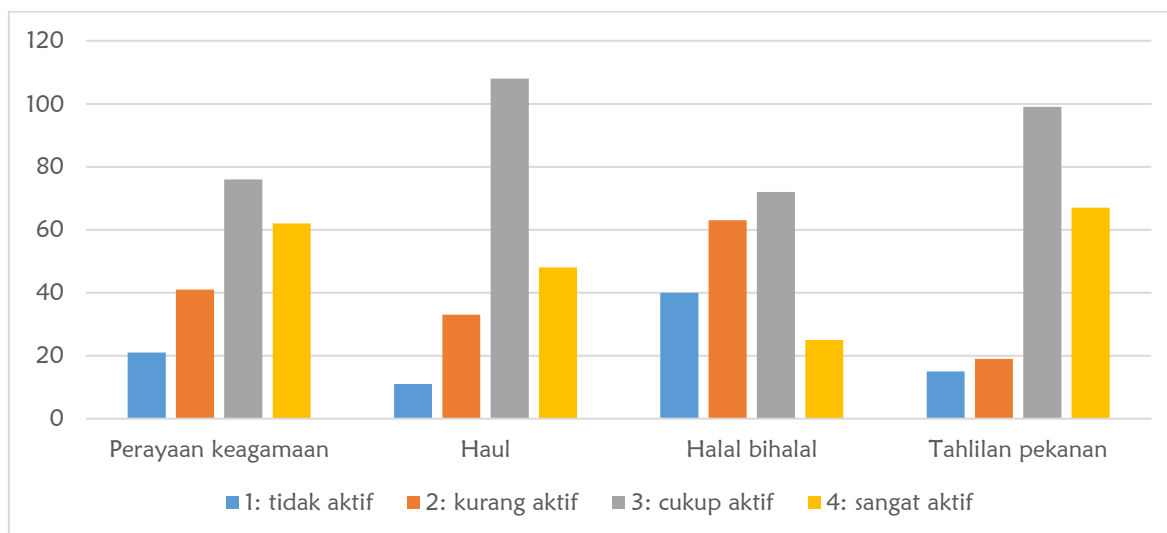
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan keagamaan tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa jenis organisasi dengan tingkat partisipasi tinggi adalah organisasi keagamaan. Secara umum, tingkat partisipasi aktif (3: cukup aktif dan 4: sangat aktif) jauh melampaui tingkat ketidakaktifan (1: tidak aktif) pada sebagian besar kegiatan. Aktivitas Pengajian dan Perayaan Keagamaan didominasi oleh partisipan yang "cukup aktif" (3), yang menunjukkan keterlibatan rutin namun tidak selalu pada tingkat kepemimpinan atau frekuensi tertinggi. Partisipasi dalam Halal Bihalal menunjukkan persentase "cukup aktif" yang tertinggi. Tingkat "sangat aktif" (4) tertinggi ditemukan pada kegiatan Pengajian dan Halal Bihalal, menunjukkan adanya kelompok inti yang sangat berdedikasi pada kegiatan pembelajaran agama dan silaturahmi besar. Tahlilan Pekanan juga menunjukkan tingkat partisipasi "sangat aktif" yang tinggi, menegaskan pentingnya ritual komunal dan solidaritas sosial berbasis keagamaan dalam komunitas ini. Kegiatan Haul (peringatan tahunan) dan Tahlilan Pekanan memiliki persentase "tidak aktif" (1) yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Pengajian atau Perayaan Keagamaan, meskipun masih dalam batas wajar. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa kegiatan ini bersifat lebih spesifik atau tidak diwajibkan secara universal oleh semua rumah tangga.



Tabel 5. 15 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Keagamaan

Kegiatan Keagamaan	1: tidak aktif	2: kurang aktif	3: cukup aktif	4: sangat aktif	Total
Perayaan keagamaan	21	41	76	62	200
Haul	11	33	108	48	200
Halal bihalal	40	63	72	25	200
Tahlilan pekanan	15	19	99	67	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 14 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Keagamaan

Sumber : Analisis, 2025

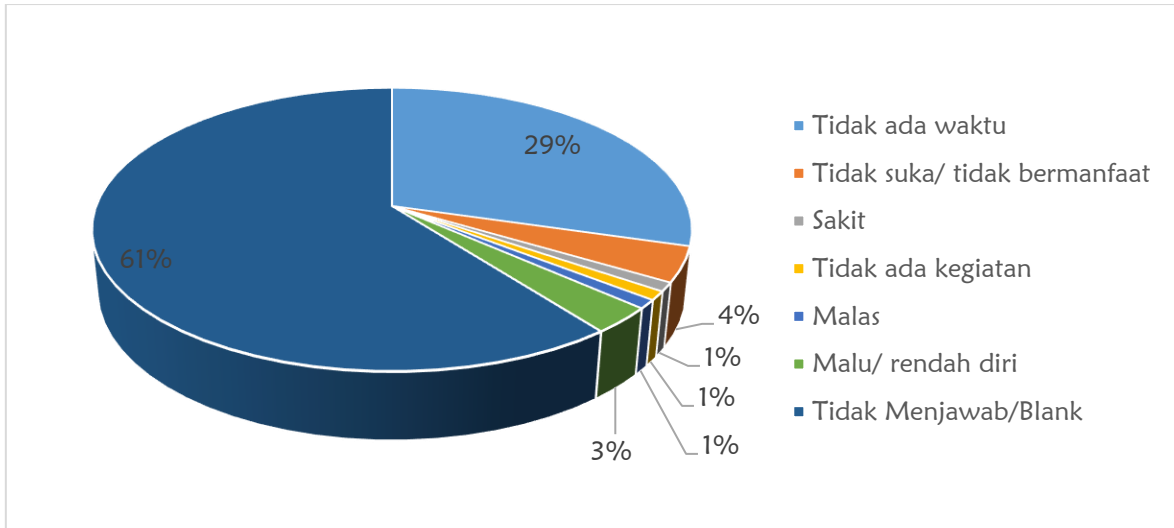
Masyarakat yang menyatakan tidak terlibat pada kegiatan keagamaan mayoritas beralasan bahwa tidak ada waktu luang.

Tabel 5. 16 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Keagamaan

Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Keagamaan	Jumlah
Tidak ada waktu	59
Tidak suka/ tidak bermanfaat	8
Sakit	2
Tidak ada kegiatan	2
Malas	2
Malu/ rendah diri	6
Tidak Menjawab/Blank	121
Total	200

Sumber : Analisis, 2025





Gambar 5. 15 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Keagamaan
Sumber : Analisis, 2025

3. Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

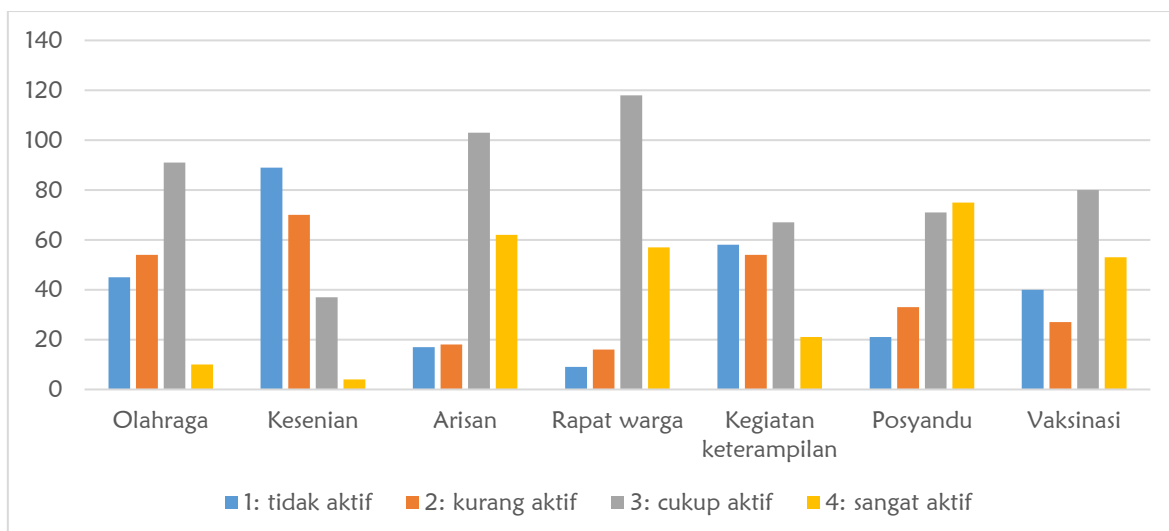
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tinggi di semua kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu olahraga, arisan, rapat warga, kegiatan keterampilan, posyandu, dan vaksinasi yang diwajibkan Pemerintah. Kegiatan kesenian agak rendah dibanding kegiatan lain dikarenakan pelaksanaannya sangat jarang.

Tabel 5. 17 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	1: tidak aktif	2: kurang aktif	3: cukup aktif	4: sangat aktif	Total
Olahraga	45	54	91	10	200
Kesenian	89	70	37	4	200
Arisan	17	18	103	62	200
Rapat warga	9	16	118	57	200
Kegiatan keterampilan	58	54	67	21	200
Posyandu	21	33	71	75	200
Vaksinasi	40	27	80	53	200

Sumber : Analisis, 2025





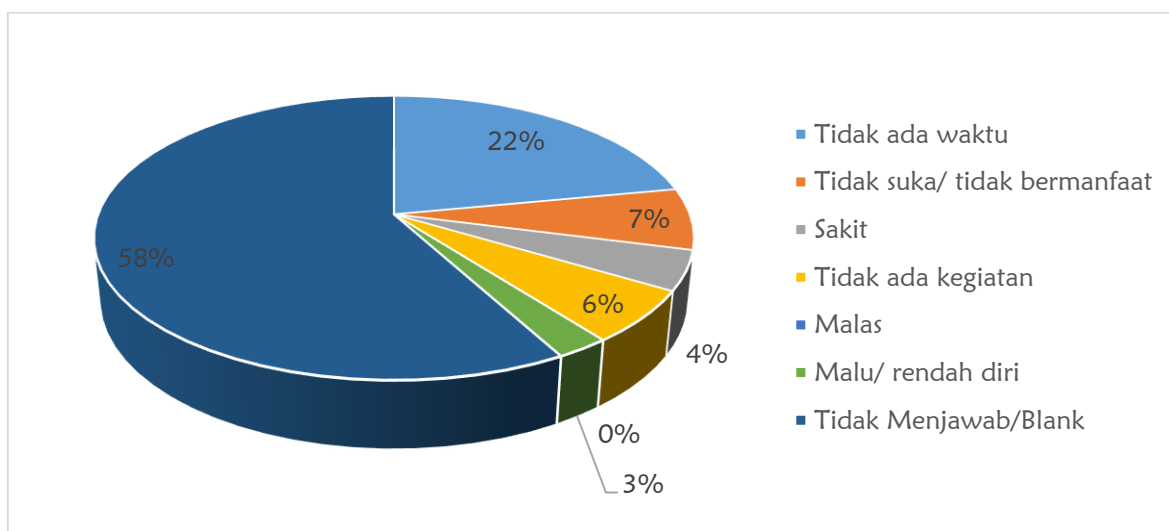
Gambar 5. 16 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
Sumber : Analisis, 2025

Masyarakat yang menyatakan tidak terlibat pada kegiatan sosial kemasyarakatan mayoritas beralasan bahwa tidak ada waktu luang.

Tabel 5. 18 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah
Tidak ada waktu	44
Tidak suka/ tidak bermanfaat	14
Sakit	9
Tidak ada kegiatan	12
Malas	0
Malu/ rendah diri	5
Tidak Menjawab/Blank	116
Total	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 17 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
Sumber : Analisis, 2025



C. Aksi Kolektif

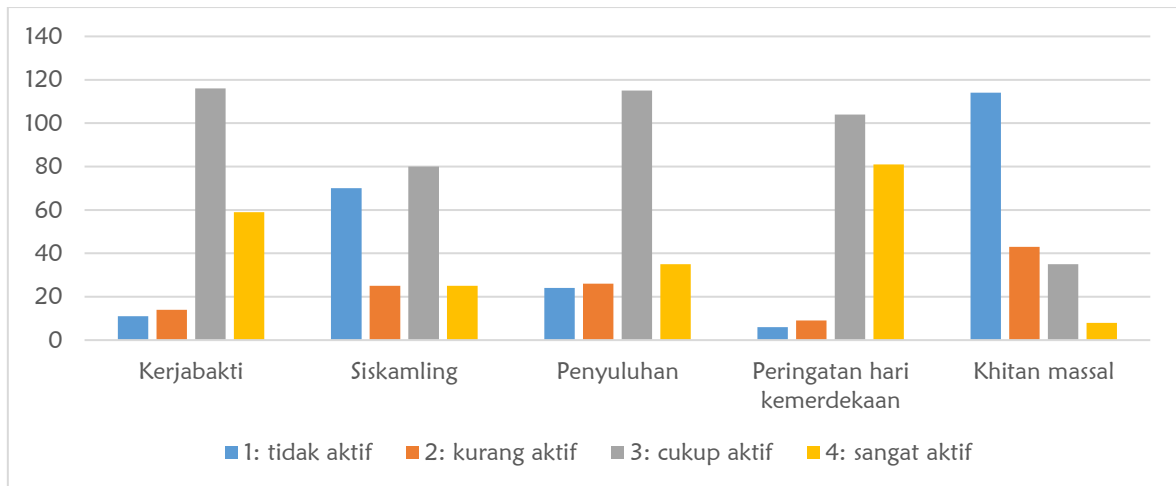
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan masyarakat tinggi terhadap hampir semua kegiatan bersama dalam rangka kepentingan warga sekitar yaitu kerjabakti, siskamling, penyuluhan, dan peringatan hari kemerdekaan. Analisis komparatif menunjukkan adanya diferensiasi yang jelas dalam pola partisipasi berbasis kepentingan dan kewajiban komunal. Kegiatan dengan nuansa kewajiban sipil dan tata kelola masyarakat (seperti Rapat Warga) mencatat tingkat keikutsertaan 'Cukup Aktif' tertinggi, yang merefleksikan pentingnya musyawarah formal dalam konteks komunal. Selain itu, kegiatan berbasis kebutuhan fungsional dan kesehatan (Posyandu, Vaksinasi) menunjukkan proporsi partisipasi 'Sangat Aktif' yang signifikan. Hal ini mendukung hipotesis bahwa program yang secara langsung menawarkan manfaat nyata dan terukur cenderung menghasilkan aktivasi partisipan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kegiatan yang bersifat rekreatif atau berbasis minat (Kesenian) menunjukkan dominasi kategori 'Tidak Aktif' dan 'Kurang Aktif', mengindikasikan bahwa kegiatan ini mungkin dianggap sebagai pilihan sekunder, atau terdapat kendala akses dan sumber daya. Pola keikutsertaan pada Kesenian yang sangat rendah menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali strategi mobilisasi dan diversifikasi jenis kegiatan agar lebih inklusif dan menarik bagi anggota rumah tangga. Sedangkan, untuk kegiatan khitan massal rendah dikarenakan kegiatan tersebut tidak selalu ada pada setiap waktu.

Tabel 5. 19 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Bersama untuk Kepentingan Warga

Kegiatan Bersama untuk Kepentingan Warga	1: tidak aktif	2: kurang aktif	3: cukup aktif	4: sangat aktif	Total
Kerjabakti	11	14	116	59	200
Siskamling	70	25	80	25	200
Penyuluhan	24	26	115	35	200
Peringatan hari kemerdekaan	6	9	104	81	200
Khitan massal	114	43	35	8	200

Sumber : Analisis, 2025





Gambar 5. 18 Hasil Pengukuran Keikutsertaan Masyarakat pada Kegiatan Bersama untuk Kepentingan Warga
Sumber : Analisis, 2025

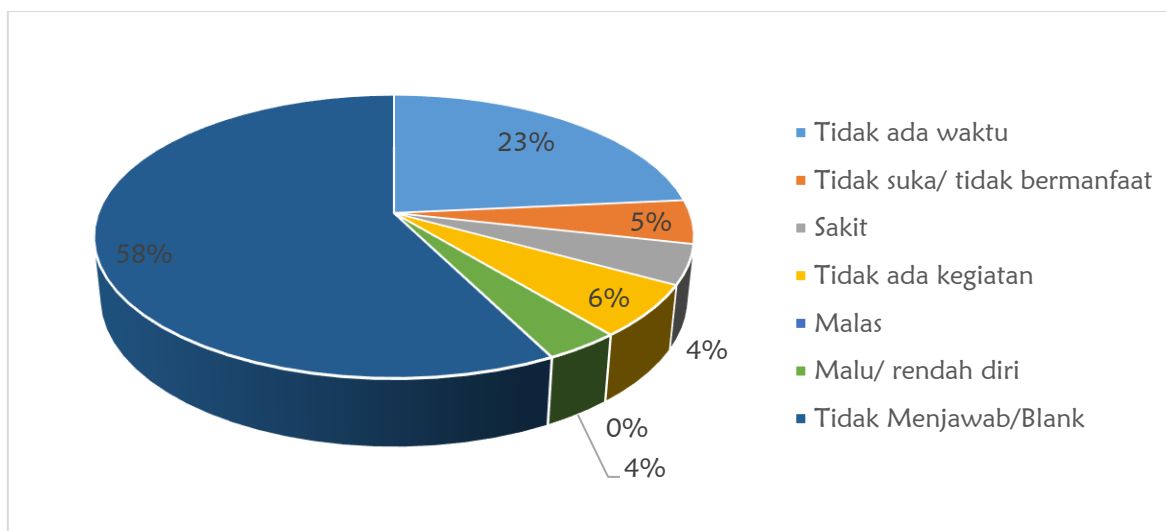
Analisis terhadap sebaran hambatan partisipasi menunjukkan bahwa kendala struktural yang terkait dengan alokasi waktu merupakan determinan primer terhadap rendahnya tingkat keikutsertaan. Fenomena ini konsisten dengan literatur yang mengaitkan waktu luang yang terbatas dengan tuntutan kehidupan modern. Selain kendala waktu, faktor motivasi internal dan penilaian utilitarian (memainkan peran signifikan. Proporsi responden yang menilai kegiatan sebagai 'tidak suka/tidak bermanfaat' mengimplikasikan perlunya evaluasi substantif terhadap desain program, relevansi materi, dan strategi komunikasi agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi audiens. Lebih lanjut, faktor kesehatan merupakan variabel eksogen yang perlu dipertimbangkan dalam merancang model partisipasi inklusif. Secara keseluruhan, data ini merekomendasikan intervensi yang berfokus pada fleksibilitas waktu dan peningkatan nilai persepsian dari kegiatan, daripada hanya mengatasi kendala psikologis yang relatif minor.

Tabel 5. 20 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Bersama untuk Kepentingan Warga

Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Bersama untuk Kepentingan Warga	Jumlah
Tidak ada waktu	47
Tidak suka/ tidak bermanfaat	10
Sakit	9
Tidak ada kegiatan	12
Malas	0
Malu/ rendah diri	7
Tidak Menjawab/Blank	115
Total	200

Sumber : Analisis, 2025





Gambar 5. 19 Persentase Alasan Tidak Mengikuti Kegiatan Bersama untuk Kepentingan Warga
Sumber : Analisis, 2025

D. Kepercayaan Sosial

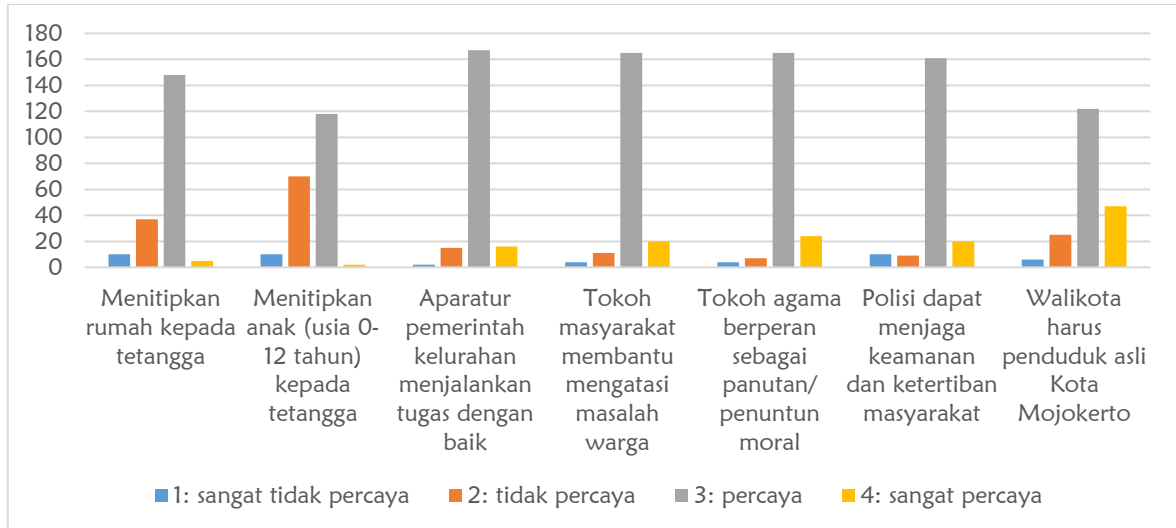
Kepercayaan sosial merupakan keyakinan pada kejujuran, integritas, dan dapat percaya pada orang lain. Hasil penelitian menunjukkan pola konsisten di mana kepercayaan moderat (kategori 3: percaya) mendominasi secara absolut di hampir semua indikator yang diukur. Secara keseluruhan, temuan menyimpulkan bahwa masyarakat cenderung mengadopsi sikap kepercayaan yang pragmatis dan terkendali terhadap aktor publik, sementara keputusan untuk menaruh kepercayaan dalam konteks risiko pribadi masih dibatasi oleh kekhawatiran yang cukup besar.

Tabel 5. 21 Hasil Pengukuran Komponen Kepercayaan Sosial

Kepercayaan Sosial	1: sangat tidak percaya	2: tidak percaya	3: percaya	4: sangat percaya	Total
Menitipkan rumah kepada tetangga	10	37	148	5	200
Menitipkan anak (usia 0-12 tahun) kepada tetangga	10	70	118	2	200
Aparatur pemerintah kelurahan menjalankan tugas dengan baik	2	15	167	16	200
Tokoh masyarakat membantu mengatasi masalah warga	4	11	165	20	200
Tokoh agama berperan sebagai panutan/ penuntun moral	4	7	165	24	200
Polisi dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat	10	9	161	20	200
Walikota harus penduduk asli Kota Mojokerto	6	25	122	47	200

Sumber : Analisis, 2025





Gambar 5. 20 Hasil Pengukuran Komponen Kepercayaan Sosial
Sumber : Analisis, 2025

5.3.2 Dimensi Inklusi Sosial

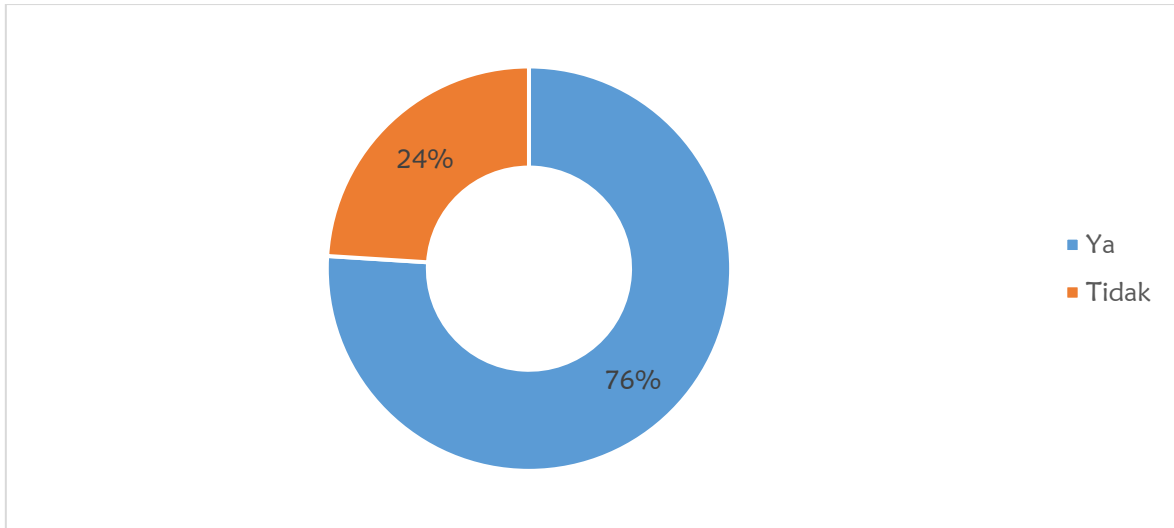
Pada bagian awal pengukuran, dilakukan identifikasi terhadap pengalaman masyarakat berinteraksi dengan masyarakat berbeda suku dan agama mayoritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 76% responden menyatakan pernah berinteraksi dengan masyarakat berbeda suku dan agama mayoritas, dengan 49% pernah membantu penyelenggaraan kegiatan agama yang berbeda di wilayah tempat tinggal. Hal ini sejalan dengan karakteristik masyarakat perkotaan yang bersifat heterogen sehingga berpeluang besar saling berinteraksi lintas suku dan agama. Identifikasi pengalaman masyarakat berinteraksi dengan masyarakat berbeda suku dan agama mayoritas penting karena akan menjadi dasar yang mempengaruhi jawaban responden pada penilaian di setiap komponen.

Tabel 5. 22 Persentase Interaksi Responden dengan Beda Suku dan Agama

Interaksi Responden dengan Beda Suku dan Agama	Jumlah
Ya	152
Tidak	48
Total	200

Sumber : Analisis, 2025



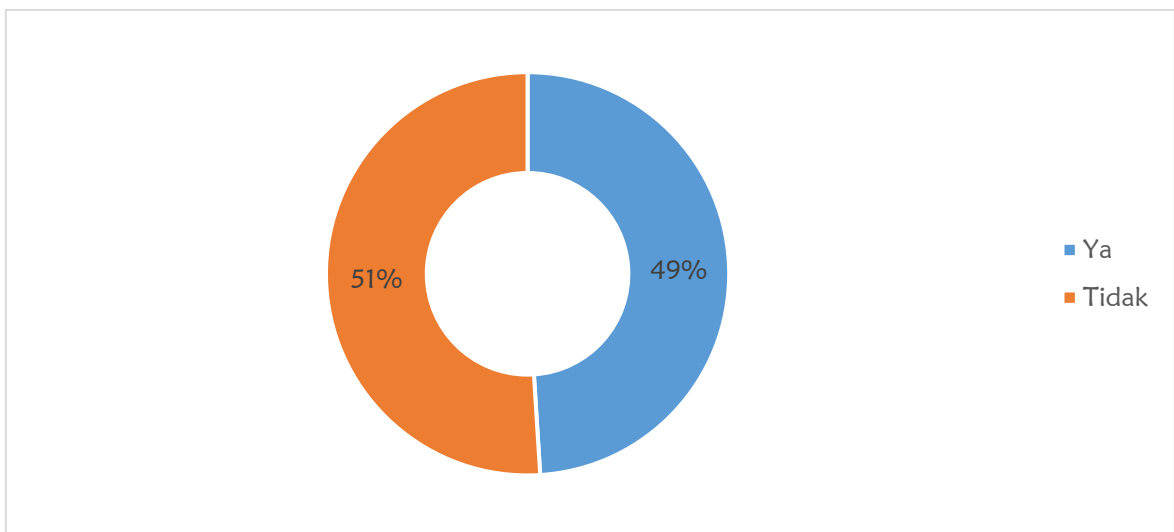


Gambar 5. 21 Persentase Interaksi Responden dengan Beda Suku dan Agama
Sumber : Analisis, 2025

Tabel 5. 23 Persentase Responden Membantu Penyelenggaraan Kegiatan Agama yang Berbeda di Wilayah Tempat Tinggal

Interaksi Responden dengan Beda Suku dan Agama		Jumlah
Ya		98
Tidak		102
Total		200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 22 Persentase Responden Membantu Penyelenggaraan Kegiatan Agama yang Berbeda di Wilayah Tempat Tinggal
Sumber : Analisis, 2025

A. Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial Budaya

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap perbedaan sosial budaya relatif tinggi di semua indikator. Toleransi interpersonal dan penerimaan terhadap keragaman suku dan agama telah menjadi norma sosial yang mapan. Kegiatan agama suku lain di lingkungan juga menunjukkan dominasi 'Setuju' (3) yang kuat. Isu yang melibatkan figur otoritas (Pemimpin dari suku/ agama berbeda) menunjukkan tingkat

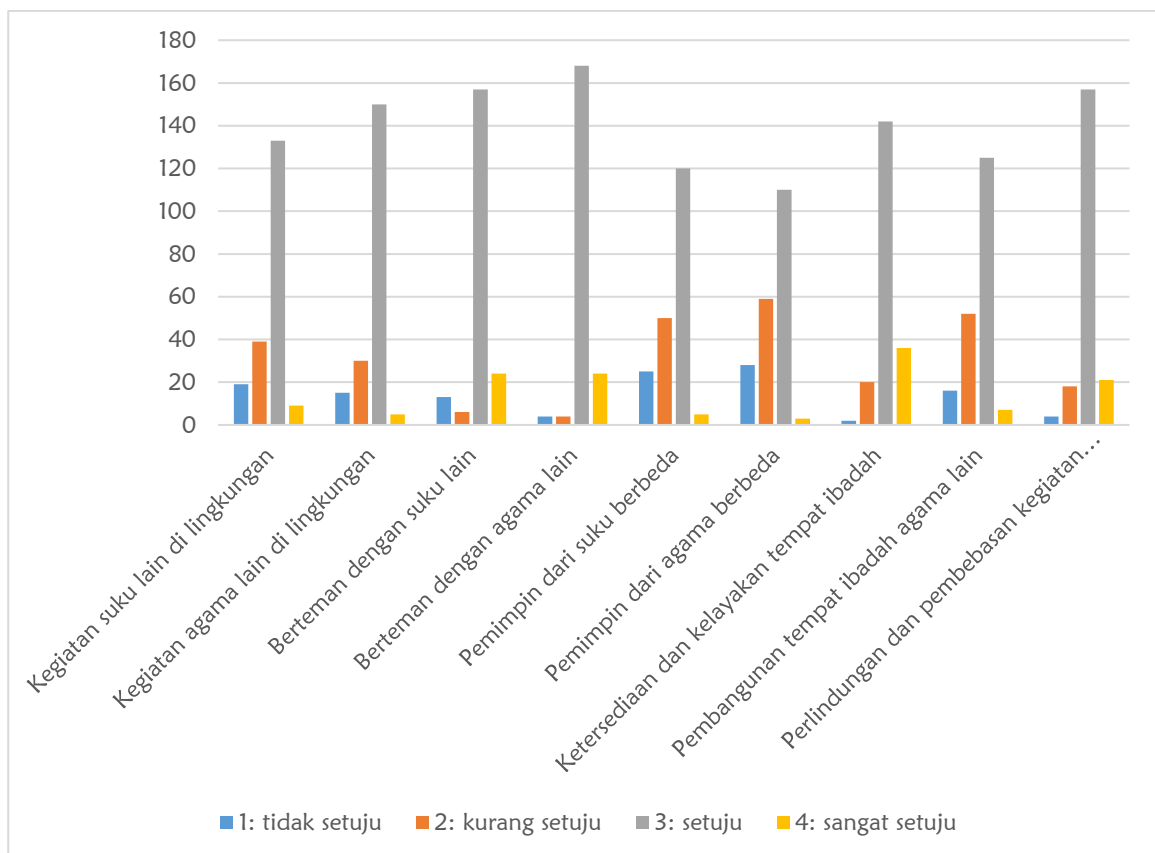


'Tidak Setuju' (1) dan 'Kurang Setuju' (2) yang relatif lebih tinggi dibandingkan dimensi pertemanan biasa. Namun, dimensi terkait Ketersediaan dan kelayakan tempat ibadah, Pembangunan tempat ibadah, dan Perlindungan dan pembebasan kegiatan ibadah tetap didominasi oleh respons 'Setuju' (3), mengindikasikan adanya penerimaan yang luas terhadap hak beribadah minoritas, meskipun ada sedikit hambatan yang lebih besar pada penerimaan kepemimpinan minoritas.

Tabel 5. 24 Hasil Pengukuran Komponen Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial Budaya

Perbedaan Sosial Budaya	1: tidak setuju	2: kurang setuju	3: setuju	4: sangat setuju	Total
Kegiatan suku lain di lingkungan	19	39	133	9	200
Kegiatan agama lain di lingkungan	15	30	150	5	200
Berteman dengan suku lain	13	6	157	24	200
Berteman dengan agama lain	4	4	168	24	200
Pemimpin dari suku berbeda	25	50	120	5	200
Pemimpin dari agama berbeda	28	59	110	3	200
Ketersediaan dan kelayakan tempat ibadah	2	20	142	36	200
Pembangunan tempat ibadah agama lain	16	52	125	7	200
Perlindungan dan pembebasan kegiatan ibadah	4	18	157	21	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 23 Hasil Pengukuran Komponen Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial Budaya

Sumber : Analisis, 2025



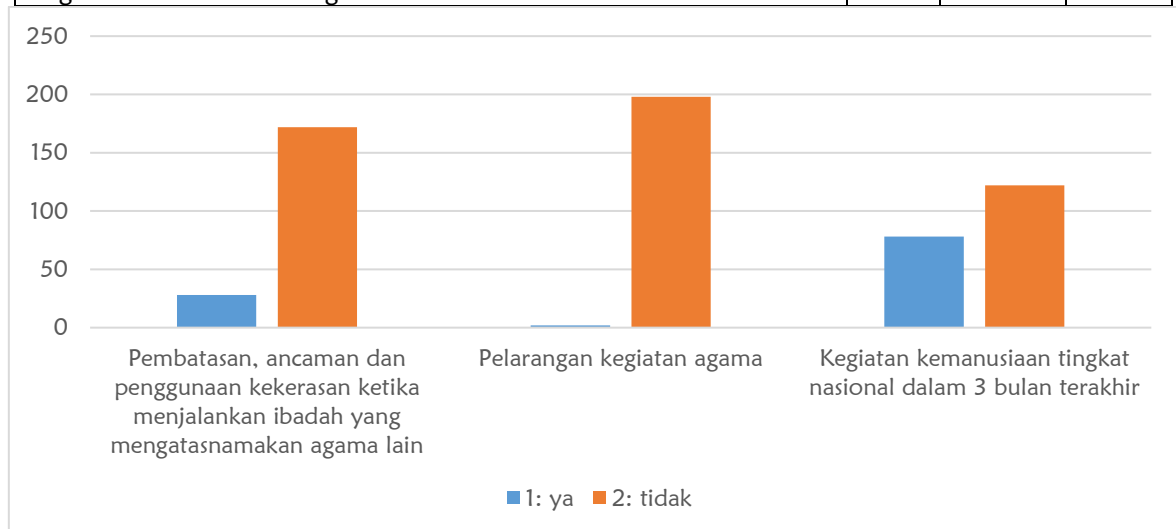
B. Kesetaraan

Mayoritas masyarakat tidak pernah atau tidak mempunyai pengalaman diskriminasi atau perundungan gender, ras dan etnis, maupun kelompok rentan baik di lingkungan kerja, sekolah, ataupun pada kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kesetaraan sudah baik. Masyarakat minoritas dan mayoritas saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun angkanya rendah, adanya laporan 'Ya' mengindikasikan bahwa diskriminasi tetap merupakan masalah nyata bagi sebagian kecil populasi. Tingkat laporan yang rendah perlu diinterpretasikan secara hati-hati, karena mungkin juga mencerminkan fenomena *underreporting* atau kurangnya kesadaran akan definisi diskriminasi struktural.

Tabel 5. 25 Hasil Pengukuran Komponen Diskriminasi

Diskriminasi	1: ya	2: tidak	Total
Pembatasan, ancaman dan penggunaan kekerasan ketika menjalankan ibadah yang mengatasnamakan agama lain	28	172	200
Pelarangan kegiatan agama	2	198	200
Kegiatan kemanusiaan tingkat nasional dalam 3 bulan terakhir	78	122	200



Gambar 5. 24 Hasil Pengukuran Komponen Diskriminasi

Sumber : Analisis, 2025

C. Dukungan Sosial bagi Minoritas

Secara keseluruhan, situasi cenderung kondusif terkait kebebasan beragama dengan memberikan dukungan sosial bagi minoritas. Insiden negatif (kekerasan, ancaman, atau pelarangan kegiatan agama) adalah insiden yang sangat jarang terjadi dilaporkan oleh mayoritas responden.

Di sisi lain, tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam kegiatan kemanusiaan menunjukkan angka yang moderat, dengan ruang yang masih luas untuk peningkatan

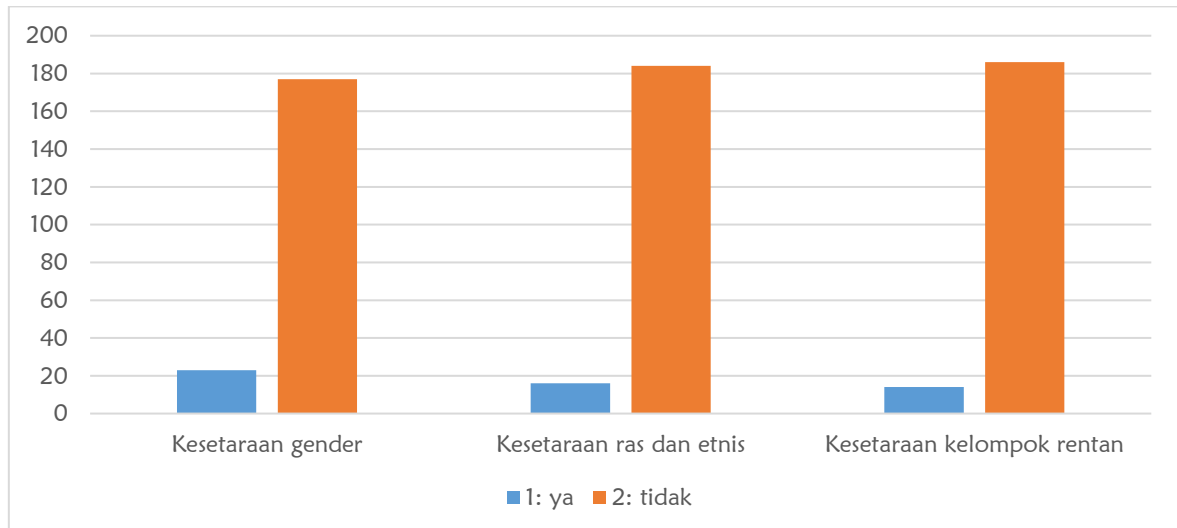


keterlibatan. Keterlibatan aktif dalam kegiatan kemanusiaan adalah bentuk partisipasi sosial yang umum bagi sepertiga populasi, meskipun mayoritas tetap tidak terlibat dalam rentang waktu yang singkat (3 bulan).

Tabel 5. 26 Hasil Pengukuran Komponen Dukungan Sosial bagi Minoritas

Dukungan Sosial bagi Minoritas	1: ya	2: tidak	Total
Kesetaraan gender	23	177	200
Kesetaraan ras dan etnis	16	184	200
Kesetaraan kelompok rentan	14	186	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 25 Hasil Pengukuran Komponen Dukungan Sosial bagi Minoritas

Sumber : Analisis, 2025

5.3.3 Dimensi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil

A. Kesadaran Hukum dan Politik

1. Kepemilikan Identitas Dasar

Mayoritas responden memiliki anak usia 0-17 tahun dalam rumah tangga dengan jumlah 1-3 anak. Sebagian besar responden menyatakan bahwa anak usia 0-17 tahun di rumah tangganya sudah memiliki akta kelahiran.

2. Partisipasi dalam PEMILU Tahun 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi yang sangat tinggi dan konsisten dalam semua jenis Pemilu yang disurvei, mencerminkan suksesnya mobilisasi pemilih dalam proses demokrasi di Indonesia. Pemilih tidak membedakan secara signifikan antara tingkat legislatif yang berbeda. Tingkat partisipasi juga tetap tinggi dan konsisten untuk pemilihan eksekutif, yaitu Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tingkat partisipasi yang seragam tinggi di semua tingkatan, dari lokal (DPRD Kota/Walikota) hingga nasional

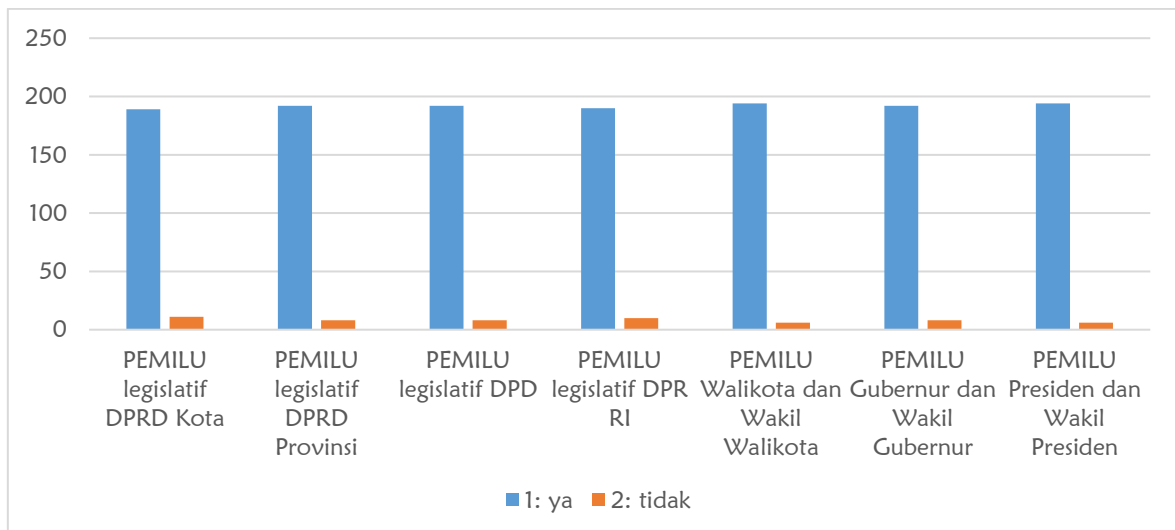


(Presiden/DPR RI), menunjukkan bahwa pemilih memandang penting setiap surat suara dan tidak terjadi *voter fatigue* yang signifikan antar jenis pemilihan. Tingginya angka partisipasi "Ya" (biru) yang mendominasi grafik adalah indikator kuat dari kesehatan partisipasi politik dan kesadaran sipil dalam populasi sampel yang disurvei.

Tabel 5. 27 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada PEMILU 2024

PEMILU 2024	1: ya	2: tidak	Total
PEMILU legislatif DPRD Kota	189	11	200
PEMILU legislatif DPRD Provinsi	192	8	200
PEMILU legislatif DPD	192	8	200
PEMILU legislatif DPR RI	190	10	200
PEMILU Walikota dan Wakil Walikota	194	6	200
PEMILU Gubernur dan Wakil Gubernur	192	8	200
PEMILU Presiden dan Wakil Presiden	194	6	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 26 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada PEMILU 2024

Sumber : Analisis, 2025

Analisis lebih lanjut menunjukkan faktor-faktor yang mendorong golongan putih atau ketidakpartisipasian pemilih dalam Pemilu. Faktor dominan yang menyebabkan ketidakpartisipasian adalah ketiadaan calon yang sesuai (tidak ada calon yang sesuai). Angka ini secara signifikan menyoroti adanya krisis representasi atau ketidakpuasan ideologis pemilih terhadap pilihan kandidat yang tersedia, mengindikasikan bahwa motivasi utama untuk tidak memilih adalah alasan politik dan kualitas calon. Dua faktor yang terkait dengan logistik dan motivasi pribadi menempati posisi kedua. KTP tidak sesuai tempat juga menjadi alasan. Ini adalah hambatan struktural yang penting, menunjukkan kesulitan teknis dalam pemindahan atau verifikasi data pemilih

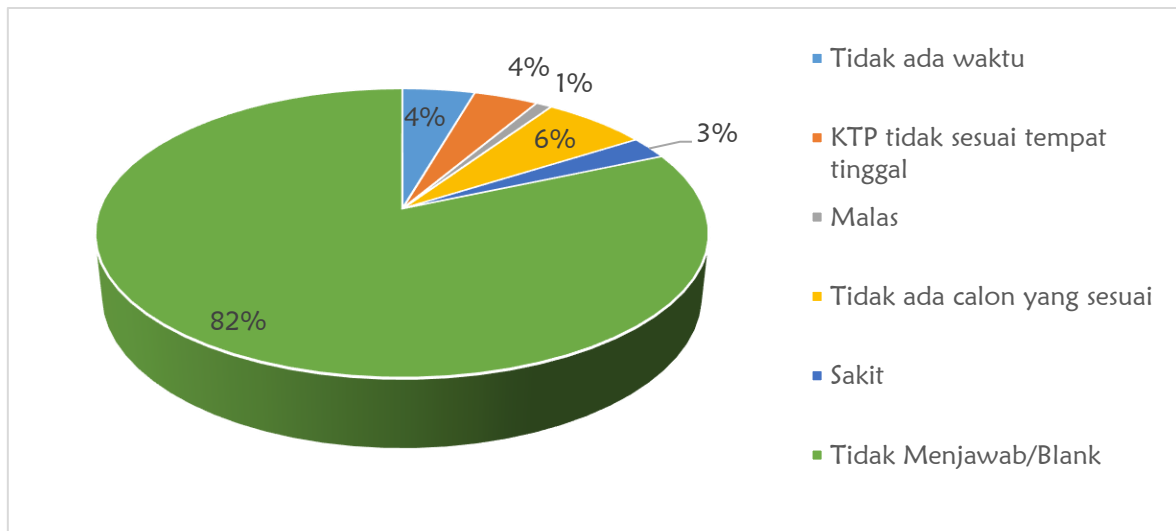


di lokasi yang berbeda dari tempat tinggal resmi mereka, sebuah masalah administrasi kependudukan yang memerlukan perbaikan regulasi. Tidak ada waktu juga menjadi alasan. Alasan ini lebih bersifat personal dan terkait dengan kendala waktu, pekerjaan, atau prioritas sehari-hari responden. Faktor Sakit dan Malas (5,9%) merupakan persentase yang lebih kecil, menunjukkan bahwa alasan kesehatan dan apatisme murni merupakan penyebab minoritas dari ketidakpartisipasian PEMILU.

Tabel 5. 28 Alasan tidak Menggunakan Hak Pilih pada PEMILU 2024

Alasan tidak Menggunakan Hak Pilih pada PEMILU 2024	Jumlah
Tidak ada waktu	9
KTP tidak sesuai tempat tinggal	8
Malas	2
Tidak ada calon yang sesuai	13
Sakit	5
Tidak Menjawab/Blank	163
Total	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 27 Alasan tidak Menggunakan Hak Pilih pada PEMILU 2024

Sumber : Analisis, 2025

B. Organisasi Masyarakat Sipil

1. Keanggotaan dalam Organisasi Massa

Pada penelitian, jenis organisasi yang disepakati adalah organisasi yang erat dengan kehidupan dan budaya masyarakat. Diagram secara jelas menunjukkan pola keanggotaan yang sangat terfragmentasi dan rendah di antara Ormas-Ormas yang disurvei. Untuk hampir semua Ormas yang tercantum, termasuk Muhammadiyah, HIPMI, HMI, Banser, Ansor, dan Pemuda Pancasila, mayoritas responden secara mutlak menyatakan tidak

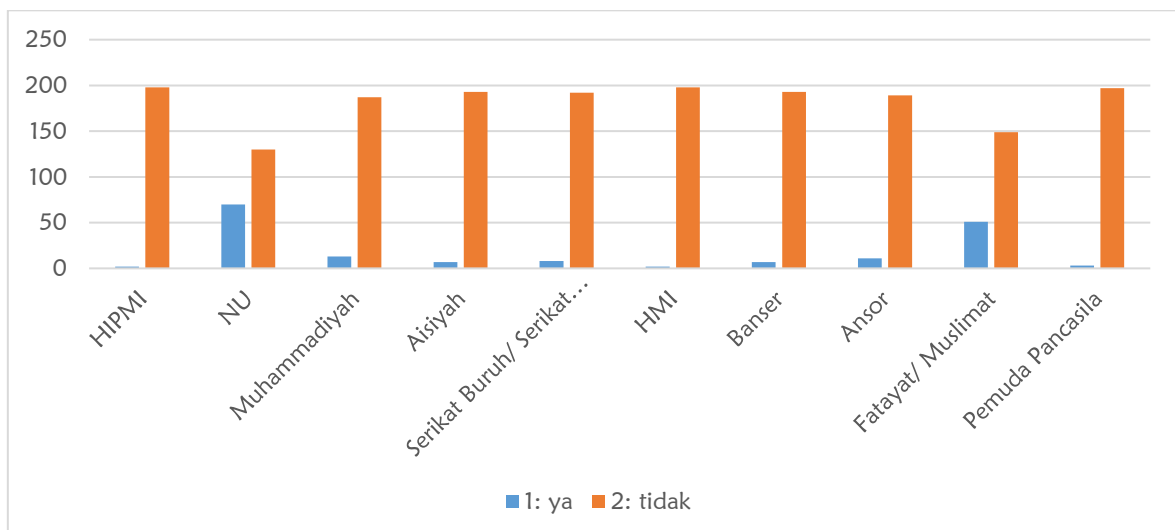


menjadi anggota. Tingkat keanggotaan "Ya" (biru) pada kelompok-kelompok ini berada di bawah 5%, menunjukkan bahwa penetrasi keanggotaan formal sangat terbatas di tingkat populasi umum. Nahdlatul Ulama (NU) dan sayap perempuannya, Fatayat/ Muslimat, menjadi pengecualian yang paling menonjol dari tren umum ini. NU mencatatkan persentase keanggotaan "Ya" tertinggi, yakni sekitar 30-35% dari responden. Demikian pula, Fatayat/ Muslimat menunjukkan tingkat keanggotaan "Ya" yang substansial, sekitar 25%. Kontras yang tajam antara NU/ Fatayat dan Ormas lain, seperti Aisyiyah (sekitar 2%) dan Serikat Buruh (sekitar 3%), menggarisbawahi dominasi Nahdlatul Ulama dalam menarik dan mempertahankan keanggotaan formal dari segi jumlah di antara populasi sampel. Data ini menegaskan posisi NU sebagai organisasi massa berbasis agama dengan daya jangkauan keanggotaan terluas, mencerminkan akar kelembagaannya yang mendalam di masyarakat.

Tabel 5. 29 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Organisasi Massa

Organisasi Massa	1: ya	2: tidak	Total
HIPMI	2	198	200
NU	70	130	200
Muhammadiyah	13	187	200
Aisyiyah	7	193	200
Serikat Buruh/ Serikat Kerja/ Tani	8	192	200
HMI	2	198	200
Banser	7	193	200
Ansor	11	189	200
Fatayat/ Muslimat	51	149	200
Pemuda Pancasila	3	197	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 28 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Organisasi Massa

Sumber : Analisis, 2025



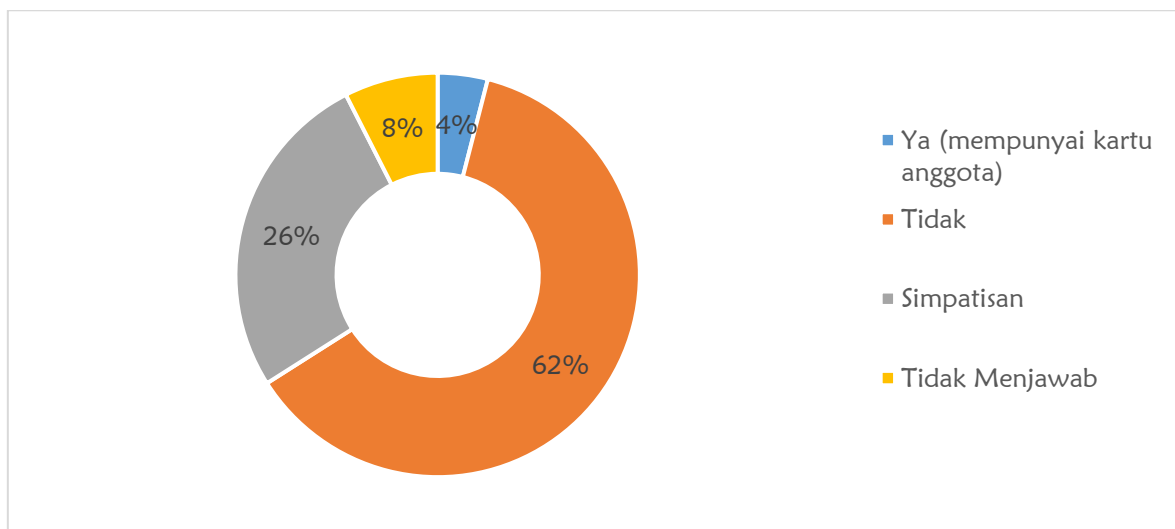
2. Keanggotaan dalam Partai Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam partai politik sangat rendah. Sejumlah 62% masyarakat tidak mengikuti organisasi partai politik. Data ini mengindikasikan bahwa dua pertiga populasi sampel tidak memiliki afiliasi formal atau simpati aktif terhadap partai politik. Kelompok Simpatisan merupakan kategori terbesar kedua, mencakup 26% dari total responden. Tingginya angka ini menunjukkan adanya basis dukungan dan pengikut yang substansial, meskipun mereka tidak memegang kartu keanggotaan resmi. Simpatisan seringkali menjadi *swing-voters* atau kelompok yang dapat dimobilisasi berdasarkan isu tertentu, sehingga relevan dalam analisis kekuatan sosial-politik organisasi. Sebaliknya, persentase responden yang teridentifikasi sebagai Anggota Resmi (memiliki kartu anggota) adalah yang paling kecil, hanya sebesar 4%. Angka yang rendah ini menyoroti bahwa walaupun partai politik memiliki basis simpatisan yang luas, upaya untuk mengubah simpati menjadi keanggotaan formal yang terstruktur masih menghadapi tantangan signifikan.

Tabel 5. 30 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Organisasi Massa

Partisipasi Masyarakat pada Organisasi Massa	Jumlah
Ya (mempunyai kartu anggota)	8
Tidak	124
Simpatisan	53
Tidak Menjawab	15
Total	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 29 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Organisasi Massa

Sumber : Analisis, 2025



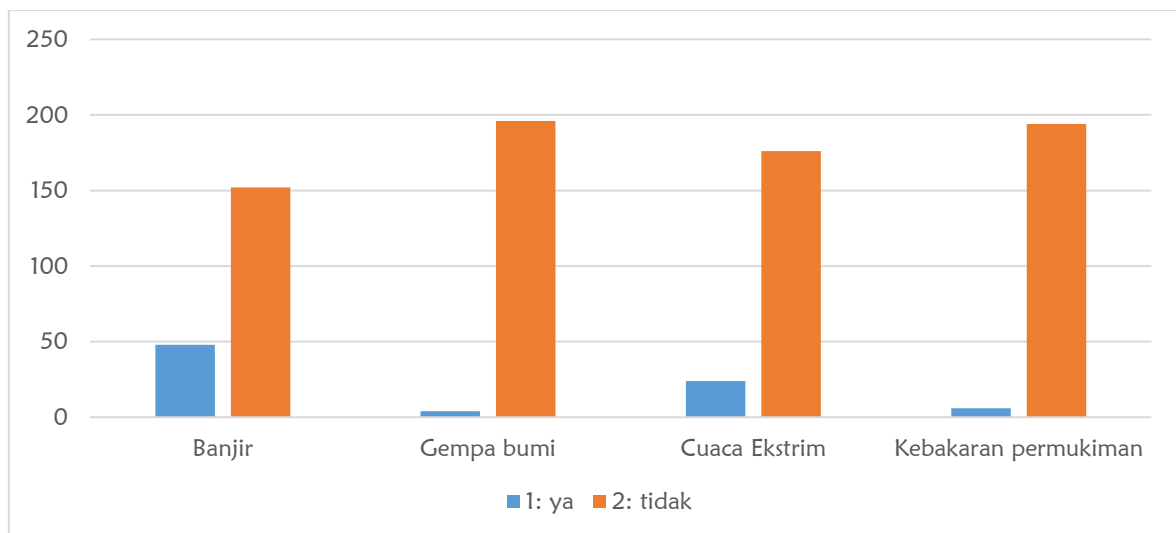
C. Mitigasi Risiko Sosial

Pada bagian awal penilaian, dilakukan terlebih dahulu identifikasi terkait bencana alam yang pernah dialami masyarakat dalam tiga tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana yang paling sering dialami masyarakat adalah bencana yang sesuai dengan karakteristik perkotaan yaitu bencana banjir. Karakteristik topografi Kota Mojokerto berupa cekungan membuat Kota Mojokerto rawan bencana banjir kiriman dari kabupaten lain di sekitar Kota Mojokerto. Temuan ini secara tegas menetapkan banjir sebagai isu mitigasi bencana paling nyata, kritis, dan sering terjadi yang dihadapi Kota Mojokerto.

Tabel 5. 31 Bencana Alam yang Pernah Dialami Masyarakat dalam Tiga Tahun Terakhir

Bencana Alam	1: ya	2: tidak	Total
Banjir	48	152	200
Gempa bumi	4	196	200
Cuaca Ekstrim	24	176	200
Kebakaran permukiman	6	194	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 30 Bencana Alam yang Pernah Dialami Masyarakat dalam Tiga Tahun Terakhir

Sumber : Analisis, 2025

Kemudian terhadap pengalaman masyarakat menghadapi bencana tersebut dilakukan penilaian terhadap setiap indikator penyusun mitigasi risiko sosial. Proses identifikasi tersebut pada konteks survei dilakukan untuk membangkitkan memori masyarakat terhadap kondisi mitigasi bencana yang pernah dirasakan. Sehingga penilaian pada komponen mitigasi risiko sosial dapat berjalan valid dan sesuai kondisi di lapangan.



1. Ketersediaan Fasilitas/ Upaya Antisipasi/ Mitigasi Bencana Alam

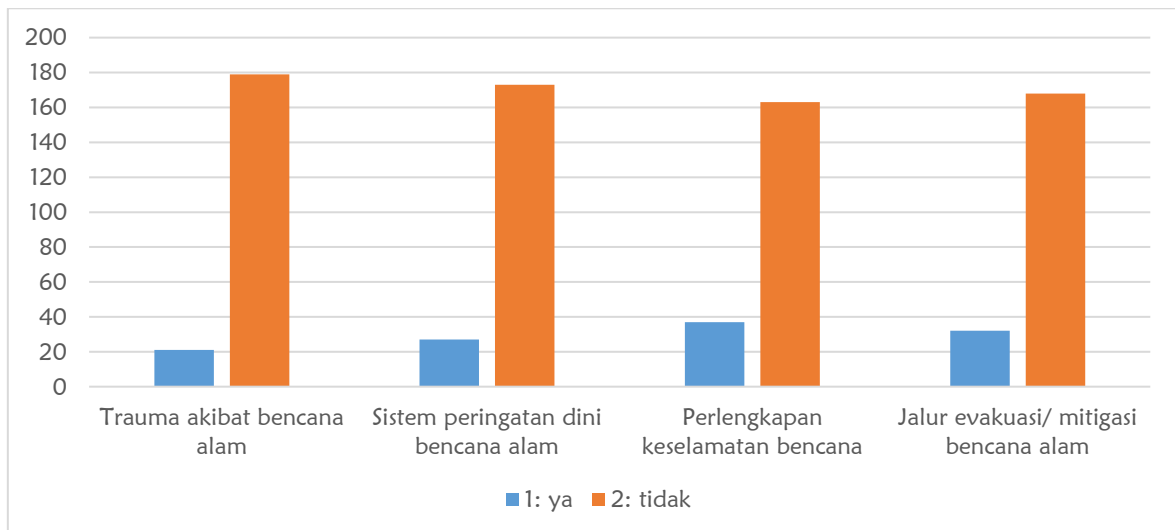
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap setiap indikator penyusun mitigasi risiko sosial memiliki nilai yang kecil. 89% warga tidak mengalami trauma akibat bencana alam. Kondisi ini sangat positif, karena dapat disimpulkan bahwa tingkat bencana yang pernah dirasakan tidak berdampak besar atau tidak parah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menyatakan bahwa ketersediaan sistem peringatan dini bencana alam, perlengkapan keselamatan bencana, dan jalur evakuasi/ mitigasi bencana alam tidak tersedia. Sehingga diperlukan pengadaan fasilitas mitigasi bencana seperti *Early Warning System* banjir yang diletakkan di dekat sungai, APAR untuk perlengkapan keselamatan bencana kebakaran permukiman, dan rambu evakuasi bencana baik di permukiman maupun di gedung perkantoran.

Tabel 5. 32 Ketersediaan Fasilitas/ Upaya Antisipasi/ Mitigasi Bencana Alam

Bencana Alam	1: ya	2: tidak	Total
Trauma akibat bencana alam	21	179	200
Sistem peringatan dini bencana alam	27	173	200
Perlengkapan keselamatan bencana	37	163	200
Jalur evakuasi/ mitigasi bencana alam	32	168	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 31 Ketersediaan Fasilitas/ Upaya Antisipasi/ Mitigasi Bencana Alam

Sumber : Analisis, 2025

Secara lebih lanjut data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat hanya sebesar 25% pada kegiatan pelatihan/ simulasi terhadap penyelamatan bencana alam. Sehingga, sangat diperlukan pelatihan kebencanaan baik oleh Satpol PP maupun BPBD. Responden berpendapat bahwa kegiatan pelatihan/

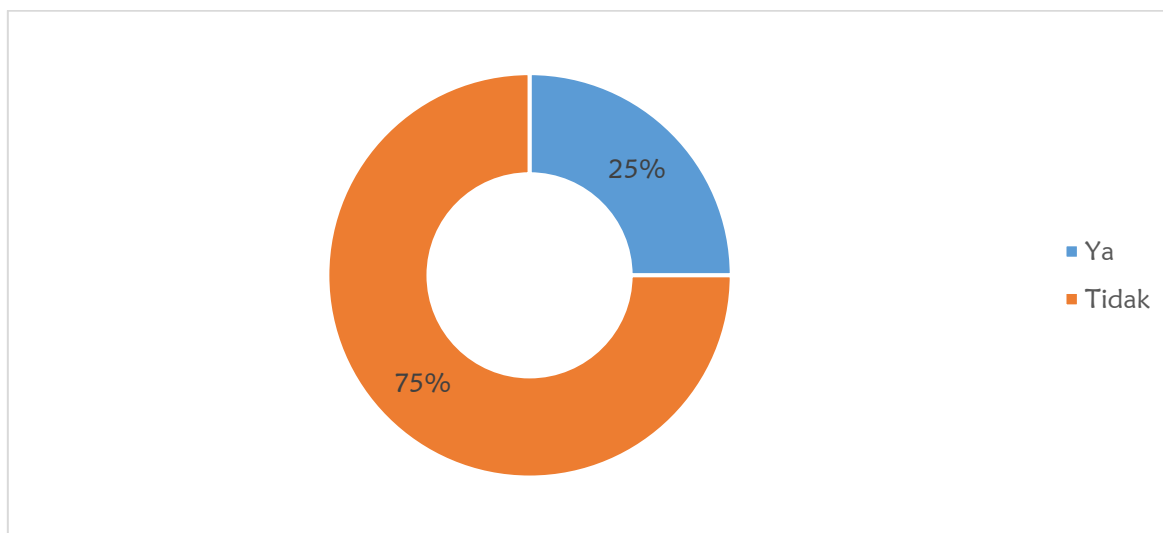


simulasi yang diikuti mayoritas sesuai dengan bencana yang terjadi yaitu banjir.

Tabel 5. 33 Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pelatihan/ Simulasi terhadap Penyelamatan Bencana Alam

Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pelatihan/ Simulasi terhadap Penyelamatan Bencana Alam	Jumlah
Ya	50
Tidak	150
Total	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 32 Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pelatihan/ Simulasi terhadap Penyelamatan Bencana Alam

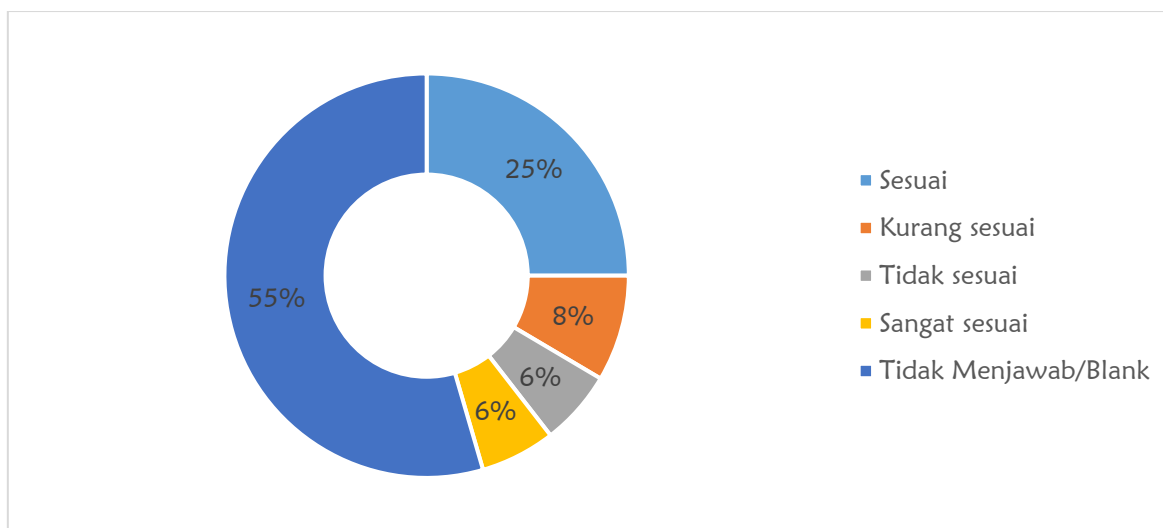
Sumber : Analisis, 2025

Tabel 5. 34 Kesesuaian Pelatihan/ Simulasi dengan Bencana yang Terjadi

Kesesuaian Pelatihan/ Simulasi dengan Bencana yang Terjadi	Jumlah
Sesuai	50
Kurang sesuai	17
Tidak sesuai	12
Sangat sesuai	12
Tidak Menjawab/Blank	109
Total	200

Sumber : Analisis, 2025





Gambar 5. 33 Kesesuaian Pelatihan/ Simulasi dengan Bencana yang Terjadi
Sumber : Analisis, 2025

2. Penyelesaian Sengketa

Pada tahap awal pengukuran ditanyakan terlebih dahulu kepada responden apakah ada anggota rumah tangga yang mengalami kejadian atau permasalahan sosial atau permasalahan berbagai jenis kasus hukum yang melibatkan penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dalam setahun terakhir. Data menunjukkan secara konsisten bahwa mayoritas mutlak responden tidak mengalami kejadian yang melibatkan lembaga penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian yang sering dialami masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas dan pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi hukum paling umum yang dialami responden adalah terkait isu lalu lintas, bukan kasus pidana atau perdata yang berat. Untuk semua kasus lainnya, persentase *Ya* sangat rendah, di bawah 5%, mengindikasikan bahwa interaksi formal dengan sistem peradilan adalah kejadian yang sangat jarang terjadi selama periode setahun.

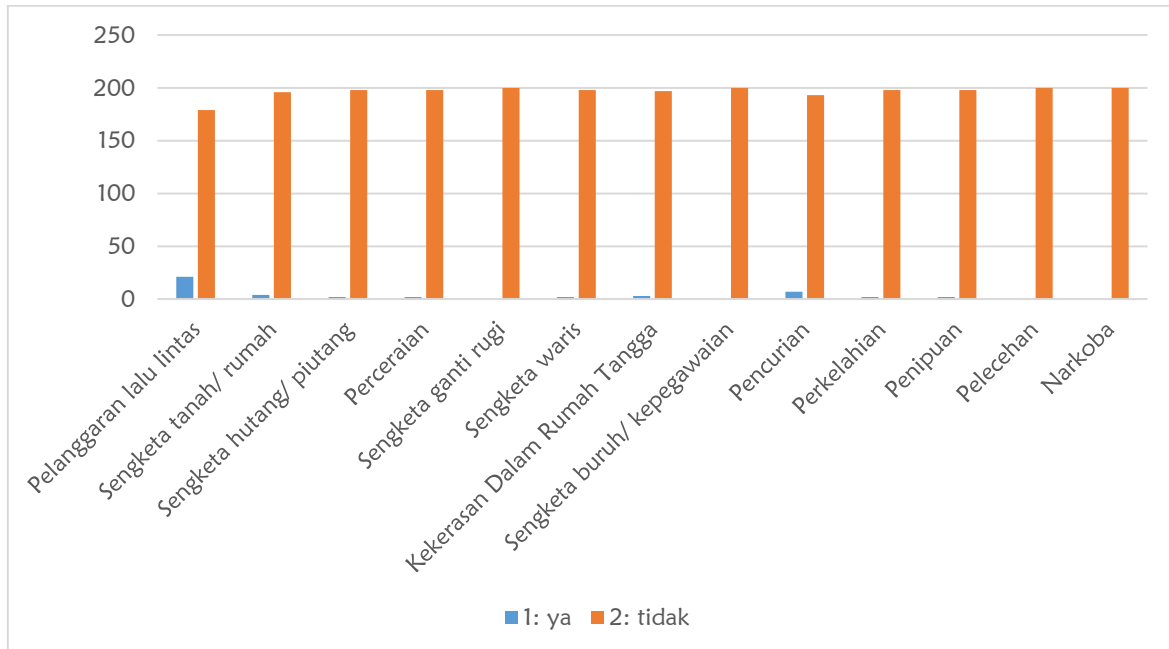
Tabel 5. 35 Kejadian yang Melibatkan Penegak Hukum

Kejadian yang Melibatkan Penegak Hukum	1: ya	2: tidak	Total
Pelanggaran lalu lintas	21	179	200
Sengketa tanah/ rumah	4	196	200
Sengketa hutang/ piutang	2	198	200
Perceraian	2	198	200
Sengketa ganti rugi	0	200	200
Sengketa waris	2	198	200
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3	197	200
Sengketa buruh/ kepegawaian	0	200	200
Pencurian	7	193	200
Perkelahian	2	198	200



Kejadian yang Melibatkan Penegak Hukum	1: ya	2: tidak	Total
Penipuan	2	198	200
Pelecehan	0	200	200
Narkoba	0	200	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 34 Kejadian yang Melibatkan Penegak Hukum

Sumber : Analisis, 2025

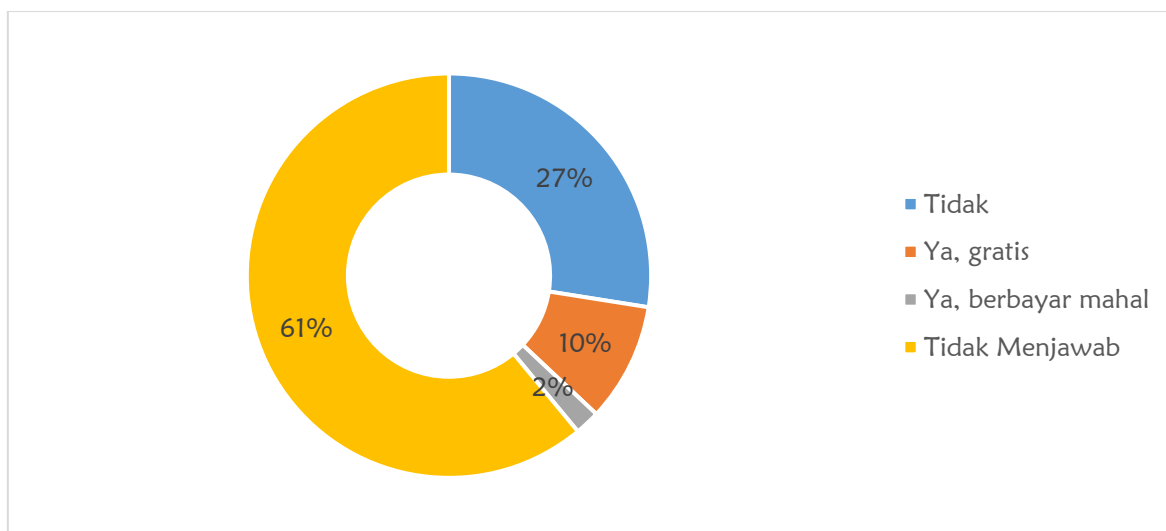
Secara lebih lanjut data menunjukkan bahwa dalam proses penyelesaian masalah, 10% responden menerima bantuan hukum secara gratis, 2% responden menerima bantuan hukum membayar mahal, dan 27% responden tidak menerima bantuan hukum. Di tingkat kelurahan telah diluncurkan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Tanggal 16 September 2025 yang memfasilitasi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Hal ini menunjukkan perhatian yang luar biasa dari Pemerintah Kota Mojokerto kepada masyarakat, sehingga diperlukan sosialisasi lebih aktif mengenai program POSBAKUM agar tepat sasaran. Menurut responden, penyelesaian permasalahan dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan pihak ketiga sebagai penengah.

Tabel 5. 36 Bantuan Masalah Hukum

Menerima Bantuan Masalah Hukum	Jumlah
Tidak	55
Ya, gratis	19
Ya, membayar mahal	4
Tidak Menjawab	122
Total	200

Sumber : Analisis, 2025





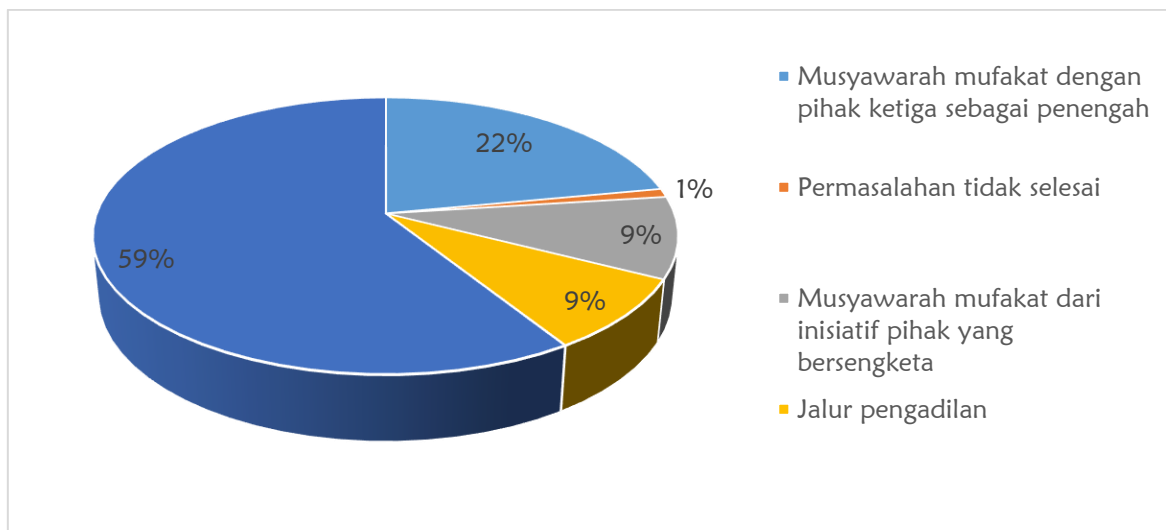
Gambar 5. 35 Bantuan Masalah Hukum

Sumber : Analisis, 2025

Tabel 5. 37 Penyelesaian Permasalahan

Penyelesaian Permasalahan	Jumlah
Musyawarah mufakat dengan pihak ketiga sebagai penengah	44
Permasalahan tidak selesai	2
Musyawarah mufakat dari inisiatif pihak yang bersengketa	19
Jalur pengadilan	17
Tidak Menjawab	118
Total	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 36 Penyelesaian Permasalahan

Sumber : Analisis, 2025

Selanjutnya terhadap berbagai pengalaman jenis masalah yang pernah dihadapi tersebut, masyarakat menilai aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, dan TNI), pemerintah (satpol PP, Pemerintah Kelurahan, dan Pemerintah Kabupaten), dan tokoh masyarakat/ agama berperan aktif dalam membantu mengatasi masalah yang dihadapi. Lembaga yang paling dominan dinilai Aktif (3) adalah Pemerintah

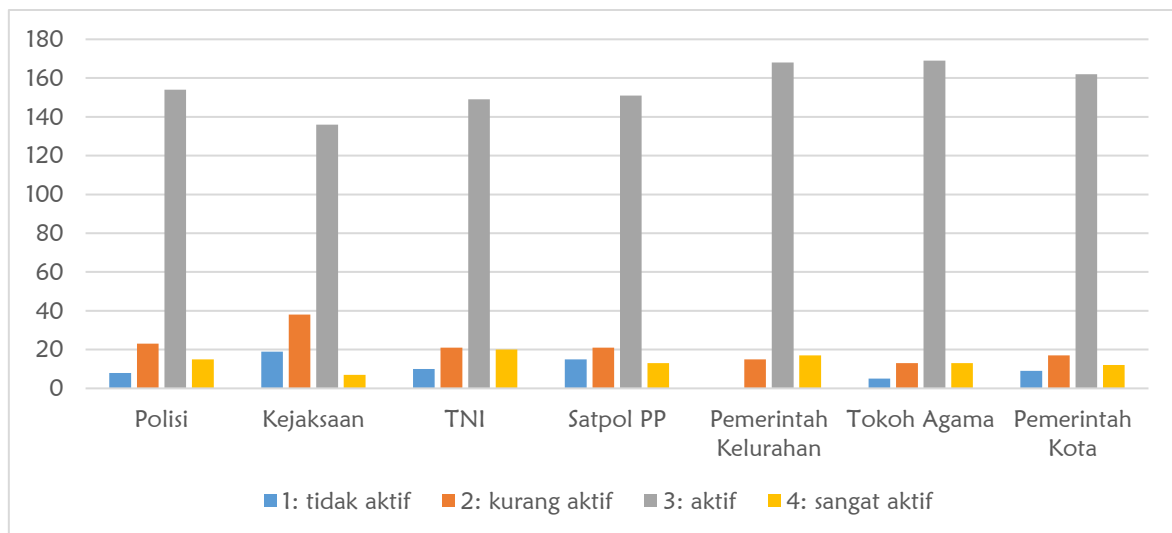


Kelurahan, Tokoh Agama, dan Pemerintah Kota. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap peran aktif aparat pemerintah di tingkat paling dasar (Kelurahan/Kota) dan Tokoh Agama dalam penyelesaian masalah. Lembaga penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, TNI, Satpol PP) juga mayoritas dinilai Aktif (3), tetapi dengan persentase yang sedikit lebih rendah. Proporsi yang menilai lembaga-lembaga ini Kurang Aktif (2, batang merah) cenderung lebih tinggi dibandingkan Pemerintah Kelurahan atau Tokoh Agama.

Tabel 5. 38 Peranan Aparat dan Tokoh dalam Penyelesaian Masalah

Aparat dan Tokoh	1: tidak aktif	2: kurang aktif	3: aktif	4: sangat aktif	Total
Polisi	8	23	154	15	200
Kejaksaan	19	38	136	7	200
TNI	10	21	149	20	200
Satpol PP	15	21	151	13	200
Pemerintah Kelurahan	0	15	168	17	200
Tokoh Agama	5	13	169	13	200
Pemerintah Kota	9	17	162	12	200

Sumber : Analisis, 2025



Gambar 5. 37 Peranan Aparat dan Tokoh dalam Penyelesaian Masalah

Sumber : Analisis, 2025

5.4 PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Adapun formulasi yang digunakan untuk menghitung skor pada setiap dimensi, sub-dimensi, dan kumulatif IPMas adalah sebagai berikut.

1. Skor indikator (A) diperoleh dari rata-rata skor jawaban indikator, dengan rentang nilai 1-4.
2. Nilai konversi (B) diperoleh dari skor indikator dibagi 4×100



3. Skor komponen (C) diperoleh dari rata-rata skor indikator, dengan rentang nilai 1-4.
4. Nilai konversi (D) diperoleh dari skor komponen dibagi 4 x 100
5. Skor dimensi (E) diperoleh dari rumus Skor Dimensi $X = R1 = \frac{\sum_{x=1}^4 (W_x X_x)}{\sum_{x=1}^4 (W_x)}$
6. Nilai konversi (F) diperoleh dari skor dimensi dibagi 4 x 100
7. Skor IPMas (G) diperoleh dari rumus $IPMas = \sqrt[3]{R1 \times R2 \times R3}$
8. Nilai konversi (H) diperoleh dari skor IPMas dibagi 4 x 100
9. Klasifikasi mutu berdasarkan pada tabel berikut

Mutu	Keterangan	Nilai Konversi
A	Sangat Baik	81-100
B	Baik	61-80
C	Cukup	41-60
D	Kurang	<40

Sumber: Febrianawati Yusup, 2018

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai IPMas sebesar 71 atau setara dengan kategori B.



SURVEY INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT (IPMAS)
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025

Tabel 5. 39 Skor Indeks IPMas

Indikator	Skor Indikator	Nilai Konversi	Mutu	Komponen	Skor Komponen	Nilai Konversi	Mutu	Dimensi	Skor Dimensi	Nilai Konversi	Mutu	Skor IPMas	Nilai Konversi	Mutu
	A	B			C	D			E	F		G	H	
Memandikan jenazah	2,70	68	B	Kerjasama sosial	2,69	67	B	Kohesi sosial	2,53	63	B	2,83	71	B
Mengubur jenazah	2,67	67	B											
Melayat jenazah	3,03	76	B											
Menggalang donasi	2,67	67	B											
Menjenguk tetangga sakit	3,01	75	B											
Membantu tetangga yang membutuhkan	2,94	74	B											
Donor darah	2,09	52	C											
Membantu tetangga yang kebakaran	2,23	56	C											
Kegiatan organisasi keagamaan	1,95	49	C	Jejaring sosial	2,11	53	C							
Kegiatan organisasi politik	1,15	29	D											
Kegiatan organisasi pendidikan	1,31	33	D											
Kegiatan organisasi lingkungan hidup	1,26	31	D											
Kegiatan organisasi ekonomi	1,16	29	D											
Kegiatan organisasi sosial	1,46	37	D											
Kegiatan organisasi olahraga	1,29	32	D											



SURVEY INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT (IPMAS)
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025

Indikator	Skor Indikator A	Nilai Konversi B	Mutu	Komponen	Skor Komponen C	Nilai Konversi D	Mutu	Dimensi	Skor Dimensi E	Nilai Konversi F	Mutu	Skor IPMas G	Nilai Konversi H	Mutu
Kegiatan keagamaan pengajian	2,94	74	B											
Kegiatan keagamaan perayaan keagamaan	3,03	76	B											
Kegiatan keagamaan haul	2,59	65	B											
Kegiatan keagamaan halal bihalal	3,02	76	B											
Kegiatan keagamaan tahlilan pekatan	2,90	73	B											
Kegiatan sosial olahraga	1,59	40	D											
Kegiatan sosial kesenian	1,42	35	D											
Kegiatan sosial arisan	2,47	62	B											
Kegiatan sosial rapat warga	2,31	58	C											
Kegiatan sosial keterampilan	1,52	38	D											
Kegiatan sosial posyandu	2,08	52	C											
Kegiatan sosial vaksinasi	2,83	71	B											
Kerjabakti	2,93	73	B	Aksi kolektif	2,41	60	C							
Siskamling	2,23	56	C											
Penyuluhan	2,20	55	C											
Peringatan hari kemerdekaan	2,91	73	B											
Khitan massal	1,43	36	D											



**SURVEY INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT (IPMAS)
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025**

Indikator	Skor Indikator A	Nilai Konversi B	Mutu	Komponen	Skor Komponen C	Nilai Konversi D	Mutu	Dimensi	Skor Dimensi E	Nilai Konversi F	Mutu	Skor IPMas G	Nilai Konversi H	Mutu
Menitipkan rumah kepada tetangga	3,01	75	B	Kepercayaan sosial	2,89	72	B							
Menitipkan anak (usia 0-12 tahun) kepada tetangga	2,89	72	B											
Aparatur pemerintah kelurahan menjalankan tugas dengan baik	2,97	74	B											
Tokoh masyarakat membantu mengatasi masalah warga	3,00	75	B											
Tokoh agama berperan sebagai panutan/ penuntun moral	3,08	77	B											
Walikota harus penduduk asli Kota Mojokerto	1,97	49	C											
Polisi dapat menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat	2,98	75	B	Penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya	3,02	76	B	Inklusi sosial	3,25	81	A			
Kegiatan suku lain di lingkungan	2,66	66	B											
Kegiatan agama lain di lingkungan	2,65	66	B											
Berteman dengan suku lain	2,87	72	B											
Berteman dengan agama lain	2,85	71	B											



SURVEY INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT (IPMAS)
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025

Indikator	Skor Indikator	Nilai Konversi	Mutu	Komponen	Skor Komponen	Nilai Konversi	Mutu	Dimensi	Skor Dimensi	Nilai Konversi	Mutu	Skor IPMas	Nilai Konversi	Mutu
	A	B			C	D			E	F		G	H	
Pembatasan, ancaman dan penggunaan kekerasan ketika menjalankan ibadah yang mengatasnamakan agama lain	3,99	100	A											
Pelarangan kegiatan agama	3,99	100	A											
Pemimpin dari suku berbeda	2,34	58	C											
Pemimpin dari agama berbeda	2,28	57	C											
Kesetaraan gender	2,65	66	B	Kesetaraan	3,29	82	A							
Diskriminasi gender	3,94	98	A											
Ketersediaan dan kelayakan tempat ibadah	3,09	77	B	Dukungan sosial bagi minoritas	3,40	85	A							
Pembangunan tempat ibadah agama lain	2,47	62	B											
Perlindungan dan pembebasan kegiatan ibadah	2,68	67	B											
Kesetaraan ras dan etnis	3,96	99	A											
Kesetaraan kelompok rentan	3,93	98	A											
Perundungan	3,98	100	A											
Kepemilikan akta	3,88	97	A	Kesadaran hukum dan politik	3,84	96	A	Pengembangan kapasitas masyarakat sipil	2,75	69	B			
PEMILU legislatif DPRD Kota	3,82	95	A											
PEMILU legislatif DPRD Provinsi	3,83	96	A											



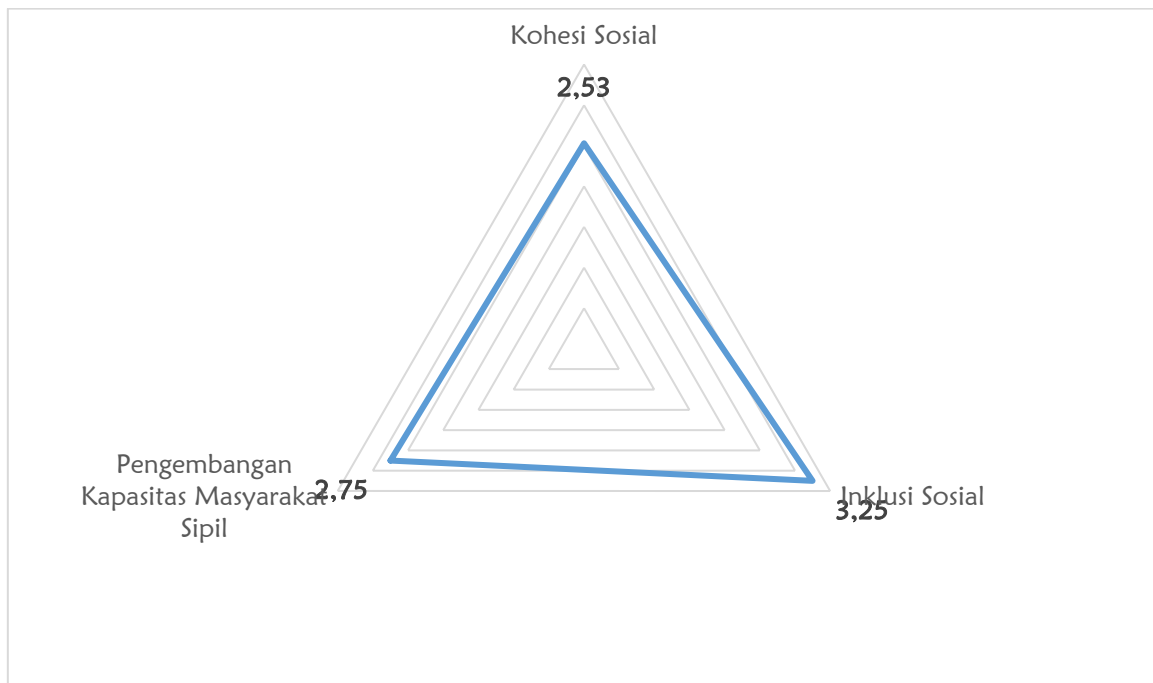
SURVEY INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT (IPMAS)
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025

Indikator	Skor Indikator	Nilai Konversi	Mutu	Komponen	Skor Komponen	Nilai Konversi	Mutu	Dimensi	Skor Dimensi	Nilai Konversi	Mutu	Skor IPMas	Nilai Konversi	Mutu
	A	B			C	D			E	F		G	H	
PEMILU legislatif DPD	3,83	96	A											
PEMILU legislatif DPR RI	3,84	96	A											
PEMILU Walikota dan Wakil Walikota	3,85	96	A											
PEMILU Gubernur	3,84	96	A											
PEMILU Presiden dan Wakil Presiden	3,85	96	A											
Keikutsertaan dalam organisasi	2,80	70	B	Organisasi masyarakat sipil	2,80	70	B							
Trauma akibat bencana alam	3,77	94	A	Mitigasi risiko sosial	1,30	33	D							
Mitigasi bencana alam	0,45	11	D											
Bantuan masalah hukum	1,47	37	D	Penyelesaian Sengketa	2,58	65	B							
Penyelesaian permasalahan	2,84	71	B											
Peranan Polisi	2,85	71	B											
Peranan Kejaksaan	2,36	59	C											
Peranan TNI	2,75	69	B											
Peranan Satpol PP	2,48	62	D											
Peranan Pemerintah Kelurahan	3,08	77	B											
Peranan Tokoh Agama	3,07	77	B											
Peranan Pemerintah Kota	2,60	65	B											

Sumber : Analisis, 2025



Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh skor IPMas sebesar 2,83 atau setara dengan nilai konversi 71 dengan kategori mutu B (baik). Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi pembangunan masyarakat berada pada tingkat yang cukup kuat, ditandai dengan masih terjaganya nilai-nilai solidaritas sosial, toleransi, partisipasi warga, serta kesadaran hukum dan politik. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut, khususnya pada dimensi jejaring sosial dan mitigasi risiko sosial. Secara lebih lanjut data skor Indeks Pembangunan Masyarakat dapat dilihat pada jaring laba-laba berikut, sehingga nilai tertinggi dan nilai terendah dapat lebih mudah dipahami.



Gambar 5. 38 Radar Net Skor Dimensi (E) IPMas
Sumber : Analisis, 2025

Diagram menampilkan bentuk segitiga yang tidak merata, menunjukkan adanya disparitas kinerja di antara ketiga dimensi.

1. Kohesi Sosial

Dimensi kohesi sosial memperoleh nilai konversi sebesar 0,63 dengan mutu B (baik). Capaian ini mencerminkan kuatnya hubungan sosial antarwarga dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial berbasis solidaritas, seperti memandikan, mengubur, dan melayat jenazah, menjenguk tetangga sakit, serta membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Kegiatan-kegiatan



tersebut menunjukkan bahwa nilai gotong royong dan kepedulian sosial masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, beberapa indikator seperti donor darah dan bantuan terhadap korban kebakaran menunjukkan capaian yang relatif lebih rendah, sehingga perlu didorong melalui peningkatan kesadaran sosial dan penguatan sistem kesiapsiagaan komunitas. Komponen jejaring sosial mencatat nilai konversi sebesar 0,53 dengan mutu C (cukup). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam organisasi formal, baik organisasi politik, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, maupun olahraga, masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi dalam organisasi formal mengindikasikan bahwa jejaring sosial masyarakat masih lebih bertumpu pada hubungan informal dan kegiatan keagamaan. Kondisi ini berpotensi membatasi penguatan modal sosial kelembagaan yang berperan penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan masyarakat. Komponen aksi kolektif memperoleh nilai konversi sebesar 0,60 dengan mutu C (cukup). Beberapa bentuk aksi kolektif seperti kerja bakti, peringatan hari kemerdekaan, dan kegiatan vaksinasi menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif masyarakat dalam kegiatan yang bersifat umum dan kepentingan bersama. Namun demikian, partisipasi dalam kegiatan keamanan lingkungan (siskamling), penyuluhan, serta kegiatan sosial tertentu masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran komunitas dan fasilitasi dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif. Komponen kepercayaan sosial menunjukkan nilai konversi sebesar 0,72 dengan mutu B (baik). Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat tercermin dari kesediaan warga untuk menitipkan rumah dan anak kepada tetangga, serta kepercayaan terhadap aparatur pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Capaian ini menunjukkan bahwa relasi sosial antarwarga dan antara masyarakat dengan aktor-aktor kelembagaan lokal masih terjalin dengan baik. Kepercayaan sosial yang kuat menjadi modal penting dalam mendukung stabilitas sosial dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.



2. Inklusi Sosial

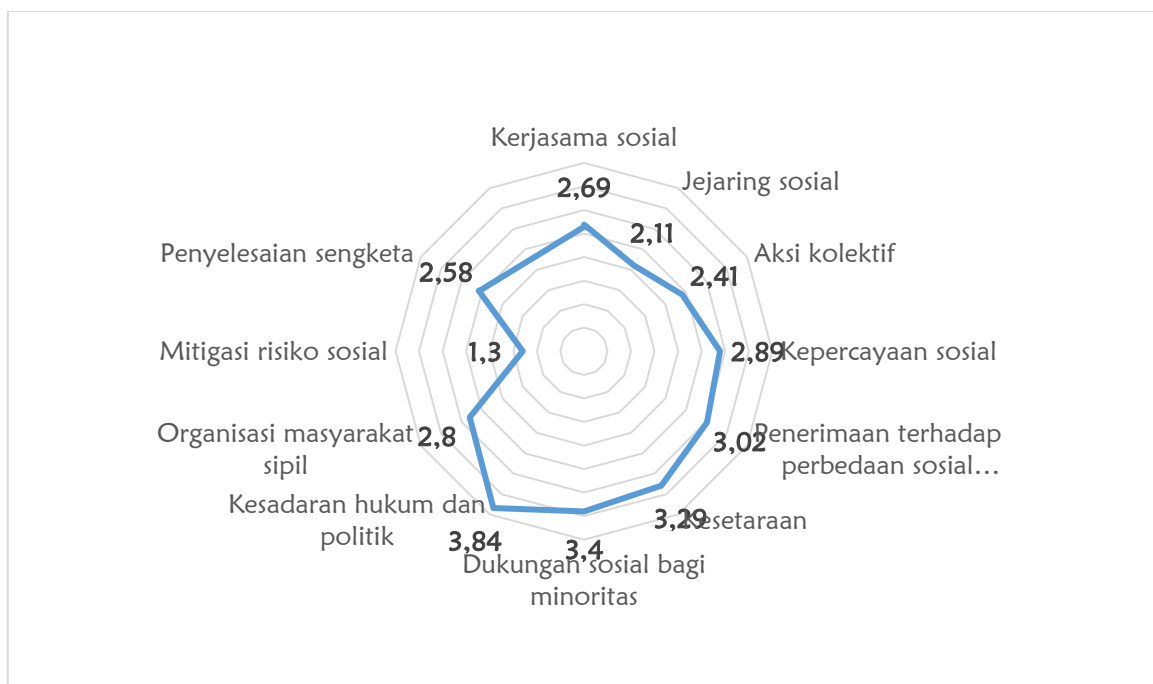
Dimensi inklusi sosial merupakan salah satu dimensi dengan capaian tertinggi, yaitu nilai konversi sebesar 0,81 dengan mutu A (sangat baik). Masyarakat menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap perbedaan sosial budaya, termasuk perbedaan suku dan agama. Selain itu, indikator terkait penolakan terhadap pembatasan, ancaman, dan kekerasan dalam menjalankan ibadah, serta pelarangan kegiatan agama, memperoleh nilai sangat tinggi. Hal ini mencerminkan kondisi sosial yang relatif inklusif, toleran, dan menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Komponen kesetaraan juga memperoleh mutu A dengan nilai konversi sebesar 0,82. Indikator kesetaraan gender, kesetaraan ras dan etnis, serta perlindungan terhadap kelompok rentan menunjukkan capaian yang sangat baik. Selain itu, dukungan sosial bagi kelompok minoritas juga berada pada kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial dan nondiskriminasi telah relatif tertanam dalam kehidupan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan setara.

3. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil

Komponen kesadaran hukum dan politik mencatat nilai konversi sebesar 0,96 dengan mutu A (sangat baik). Tingginya tingkat kepemilikan dokumen hukum serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di seluruh tingkatan menunjukkan kesadaran warga negara yang sangat kuat. Partisipasi aktif dalam proses demokrasi menjadi indikator penting bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dimensi pengembangan kapasitas masyarakat sipil memperoleh mutu B, namun aspek mitigasi risiko sosial dan mitigasi bencana alam menunjukkan mutu D (rendah) dengan nilai konversi yang sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki ketangguhan sosial yang cukup baik, kesiapsiagaan terhadap risiko sosial dan bencana alam masih menjadi kelemahan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi, pelatihan, serta penguatan kelembagaan kebencanaan dan mitigasi risiko di tingkat masyarakat.



Diagram menyajikan hasil pengukuran untuk dua belas komponen penyusun dimensi IPMas dengan skala penilaian berkisar antara 1,30 hingga 3,84. Interpretasi nilai-nilai ini mengindikasikan tingkat capaian atau persepsi relatif terhadap masing-masing dimensi. Data ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa sementara aspek kognitif dan normatif (seperti Kesadaran Hukum dan Dukungan Minoritas) sangat kuat, aspek struktural dan fungsional yang berkaitan dengan tindakan pencegahan (Mitigasi Risiko Sosial dan Jejaring Sosial) masih sangat lemah. Hal ini menuntut strategi yang lebih berfokus pada penguatan infrastruktur sosial dan mekanisme ketahanan komunitas.



Gambar 5. 39 Radar Net Skor Komponen (C) Penyusun Dimensi IPMas
Sumber : Analisis, 2025

5.5 PROYEKSI INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KAITANNYA DENGAN RPJMD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Kegiatan perhitungan Indeks Pembangunan Masyarakat baru dilaksanakan di Tahun 2025, sehingga tidak ada data dari tahun sebelumnya yang dapat dijadikan data historis. Proyeksi Indeks Pembangunan Masyarakat dihitung berdasarkan 3 skenario dengan asumsi sebagai berikut:

1. Skenario A – Pesimis: -0,5% per tahun

Skenario A menunjukkan stagnasi atau penurunan karena pelemahan program sosial, partisipasi masyarakat, dan anggaran.



2. Skenario B – *Business as Usual*/ Moderat: +1% per tahun

Skenario B menggambarkan pola pertumbuhan normal tanpa kebijakan baru yang signifikan.

3. Skenario C – Optimis: +2,5% per tahun

Skenario C menggambarkan percepatan IPMas sejalan dengan peningkatan kapasitas masyarakat, program pemberdayaan, dan kebijakan inklusif.

Tabel 5. 40 Proyeksi IPMas Tahun 2026-2030

Tahun	Proyeksi IPMas Tahun 2026-2030			Target IPMas dalam Dokumen RPJMD Kota Mojokerto 2025-2029	Keterangan
	Skenario A – Pesimis	Skenario B – <i>Business as Usual</i>	Skenario C – Optimis		
2025	71,0	71,0	71,0	70	Sudah tercapai
2026	70,6	71,7	72,8	71	Sudah tercapai jika menggunakan skenario B dan skenario C
2027	70,2	72,4	74,6	72	Sudah tercapai jika menggunakan skenario B dan skenario C
2028	69,9	73,1	76,5	73	Sudah tercapai jika menggunakan skenario B dan skenario C
2029	69,5	73,9	78,4	74	Sudah tercapai jika menggunakan skenario C
2030	69,1	74,6	80,4	75	Sudah tercapai jika menggunakan skenario C

Sumber : Analisis, 2025

Berdasarkan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2025-2029, Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan salah satu indikator dalam mencapai sasaran “meningkatnya kesetaraan gender dan identitas sosial kemasyarakatan” untuk mencapai tujuan “meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat” dari Misi ke-2 “Ketahanan Sosial dan Budaya, melalui upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudaya, kesetaraan gender dan memperkecil ketimpangan sosial”. Target yang ingin dicapai pada Tahun 2026 sebesar 71 hingga Tahun 2030 sebesar 75, dengan kenaikan tiap tahun sebesar 1. Target dari RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2025-2029 ini sudah sesuai dengan proyeksi IPMas skenario B yang telah disusun, bahkan dapat bernilai lebih tinggi jika menggunakan skenario C.

Rekomendasi yang dilakukan agar Indeks Pembangunan Masyarakat dapat berkembang sesuai target dari RPJMD diantaranya yaitu:

1. Peningkatan kapasitas layanan publik harus menjadi prioritas untuk mempercepat pertumbuhan IPMas.



2. Pengumpulan data sosial perlu diperbaiki untuk penyusunan proyeksi yang lebih akurat di masa depan.
3. Disarankan membuat *dashboard* monitoring IPMas untuk evaluasi tahunan.

5.6 ANALISIS AKAR MASALAH

Merujuk pada hasil penghitungan IPMas, semua dimensi mendapatkan nilai mutu B, kecuali dimensi inklusi sosial mendapatkan nilai mutu A. Terdapat beberapa komponen pada dimensi kohesi sosial yang penting untuk menjadi perhatian, diantaranya jejaring sosial dan aksi kolektif. Sedangkan, pada dimensi pengembangan kapasitas masyarakat sipil yang penting untuk menjadi perhatian adalah komponen mitigasi risiko sosial. Hal ini yang akan mendasari dilakukannya analisis akar masalah.

1. Kategori: Kendala Waktu & Ekonomi

Akar masalah yang terkait dengan keterbatasan waktu dan tekanan hidup, yang menjadi penghambat utama partisipasi.

a. Tekanan Ekonomi & Alokasi Waktu Intensif:

- 1) Profil pendapatan mayoritas responden berada di segmen kelas menengah ke bawah (di bawah Rp 3 Juta).
- 2) Waktu dialokasikan secara intensif untuk mencari nafkah dan/atau mengurus rumah tangga.
- 3) Hasilnya: Keterbatasan waktu luang yang akut, menjadikan "Tidak Ada Waktu" sebagai alasan dominan.

2. Kategori: Motivasi & Kualitas Program

Akar masalah yang terkait dengan insentif, manfaat, dan desain program/ organisasi.

a. Rendahnya Motivasi Utilitarian:

- 1) Partisipasi pada jejaring formal (non-keagamaan) rendah karena program/ organisasi dinilai "tidak bermanfaat" atau "tidak suka".
- 2) Mengindikasikan relevansi program yang ditawarkan kurang substantif atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

b. Krisis Representasi dan Kepercayaan:

- 1) Tingkat ketidakikutsertaan tinggi di organisasi politik dengan alasan utama "ketiadaan calon yang sesuai".



- 2) Mencerminkan jarak antara struktur formal dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- c. Keterbatasan Keahlian dan Peran Pasif:
 - 1) Rasa takut (misalnya, pada jarum suntik/ donor darah) atau merasa tidak memiliki keahlian untuk kegiatan spesifik.
 - 2) Kecenderungan menjadi partisipan/anggota pasif (bukan pengurus atau inisiator) dalam organisasi.
3. Kategori: Infrastruktur dan Kesiapsiagaan

Akar masalah yang terkait dengan fasilitas dan sarana prasarana penunjang kegiatan kolektif.

 - a. Minimnya Fasilitas Mitigasi Bencana:
 - 1) Sistem peringatan dini (EWS), rambu evakuasi, dan perlengkapan keselamatan bencana dinilai tidak tersedia oleh masyarakat.
 - 2) Menghambat partisipasi dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana.
 - b. Adanya Substitusi Peran:
 - 1) Asumsi bahwa kegiatan berisiko atau spesifik (misalnya, bencana) sudah diurus oleh pihak yang lebih ahli atau petugas khusus.
 - 2) Mengurangi inisiatif kolektif dan keterlibatan pribadi.



Gambar 5. 40 Diagram Akar Masalah IPMas

5.7 ANALISIS SWOT

Analisis SWOT mengelompokkan faktor-faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) yang berasal langsung dari data IPMas, serta faktor-faktor eksternal (Peluang dan Ancaman) yang berasal dari lingkungan luar, didukung oleh studi dan konteks perkotaan.

Tabel 5. 41 Analisis SWOT

	<p>STRENGTHS (Kekuatan) (S)</p> <p>S1. Partisipasi Politik dan Pemerintahan Tinggi Tingkat keikutsertaan dalam PEMILU sangat tinggi (Skor 0,96, Kategori A). Peranan Pemerintah Kelurahan dan Tokoh Agama dipersepsikan baik oleh masyarakat (Skor 0,77, Kategori B).</p> <p>S2. Modal Sosial Keagamaan Kuat Partisipasi dalam kegiatan keagamaan memiliki skor tinggi (0,74–0,76, Kategori B), menunjukkan adanya jaringan sosial yang aktif dan kuat di basis moral/ spiritual.</p> <p>S3. Rendahnya Trauma Bencana Skor trauma akibat bencana alam tinggi (0,94, Kategori A), menunjukkan masyarakat secara umum tidak dibebani trauma parah, yang menjadi modal untuk membangun program pencegahan tanpa hambatan psikologis berat.</p>	<p>WEAKNESSES (Kelemahan) (W)</p> <p>W1. Kesiapsiagaan Bencana Rendah (Kritis) Kesiapan mitigasi bencana alam berada pada titik terendah (Skor 0,11, Kategori D). Ini adalah kerentanan akut, terutama di wilayah yang memiliki risiko banjir.</p> <p>W2. Partisipasi Organisasi Sosial/ Ekonomi Lemah Partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil, politik, dan ekonomi sangat rendah (Skor 0,29–0,33). Sebagian besar responden (hingga 78,4%) beralasan "Tidak ada waktu luang" untuk berpartisipasi, mencerminkan adanya individualisme <i>urban</i>.</p> <p>W3. Akses Bantuan Hukum Rendah Kualitas bantuan masalah hukum dinilai sangat rendah (Skor 0,37, Kategori D).</p>
<p>OPPORTUNITIES (Peluang) (O)</p> <p>O1. Pemanfaatan Jaringan Keagamaan Jaringan keagamaan yang kuat (S2) dapat dimanfaatkan sebagai saluran efektif untuk sosialisasi mitigasi bencana (W1) dan program sosial/ ekonomi, karena merupakan satu-satunya wadah partisipasi yang berhasil menarik waktu warga.</p> <p>O2. Adopsi Model Partisipasi Fleksibel Kelemahan "tidak ada waktu" (W2) membuka peluang untuk adopsi model Partisipasi Asinkron dan <i>Micro-Volunteer</i></p>	<p>Strategi S1-S2 - 01 Integrasi Kesiapsiagaan Berbasis Agama Menggandeng Tokoh Agama (S2) dan Pemerintah Kelurahan (S1) sebagai <i>Champion</i> Mitigasi Bencana. Program sosialisasi dan simulasi dilakukan rutin setelah kegiatan keagamaan (Pengajian, Tahlilan, dll.)</p> <p>Strategi S1 - 02 Inisiatif Micro-Volunteer Resmi Pemerintah Kelurahan (S1) meluncurkan program partisipasi berbasis proyek <i>digital</i> (O2) jangka pendek (misal: desain konten informasi publik, survei <i>online</i>)</p>	<p>Strategi W2 - 02 Rebranding Organisasi Sosial Mengubah fokus Organisasi Sosial/ Ekonomi (W2) agar memberikan <i>value</i> ekonomi langsung (misal: pelatihan kewirausahaan digital). Hal ini dapat memecahkan masalah "tidak ada waktu" karena memberikan insentif praktis.</p> <p>Strategi W3 - 02 Kemitraan Akses Hukum Digital Mengatasi rendahnya bantuan hukum (W3) dengan menjalin kemitraan dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau Fakultas Hukum lokal, yang menyediakan konsultasi</p>



<p>berbasis <i>digital</i>, yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat perkotaan yang sibuk.</p> <p>O3. Insentif Kebijakan Pusat/ Daerah</p> <p>Terdapat inisiatif pemerintah daerah (seperti pemasangan <i>Early Warning System</i> di Kota Mojokerto) yang dapat menjadi dorongan untuk program mitigasi komprehensif di tingkat Kelurahan.</p>	<p>kebutuhan warga) yang disahkan dan dijamin oleh pemerintah.</p>	<p>hukum asinkron (via <i>chat</i> atau <i>video call</i>).</p> <p>Strategi W1 - O2</p> <p>Penyederhanaan Program Mitigasi</p> <p>Mengatasi kesiapsiagaan bencana yang kritis (W1) dengan mengadopsi model pelatihan yang sangat singkat dan terintegrasi ("10 Menit Siaga"), memanfaatkan peluang efisiensi waktu (O2).</p>
<p>THREATS (Ancaman) (T)</p> <p>T1. Risiko Geografis Bencana Banjir</p> <p>Kota Mojokerto berada di wilayah yang rentan terhadap bencana, khususnya banjir dari luapan sungai (seperti di Sub DAS Sadar), yang merupakan ancaman fisik yang konstan terhadap infrastruktur dan keselamatan warga.</p> <p>T2. Ancaman <i>False Security</i> (Rasa Aman Semu)</p> <p>Rendahnya trauma (S3) menciptakan risiko rasa aman semu, di mana masyarakat menjadi apatis dan kurang terdorong untuk berpartisipasi dalam pelatihan atau investasi alat mitigasi.</p> <p>T3. Dominasi Individualisme Perkotaan</p> <p>Kecenderungan masyarakat <i>urban</i> yang semakin individualis dan transaksional dapat terus mengikis modal sosial, membuat upaya penguatan organisasi sipil (W2) semakin sulit dan tidak berkelanjutan.</p>	<p>Strategi S3 - T2</p> <p>Edukasi Risiko untuk Mengatasi Apatisme</p> <p>Memanfaatkan rendahnya trauma (S3) sebagai modal untuk kampanye pencegahan proaktif, bukan reaktif. Kampanye difokuskan pada pemahaman risiko banjir (T1) tanpa menimbulkan kepanikan.</p> <p>Strategi S1-S2 – T1</p> <p>Mobilisasi Jaringan untuk <i>Hard Infrastructure</i></p> <p>Menggunakan jaringan keagamaan (S2) dan kepercayaan pemerintah (S1) untuk mengadvokasi percepatan pemasangan <i>Early Warning System</i> (EWS) atau pembangunan infrastruktur mitigasi lain, menanggapi ancaman geografis (T1).</p>	<p>Strategi W1 – T1-T2</p> <p>Perumusan Protap EWS Komunitas</p> <p>Segara mengatasi skor mitigasi kritis (W1) dengan menetapkan Prosedur Tetap (Protap) Peringatan Dini Bencana yang sangat sederhana di tingkat RT/RW. Protap harus melibatkan individu dengan waktu luang paling banyak (misal: Pensiunan) agar tidak terhambat oleh T3.</p> <p>Strategi W2 – T3</p> <p>Memperkuat Fungsi RT/RW sebagai Basis Sosial</p> <p>Mengubah fokus kerja RT/RW dari kegiatan seremonial menjadi fasilitator penyelesaian masalah riil. Hal ini melawan dominasi individualisme (T3) dan kerentanan hukum (W3) dengan menyediakan solusi masalah di tingkat paling dasar (tetangga).</p>

Sumber : Analisis, 2025





KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

1. **Tingkat Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kota Mojokerto Tahun 2025 dikategorikan “Baik”** dengan nilai 71. Meskipun demikian, performa antar-komponen masih bervariasi, terutama pada aspek jejaring sosial, aksi kolektif, serta mitigasi risiko sosial yang memperoleh skor rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan modal sosial komunitas dengan kapasitas kelembagaan masyarakat sipil.
2. **Modal sosial masyarakat menunjukkan kekuatan signifikan**, khususnya melalui jejaring keagamaan, partisipasi kolektif dalam kegiatan keagamaan, dan tingkat kepercayaan interpersonal yang tinggi. Data ini konsisten dengan karakteristik sosial budaya kota-kota Jawa yang ditopang oleh *religious-based social capital*.
3. **Partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial, ekonomi, dan politik masih rendah**, dengan alasan dominan berupa keterbatasan waktu (61–78%). Fenomena ini telah banyak dijelaskan oleh literatur sosiologi perkotaan sebagai akibat meningkatnya individualisme, tuntutan ekonomi *urban*, serta pergeseran pola partisipasi dari berbasis komunitas menjadi berbasis kebutuhan praktis.
4. **Mitigasi risiko bencana menjadi aspek yang paling kritis**, ditandai oleh skor komponen mitigasi risiko sosial yang berada pada kategori D dan absennya fasilitas mendasar seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta perlengkapan keselamatan bencana. Hal ini diperparah oleh fakta empiris yang muncul dalam media massa terkait kejadian banjir di beberapa kelurahan,



termasuk wilayah Kelurahan Sentanan yang disebutkan sebagai salah satu titik masalah oleh responden.

5. **Akses masyarakat terhadap layanan hukum masih terbatas**, di mana sebagian besar responden tidak menerima bantuan hukum saat berhadapan dengan masalah hukum dan lebih mengandalkan mekanisme penyelesaian informal (musyawarah). Kondisi ini menunjukkan pentingnya perluasan akses keadilan yang inklusif dan mudah dijangkau.
6. **Kualitas pelayanan publik dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu**. Masyarakat mengapresiasi layanan cepat, responsif, gratis, serta inovasi *digital* di level pemerintahan. Namun, kelemahan mencakup lambannya respons terhadap aduan, kurangnya sosialisasi kebijakan, birokrasi yang kaku, ketidakmerataan pembangunan, minimnya kunjungan lapangan aparat, dan permasalahan teknis seperti data kependudukan yang belum optimal secara daring.
7. **Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa masyarakat Kota Mojokerto memiliki modal sosial yang kuat dan persepsi positif terhadap pembangunan**, namun masih terdapat tantangan struktural terkait adaptasi *digital* birokrasi, kesiapsiagaan bencana, keadilan distribusi layanan publik, dan penguatan partisipasi sipil.

6.2 SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, berikut saran yang dapat digunakan Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan nilai IPMas:

1. **Penguatan Sistem Mitigasi Risiko Bencana Berbasis Komunitas**
 - a. Pemerintah perlu membangun jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan sarana keselamatan bencana secara bertahap dan terukur mengingat skor mitigasi risiko yang sangat rendah.
 - b. Pelaksanaan pelatihan kebencanaan dapat diintegrasikan dengan kegiatan sosial dan keagamaan yang telah memiliki partisipasi tinggi.
 - c. Pemerintah perlu memprioritaskan wilayah dengan kerentanan tinggi seperti Kelurahan Sentanan yang disebutkan masyarakat sebagai lokasi dengan persoalan banjir berulang.



2. Revitalisasi Organisasi Sosial dan Penguatan Jejaring Sipil

- a. Organisasi sosial, ekonomi, dan kepemudaan perlu direvitalisasi dengan model *value-driven participation*, misalnya pelatihan ekonomi *digital*, inovasi UMKM, dan kegiatan berbasis kebutuhan praktis warga.
- b. Pemerintah dapat mengembangkan skema *micro-volunteering* berbasis *digital* untuk mengatasi keterbatasan waktu warga dan menyesuaikan pola partisipasi dengan kondisi urban kontemporer.

3. Peningkatan Kualitas dan Responsivitas Pelayanan Publik

- a. Responden menekankan kebutuhan peningkatan kecepatan, ketepatan, dan responsivitas layanan publik, khususnya dalam menangani keluhan warga.
- b. Pemerintah perlu memperkuat sistem layanan aduan berbasis digital yang terintegrasi, didukung oleh standar operasional *fast response* di tingkat kelurahan, dinas, dan RT/RW.

4. Transparansi, Sosialisasi Kebijakan, dan Reformasi Birokrasi

- a. Kurangnya sosialisasi kebijakan menjadi temuan penting. Pemerintah perlu meningkatkan intensitas diseminasi kebijakan melalui kanal *digital* resmi, pertemuan komunitas, dan media massa lokal.
- b. Reformasi birokrasi diperlukan untuk mengurangi prosedur yang dianggap kaku dan berbelit oleh masyarakat, termasuk penguatan digitalisasi data kependudukan yang dinilai belum optimal.

5. Pemerataan Pembangunan dan Keadilan Distribusi Layanan

- a. Pemerintah perlu menindaklanjuti isu-isu pemerataan yang disampaikan masyarakat: pembangunan fisik, penyaluran bantuan sosial, serta prioritas untuk warga kecil dan kelompok rentan.
- b. Evaluasi berkala terhadap data kemiskinan dan indikator kesejahteraan diperlukan untuk memastikan program tepat sasaran.

6. Penguatan Layanan Hukum dan Keadilan Inklusif

- a. Diperlukan kemitraan dengan LBH, universitas, dan advokat lokal untuk menyediakan konsultasi hukum gratis atau berbiaya terjangkau melalui mekanisme kombinasi tatap muka dan *digital*.
- b. Edukasi literasi hukum harus diperluas melalui forum kelurahan, media sosial pemerintah, dan tokoh masyarakat.



7. Optimalisasi Disiplin Aparatur dan Kunjungan Lapangan

- a. Disiplin aparatur dan tata kerja pelayanan publik perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi layanan.
- b. Pemerintah perlu meningkatkan intensitas turun ke bawah dalam rangka menyerap aspirasi warga, karena keluhan mengenai minimnya kunjungan ke RT/RW menjadi temuan signifikan.

8. Pemanfaatan Media Massa dan Media Sosial untuk Edukasi Publik

- a. Media lokal dan kanal *digital* Pemerintah Kota Mojokerto Mojokerto perlu dimanfaatkan sebagai instrumen edukasi publik mengenai mitigasi bencana, kebijakan pemerintahan, dan program pembangunan.
- b. Penguatan strategi komunikasi publik berbasis bukti (*evidence-based communication*) akan meningkatkan kepercayaan warga dan efektivitas kebijakan.

Selain pada rumusan aktifitas di atas, Pemerintah Kota Mojokerto penting untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program eksisting kerja yang telah dirancang oleh setiap OPD baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap tercapainya kondisi Kota Mojokerto yang kondusif.

Tabel 6. 1 Uraian Program Kerja Pemerintah Kota Mojokerto

Dimensi	Sub-dimensi	Variabel	Program Kerja	Bidang Urusan
Kohesi Sosial	Kerjasama Sosial	Partisipasi dalam kegiatan sosial	Program peningkatan kerjasama desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Jejaring Sosial	Partisipasi dalam kegiatan kelompok	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengembangkan fasilitas kelompok kebudayaan dan kesenian ✓ Mengembangkan kegiatan seni dan budaya dalam rangka mendorong ekonomi kreatif ✓ Mendorong terwujudnya desa budaya 	Kebudayaan
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kota Mojokerto mengaji ✓ 1 desa 1 hafidh ✓ Dukungan operasional dan insentif guru MADIN, TPQ, Pondok Pesantren, Sekolah Minggu, dan sekolah keagamaan lain 	Sekretariat Daerah
			Peningkatan kualitas jalan	Pekerjaan Umum
	Aksi kolektif	Partisipasi dalam kegiatan umum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sarasehan ✓ Upacara kenegaraan ✓ Kerja bakti 	Pemberdayaan Masyarakat Desa



Dimensi	Sub-dimensi	Variabel	Program Kerja	Bidang Urusan
	Kepercayaan sosial	Sikap percaya terhadap lingkungan	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
Inklusi sosial	Penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya	Tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan agama/ etnis lain	Dukungan operasional dan fasilitas Pembangunan tempat ibadah, organisasi kemasyarakatan, dan kegiatan keagamaan	Sekretariat Daerah
	Inklusi terhadap minoritas	Tanggapan terhadap pimpinan daerah dari suku/ etnis lain	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mendorong terwujudnya desa budaya ✓ Sarasehan ✓ Upacara kenegaraan ✓ Kerja bakti 	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Kesetaraan gender	Kesetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan	Pembangunan responsif gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Dukungan sosial bagi minoritas	Hambatan dalam mengakses fasilitas umum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fasilitas biaya pendidikan dan kesehatan warga tidak mampu dalam bentuk Kartu Mojokerto Pintar dan Kartu Mojokerto Sehat ✓ Fasilitas ibu hamil dan fakir miskin 	Perencanaan dan Pembangunan
Pengembangan kapasitas masyarakat sipil	Kesadaran hukum dan politik	Kepemilikan identitas dasar	Percepatan penurunan <i>stunting</i> serta angka kematian bayi, ibu, dan anak	Kesehatan
		Partisipasi dalam PEMILU Tahun 2024	Program pendaftaran penduduk	Kependudukan dan pencatatan sipil
	Organisasi masyarakat sipil	Keanggotaan dalam Organisasi Massa (ORMAS) dan partai politik	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Mitigasi risiko sosial	Ketersediaan fasilitas/ upaya antisipasi/ mitigasi bencana alam	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembangunan sumur resapan ✓ Konservasi sumber daya air ✓ Penanggulangan dan penanganan bencana alam 	Pekerjaan Umum



Dimensi	Sub-dimensi	Variabel	Program Kerja	Bidang Urusan
		kesiapsiagaan bencana alam		
	Penyelesaian sengketa	Keterlibatan aparat keamanan/ pemerintah sebagai penengah dalam kekerasan massa	Fasilitas dan dukungan untuk menunjang kondusifitas dan keamanan daerah	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Keterlibatan tokoh masyarakat/ agama sebagai penengah dalam kekerasan massa	Pendampingan dan konsultasi hukum aparat pemerintah desa	Kesatuan Bangsa dan Politik

